



**Pemerintah
Kabupaten
Kepulauan**

Selayar

LAPORAN KINERJA

an

**PEMERINTAH
Selayar**

KABUPATEN

KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN 2019



**TAHUN
2020**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Alhamdulillah robbil'alamin, kami panjatkan segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu instrumen dalam upaya untuk

mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Secara garis besar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini berisi informasi tentang perencanaan dan capaian kinerja Tahun ketiga periode 2016-2021 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih belum sempurna. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sangat mengharapkan adanya kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Benteng, Maret 2020

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

H. MUH. BASLI ALI

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
Daftar Tabel	IV
Daftar Bagan	V
Daftar Gambar	VI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar	3
1.4. Pertumbuhan Ekonomi	12
1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	14
1.6. Susunan Organisasi Perangkat daerah	17
1.7. Jumlah Pegawai Negeri sipil	18
1.8. Isu-isu Strategis	19
1.9. Sistematika Penyusunan	22
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	24
2.1. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021	24
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	50
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	53
2.4. Rencana Kerja Tahunan (RKT)	62
2.5. Perjanjian Kinerja	63
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	71
3.1. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019	71
3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019	83
3.3. Akuntabilitas Keuangan	251
3.4. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sumber Daya.....	272
BAB IV PENUTUP	293
LAMPIRAN	
I. Surat Pernyataan Reviu Inspektorat	
II. Penghargaan Yang Diterima Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019	
III. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1 : Luas Wilayah Kecamatan	4
Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk Kab. Kepulauan Selayar.....	5
Tabel 1.3 : Data Agregat Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Per 31 Desember Tahun 2019.....	7
Tabel 1.4 : Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar menurut tingkat Pendidikan.....	8
Tabel 1.5 : Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok umur Kabupaten Kepulauan Selayar.....	8
Tabel 1.6 : Jumlah penduduk Kabupaten kepulauan Selayar Menurut Agama	9
Tabel 1.7 : Jumlah Penduduk Kabupaten kepulauan Selayar menurut Pekerjaan dan jenis kelamin.....	9
Tabel 1.8 : Indikator Makro di Kabupaten Kepulauan Selayar 2016-2021.....	12
Tabel 1.9 : Penggolongan PNSD Dari Tahun 2019.....	18
Tabel 1.10 : Pengolongan PNSD dari tingkat pendidikan tahun 2019.....	18
Tabel 1.11 : Penggolongan Pegawai Tidak Tetap (PTT) T.A 2019.....	19
Tabel 2.1 : Keterkaitan visi RPJMD Kabupaten kepulauan Selayar dengan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar.....	26
Tabel 2.2 : Keterkaitan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan visi RPJMD Prov. Sul-Sel.....	27
Tabel 2.3 : Keterkaitan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan visi RPJMN RI.....	28
Tabel 2.4 : Rumusan, visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja sasaran RPJMD Kab. Kep. Selayar 2016-2021.....	34
Tabel 2.5 : Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kepulauan Selayar.....	54
Tabel 2.6 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	64
Tabel 3.1 : Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	72
Tabel 3.2 : Pencapaian Indikator Sasaran.....	73
Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Penetapan Kinerja Tahun 2019.....	74
Tabel 3.4 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1.....	84
Tabel 3.4.1 : Menciptakan kondisi stabilitas daerah yang kondusif.....	87
Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2.....	88
Tabel 3.5.1 : Peningkatan realisasi kinerja dari 2017 s.d. 2019.....	88
Tabel 3.5.2 : Opini hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2016 s.d. 2019.....	89
Tabel 3.6 : Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3.....	92
Tabel 3.6.1 : Perkembangan capaian nilai Sakip kab. Kep selayar tahun 2015-2019.....	94

Tabel 3.6.2	: Perkembangan nilai EKPPD.....	97
Tabel 3.7	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4.....	98
Tabel 3.8	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5.....	99
Tabel 3.8.1	: Data angka Kriminalitas tahun 2014-2019.....	100
Tabel 3.8.2	: Tingkat penyelesaian pelanggaran K3.....	101
Tabel 3.9	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6.....	105
Tabel 3.10	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7.....	107
Tabel 3.11	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8.....	112
Tabel 3.12	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9.....	119
Tabel 3.13	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10.....	121
Tabel 3.13.1	: Perkembangan angka melek huruf tahun 2016-2019.....	122
Tabel 3.13.2	: Perkembangan rata-rata lama sekolah tahun 2016-2019.....	123
Tabel 3.13.3	: Data jumlah siswa dan jumlah penduduk.....	124
Tabel 3.13.4	: Data angka partipasi.....	125
Tabel 3.13.5	: Capaian Angka partisipas Murni.....	127
Tabel 3.14	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11.....	128
Tabel 3.15	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 12.....	132
Tabel 3.15.1	: Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan.....	133
Tabel 3.16	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 13.....	139
Tabel 3.16.1	: Responden pada pelaksanaan survey persepsi korupsi dinas kepemudaan dan olahraga.....	140
Tabel 3.16.2	: Proporsi Remaja dan dewasa dengan keterampilan Bahasa asing.....	141
Tabel 3.16.3	: Jumlah Pemuda dan orang Dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan	142
Tabel 3.16.4	: Capaian indikator pemuda mandiri.....	146
Tabel 3.17	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 14.....	147
Tabel 3.18	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 15.....	151
Tabel 3.18.1	: Data Kapal angkutan tahun 2018-2019.....	154
Tabel 3.19.1	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16.....	158
Tabel 3.19.1.1	: Data kondisi jalan.....	161
Tabel 3.19.1.2	: Daftar jalan menurut keadaan dan statys jalan dalam kilometer tahun 2019.....	162
Tabel 3.19.1.3	: Pembangunan infrastruktur pedesaan.....	163
Tabel 3.19.1.4	: Data Pelabuhan Laut.....	167
Tabel 3.19.1.5	: Data pelabuhan penyeberangan.....	171
Tabel 3.19.2	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16.....	172
Tabel 3.19.2.1	: Rasio jaringan irigasi.....	173
Tabel 3.19.3	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16.....	175
Tabel 3.19.3.1	: Jumlah keluarga miskin dengan rumah tidak layak huni.....	177
Tabel 3.19.3.2	: Capaian rumah layak huni tahun 2017-2019.....	179
Tabel 3.19.3.3	: Cakupan sanitasi layak.....	181

Tabel 3.19.3.4	: Kawasan kumuh tertangani 2016-2019.....	182
Tabel 3.19.4	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16.....	184
Tabel 3.20	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 17.....	186
Tabel 3.21	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 18.....	200
Tabel 3.21.1	: Data Kunjungan Kapal, Jumlah Barang dan Penumpang.....	200
Tabel 3.22	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 19.....	202
Tabel 3.23	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 20.....	206
Tabel 3.24	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 21.....	208
Tabel 3.24.1	: Capaian kinerja pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (KIPT) tahun 2019.....	210
Tabel 3.24.2	: Pengukuran capaian pada indikator kinerja pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (KIPT) tahun 2019.....	211
Tabel 3.25	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 22.....	212
Tabel 3.26.1	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23.....	215
Tabel 3.26.1.1	: Pengukuran Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Komsumsi Tahun 2019.....	217
Tabel 3.26.1.2	: Situasi Konsumsi Pangan wilayah Kabupaten Kepulauan selayar berdasarkan Energi dan protein.....	218
Tabel 3.26.1.3	: Perbandingan capaian produksi dan produktivitas padi 2016-2019	220
Tabel 3.26.1.4	: Perbandingan capaian produk dan produktivitas jagung.....	221
Tabel 3.26.1.5	: Perbandingan capaian produk dan produktivitas jeruk keprok.....	223
Tabel 3.26.1.6	: Capaian produk dan produktivitas perkebunan (kepala, pala, cengkeh, jambu mente).....	226
Tabel 3.26.2	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23.....	227
Tabel 3.26.2.1	: Perbandingan capaian populasi ternak (ekor) 2016-2019.....	233
Tabel 3.26.4	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23.....	234
Tabel 3.26.4.1	: Pengukuran Indikator Nilai Tukar Nelayar (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPI) Tahun 2019.....	236
Tabel 3.26.4.2	: Data produksi perikanan tangkap kabupaten kepulauan selayar tahun 2019.....	237
Tabel 3.26.4.3	: Pengukuran capaian pada indikator kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap kabupaten kepulauan selayar tahun 2019.....	237
Tabel 3.25.3.4	: Perbandingan antara target dan realisasi indikator produksi perikanan tangkap dalam periode renstra.....	238
Tabel 3.26.4.5	: Data produksi perikanan budidaya kabupaten kepulauan selayar 2019.....	239
Tabel 3.26.4.6	: Pengukuran capaian pada indikator kinerja peningkatan produksi perikanan budidaya.....	239
Tabel 3.26.4.7	: Perbandingan antara target dan realisasi indikator produksi perikanan budidaya dalam periode renstra.....	240
Tabel 3.26.4.8	: Target dan capaian indikator produksi olahan hasil perikanan tahun 2019.....	241
Tabel 3.26.4.9	: Perbandingan antara target dan capaian indikator produksi olahan hasil perikanan dalam periode Renstra.....	241

Tabel 3.26.4.10	: Capaian indikator kinerja pada konsumsi ikan tahun 2019.....	243
Tabel 3.26.4.11	: Capaian Indikator kinerja pada Konsumsi ikan tahun 2019.....	243
Tabel 3.27	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 24.....	245
Tabel 3.27.1	: Data perbandingan IKLH.....	246
Tabel 3.27.2	: Perbandingan capaian kinerja indeks kualitas air.....	246
Tabel 3.27.3	: Perbandingan capaian kinerja indeks kualitas udara.....	247
Tabel 3.27.4	: Perbandingan capaian kinerja indeks kualitas tutupan lahan.....	248
Tabel 3.27.5	: Luas kawasan hutan.....	249
Tabel 3.27.6	: Luas kawasan penggunaan lainnya.....	250
Tabel 3.27.7	: Luasan ruangan terbuka hijau (RTH) tahun 2019.....	252
Tabel 3.28	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 25.....	254
Tabel 3.28.1	: Distribusi penduduk kabupaten kepulauan selayar menurut kegiatan	255
Tabel 3.29	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 26.....	257
Tabel 3.29.1	: Persentase koperasi tahun 2019.....	258
Tabel 3.29.2	: Persentase koperasi aktif tahun 2013-2019.....	258
Tabel 3.29.3	: Persentase koperasi aktif menurut kecamatan tahun 2013-2019.....	259
Tabel 3.30	: Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 27.....	264
Tabel 3.31	: Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	267
Tabel 3.32	: Tingkat Efektifitas sumber daya Tahun 2019.....	272
Tabel 3.33	: Keterkaitan Sasaran Startegis, IKU dan Program.....	279

Daftar Bagan

	Halaman
Bagan 1.1 : Struktur organisasi	17

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1 : Peta Kabupaten Kepulauan Selayar.....	4
Gambar 2.1 : Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar.....	24
Gambar 2.2 : Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah.....	32
Gambar 2.3 : Hubungan Kinerja Daerah.....	33
Gambar 1.2 : Pelaksanaan Ibadah bersama Bupati dan Wakil Bupati Kep. Selayar.....	84
Gambar 1.3 : Penyerahan bantuan seragam Sekolah oleh Bupati Kep. Selayar.....	114
Gambar 1.4 : Bupati Kepulauan Selayar menerima penghargaan universal Health Coverage (UHC) dari Presiden RI.....	129
Gambar 1.5 : Paskibraka.....	144
Gambar 1.6 : Andi Try Sandi Saputra peraih medali emas dari cabang olahraga Sepak Takraw pada SEA Games ke-30 di Philipina.....	147
Gambar 1.7 : Mahendra Yanto peraih medali emas dari cabang olahraga dayung pada SEA Games Ke 30 di Philipina.....	148
Gambar 1.8 : Devi peraih medali perunggu dari cabang olahraga dayung (rowing) pada Pra PON Jawa Barat.....	149
Gambar 1.9 : Para Atlit peraih medali emas pada kejuaraan Nasional di Jakabaring Palembang.....	149
Gambar 1.10 : Kapal Rakyat KM Nusantara 9 bantuan dari Kementrian Perhubungan	155
Gambar 1.11 : KM Sabuk Nusantara 85 Rute Makassar-Bantaeng-Bulukumba-Selayar-Maumere NTT (PP).....	155
Gambar 1.12 : Maskapai Penerbangan yang melayani Makassar-Selayar (PP).....	157
Gambar 1.13 : Kondisi Jalan di Kecamatan Bontosikuyu.....	161
Gambar 1.14 : Area Parkir Pesawat (Apron) bandara H. Aroeppala.....	164
Gambar 1.15 : Pelabuhan Penyebrangan Pamatata.....	166
Gambar 1.16 : Area Parkir dan Peron Kedatangan/Keberangkatan Terminal angkutan Darat Benteng.....	169
Gambar 1.17 : Pelabuhan Penyebrangan Pattumbukang Kabupaten Kepulauan Selayar.....	171
Gambar 1.18 : Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bolu-Bolu.....	173
Gambar 1.19 : Prasarana Air Baku Buhung Se'la.....	179
Gambar 1.20 : Bupati Kep.Selayar bersama juara International Half Marathon dari Republik Kenya.....	187
Gambar 1.21 : Kunjungan Wisatawan Mancanegara.....	188
Gambar 1.22 : Bupati Kepulauan Selayar bersama salah seorang Investor dari Spanyol.....	205
Gambar 1.23 : Bupati Kepulauan selayar panen perdana padi di kecamatan Bontosikuyu.....	221
Gambar 1.24 : Insiminasi buatan bagi kelompok tani.....	230
Gambar 1.25 : Pengelolaan Ikan secara tradisional.....	242
Gambar 1.26 : Mancing mania bersama kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.....	243
Gambar 1.27 : Lomba seni antar sekolah yang di laksanakan setiap tahun.....	266

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kerja dan alat pendorong terwujudnya **Good Governance** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Untuk itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ini mendasarkan pada amanat Peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode Tahun 2016-2021. Maksud Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2019 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun Anggaran 2019;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2019;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;

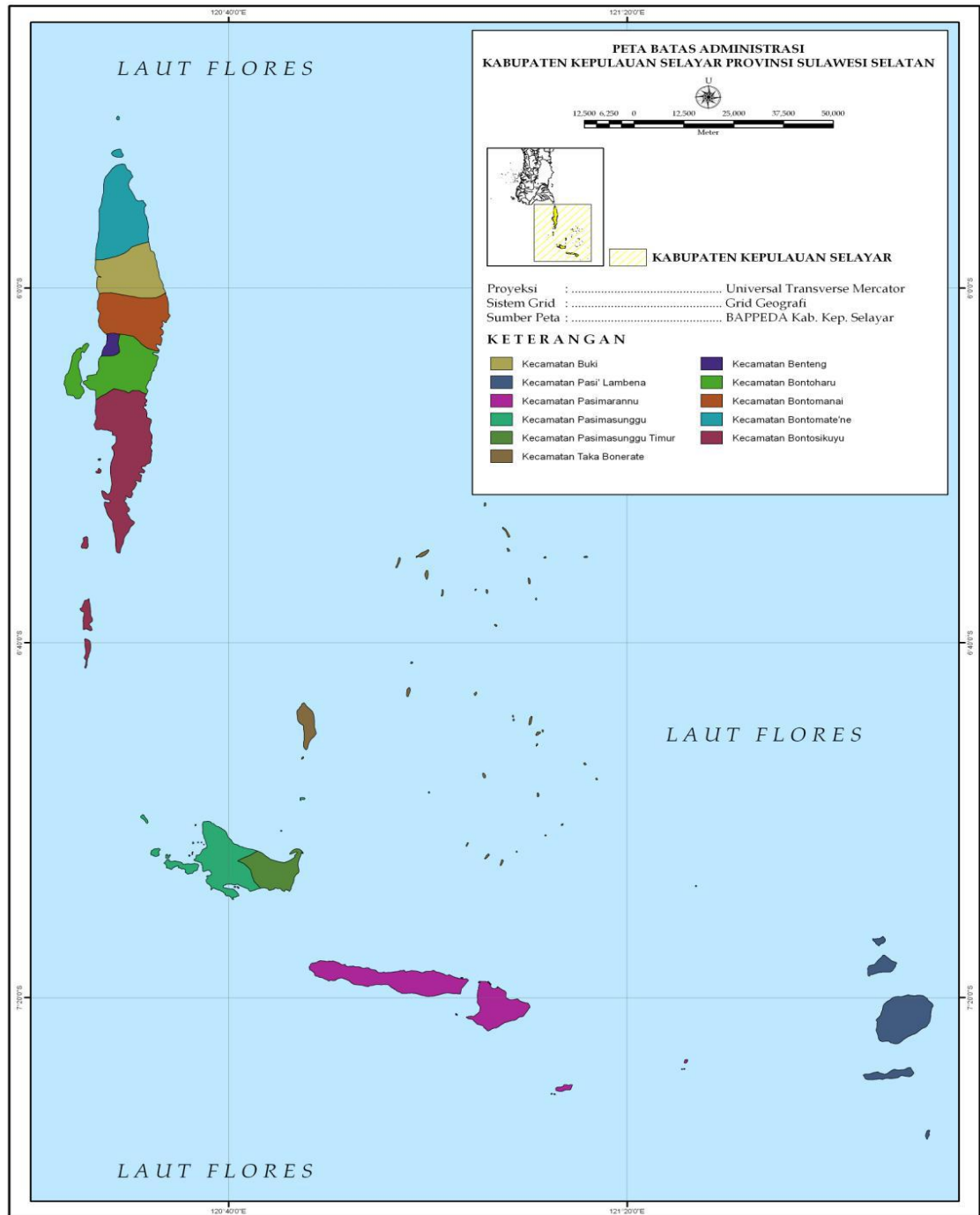
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan menerapkan azas transparansi, sistematis, dan *accountable* (dapat dipertanggungjawabkan).

1.3. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

1.3.1. Kondisi Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara $5^{\circ}42' - 7^{\circ}35'$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}15' - 122^{\circ}30'$ Bujur Timur. Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, dan satu-satunya kabupaten yang terpisah dari Pulau Sulawesi. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 10.503,69 km², terdiri atas 130 pulau dengan wilayah daratan seluas 1.357,03 km², dan wilayah laut seluas 9.146,66 km², dengan panjang garis pantai yaitu 670 km. Secara administratif, Kabupaten Kepulauan Selayar terbagi menjadi 11 (sebelas) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa dan 7 (tujuh) kelurahan. Sebanyak 5 (lima) kecamatan berada di kepulauan, masing-masing Kecamatan Pasimarannu dengan ibukota Bonerate, Kecamatan Pasimasunggu dengan ibukota Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur dengan ibukota Ujung Jampea, Kecamatan Taka Bonerate dengan ibukota Kayuadi, dan Kecamatan Pasilambena dengan ibukota Kalaotoa. Sedangkan 6 (enam) kecamatan lainnya berada di daratan Pulau Selayar, masing-masing Kecamatan Benteng dengan ibukota Benteng, Kecamatan Bontoharu dengan ibukota Matalalang, Kecamatan Bontosikuyu dengan ibukota Pariangan, Kecamatan Bontomanai dengan ibukota Polebunging, Kecamatan Buki dengan ibukota Buki dan Kecamatan Bontomatene dengan ibukota Batangmata. Berikut adalah rincian luas wilayah masing-masing kecamatan.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Kepulauan Selayar



Tabel 1.1
Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Jumlah		Luas (km ²)
		Desa	Kelurahan	
1	Pasimarannu	8	-	195,33
2	Pasilambena	6	-	114,88
3	Pasimasunggu	7	-	131,8
4	Taka Bonerate	9	-	49,3
5	Pasimasunggu Timur	6	-	67,14
6	Bontosikuyu	12	-	248,22
7	Bontoharu	6	2	128,12
8	Benteng	-	3	24,63
9	Bontomanai	10	-	136,42
10	Bontomatene	10	2	193,05
11	Buki	7	-	68,14
	Total	81	7	1.357,03

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Kepulauan Selayar

Tabel 1.2
Jumlah Pulau di Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Kecamatan	Jumlah Pulau	Tinggi Wilayah (mdpl)	Jarak ke Ibukota (km)
1	Pasimarannu	15	0-324	140
2	Pasilambena	16	0-351	193
3	Pasimasunggu	21	0-530	85
4	Taka Bonerate	29	0-287	75
5	Pasimasunggu Timur	5	0-530	96
6	Bontosikuyu	29	0-607	18
7	Bontoharu	8	0-507	3
8	Benteng	-	0-507	0
9	Bontomanai	-	0-531	18
10	Bontomatene	6	0-282	27
11	Buki	-	0-207	19
	Total	130		

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka 2019, BPS Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba (Selat Bira);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Flores
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Nusa Tenggara Timur

Dari 130 Pulau yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, terdiri atas pulau besar dan pulau kecil. Gugusan kepulauan tersebut sebagian dihuni penduduk, sebagian lagi merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Pulau-pulau berpenghuni tersebut antara lain Pulau Pasi Tanete, Pulau Pasi Gusung, Bahuluang, Tambolongang, Polassi, Jampea, Lambego, Bonerate, Pasi Tallu, Kakabia, Jinato, Kayuadi, Rajuni, Rajuni Bakka, Rajuni Ki'di, Kalaotoa, Latondu, Pulo Madu dan lain-lain. Jumlah keseluruhan pulau berpenghuni 34 buah, sedangkan selebihnya merupakan pulau yang tidak berpenghuni.

Kabupaten Kepulauan Selayar terletak di tengah bentangan barat-timur Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan berada diantara Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yakni ALKI II dan III. Keunggulan tersebut dilengkapi lagi dengan bentangan garis pantai yang mayoritas berbatasan dengan laut dalam, yang selama ini digunakan sebagai jalur lalu lintas transportasi domestik, nasional dan internasional. Jalur transportasi tersebut melalui Selat Bira, sehingga Selayar sangat potensial dikembangkan sebagai Pusat Distribusi Logistik 9 (Sembilan) bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ke Kawasan Timur Indonesia (KTI). Lebih jauh lagi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar dan pulau-pulau kecil di sekitarnya didukung pula oleh potensi sumberdaya alam, terutama disektor perminyakan di kawasan utara Pulau Selayar, sektor perikanan dan pariwisata di kawasan tengah dan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Takabonerate.

1.3.2. Kondisi Demografis

Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diberikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah sosial dan lingkungan. Berikut ini disajikan data jumlah penduduk yang ada di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan klasifikasi menurut jenis pendidikan, berdasarkan kelompok umur, agama dan jenis pekerjaan.

Tabel 1.3
**DATA AGREGAT PENDUDUK KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
PER 31 DESEMBER TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH PENDUDUK		
				L	P	L + P
1	3	4	5	6	7	8
1	BENTENG	6,750	16,960	11,568	12,409	23,977
2	BONTOHARU	4,236	10,391	7,365	7,437	14,802
3	BONTOMATENE	4,545	10,751	6,607	7,223	13,830
4	BONTOMANAI	4,211	10,423	7,030	7,169	14,199
5	BONTOSIKUYU	4,821	11,401	7,767	8,070	15,837
6	PASIMASUNGGU	2,560	6,226	4,376	4,546	8,922
7	PASIMARANNU	3,279	7,617	5,277	5,470	10,747
8	TAKA BONERATE	3,770	9,434	6,904	7,045	13,949
9	PASILAMBENA	2,221	5,467	4,053	4,151	8,204
10	PASIMASUNGGU TIMUR	2,355	5,763	3,933	4,083	8,016
11	BUKI	2,121	5,191	3,452	3,535	6,987
JUMLAH		40,869	99,624	68,332	71,138	139,470

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2019

Tabel 1.4
Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2019

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(JIWA)	%
1	TIDAK/BLM SEKOLAH	19,515	13.99	20,216	14.49	39,731	28.49
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	8,519	6.11	8,318	5.96	16,837	12.07
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	18,898	13.55	20,146	14.44	39,044	27.99
4	SLTP/SEDERAJAT	7,251	5.2	7,487	5.37	14,738	10.57
5	SLTA/SEDERAJAT	10,434	7.48	9,328	6.69	19,762	14.17
6	DIPLOMA I/II	358	0.26	791	0.57	1,149	0.82
7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	425	0.3	1067	0.77	1,492	1.07
8	DIPLOMA IV/STRATA I	2,773	1.99	3,690	2.65	6,463	4.63
9	STRATA-II	153	0.11	94	0.07	247	0.18
10	STRATA-III	6	0	1	0	7	0.01
JUMLAH TOTAL		68.332	6484832	8.99	71,138	131	139,470

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2019

Tabel 1.5
**DATA PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK USIA 0-18			JUMLAH PENDUDUK USIA 0-18 MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			%	JUMLAH PENDUDUK USIA 0-18 BELUM MEMILIKI AKTA KELAHIRAN			%
		L	P	L+P	L	P	L+P		L	P	L+P	
1	BENTENG	4,150	3,928	8,078	2,790	2,718	5,508	68.19	1,360	1,210	2,570	31.81
2	BONTOHARU	2,687	2,470	5,157	1,905	1,777	3,682	71.40	782	693	1,475	28.60
3	BONTOMATENE	1,867	1,797	3,664	1,199	1,138	2,337	63.78	668	659	1,327	36.22
4	BONTOMANAI	2,333	2,092	4,425	1,767	1,578	3,345	75.59	566	514	1,080	24.41
5	BONTOSIKUYU	2,632	2,538	5,170	2,024	2,008	4,032	77.99	608	530	1,138	22.01
6	PASIMASUNGGU	1,536	1,470	3,006	954	910	1,864	62.01	582	560	1,142	37.99
7	PASIMARANNU	1,724	1,726	3,450	1,016	1,005	2,021	58.58	708	721	1,429	41.42
8	TAKABONERATE	2,655	2,429	5,084	1,403	1,353	2,756	54.21	1,252	1,076	2,328	45.79
9	PASILAMBENA	1,539	1,541	3,080	916	980	1,896	61.56	623	561	1,184	38.44
10	PASIMASUNGGU TIMUR	1,352	1,230	2,582	774	739	1,513	58.60	578	491	1,069	41.40
11	BUKI	1,144	966	2,110	847	711	1,558	73.84	297	255	552	26.16
JUMLAH TOTAL		23,619	22,187	45,806	15,595	14,917	30,512	66.61	8,024	7,270	15,294	33.39

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar menurut Agama
Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	AGAMA DAN KEPERCAYAAN							JUMLAH	
		Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghuchu	Kepercayaan Terhadap Tuhan YME		
		n (Jiwa)	n (Jiwa)	n (Jiwa)	n (Jiwa)	n (Jiwa)	n (Jiwa)	n (Jiwa)	n (Jiwa)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BENTENG	23,412	512	27	1	23	2	0	23,977	17.19
2	BONTOHARU	14,786	15	0	0	1	0	0	14,802	10.61
3	BONTOMATENE	13,818	12	0	0	0	0	0	13,830	9.92
4	BONTOMANAI	14,193	0	0	6	0	0	0	14,199	10.18
5	BONTOSIKUYU	15,546	191	2	97	1	0	0	15,837	11.36
6	PASIMASUNGGU	8,919	0	3	0	0	0	0	8,922	6.4
7	PASIMARANNU	10,746	1	0	0	0	0	0	10,747	7.71
8	TAKA BONERATE	13,947	1	1	0	0	0	0	13,949	10
9	PASILAMBENA	8,176	26	2	0	0	0	0	8,204	5.88
10	PASIMASUNGGU TIMUR	8,016	0	0	0	0	0	0	8,016	5.75
11	BUKI	6,987	0	0	0	0	0	0	6,987	5.01
JUMLAH TOTAL		138.546	758	35	104	25	2	0	139.470	100.00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2019

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar menurut Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

A	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
		n(JIWA)	%	n(JIWA)	%	n(JIWA)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	19117	13.71	19162	13.74	38279	27.45
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	0	0	28984	20.78	28984	20.78
3	PELAJAR/MAHASISWA	14256	10.22	13283	9.52	27539	19.75
4	PENSIUNAN	734	0.53	445	0.32	1179	0.85
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	1966	1.41	2351	1.69	4317	3.1
6	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)	94	0.07	1	0	95	0.07
7	KEPOLISIAN RI (POLRI)	242	0.17	5	0	247	0.18

A	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(JIWA)	%
		n(JIWA)	%	n(JIWA)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
8	PERDAGANGAN	68	0.05	95	0.07	163	0.12
9	PETANI/PEKEBUN	10811	7.75	1713	1.23	12524	8.98
10	PETERNAK	42	0.03	17	0.01	59	0.04
11	NELAYAN/PERIKANAN	7719	5.53	49	0.04	7768	5.57
12	INDUSTRI	0	0	7	0.01	7	0.01
13	KONSTRUKSI	7	0.01	1	0	8	0.01
14	TRANSPORTASI	118	0.08	0	0	118	0.08
15	KARYAWAN SWASTA	334	0.24	142	0.1	476	0.34
16	KARYAWAN BUMN	97	0.07	52	0.04	149	0.11
17	KARYAWAN BUMD	35	0.03	12	0.01	47	0.03
18	KARYAWAN HONORER	985	0.71	1785	1.28	2770	1.99
19	BURUH HARIAN LEPAS	377	0.27	9	0.01	386	0.28
20	BURUH TANI/PERKEBUNAN	25	0.02	12	0.01	37	0.03
21	BURUH NELAYAN/PERIKANAN	15	0.01	1	0	16	0.01
22	PEMBANTU RUMAH TANGGA	3	0	21	0.02	24	0.02
23	TUKANG CUKUR	2	0	0	0	2	0
24	TUKANG LISTRIK	1	0	0	0	1	0
25	TUKANG BATU	266	0.19	2	0	268	0.19
26	TUKANG KAYU	350	0.25	0	0	350	0.25
27	TUKANG LAS/PANDAI BESI	19	0.01	0	0	19	0.01
28	TUKANG JAHIT	15	0.01	57	0.04	72	0.05
29	TUKANG GIGI	1	0	0	0	1	0
30	PENATA RIAS	3	0	4	0	7	0.01
31	MEKANIK	10	0.01	0	0	10	0.01
32	SENIMAN	1	0	1	0	2	0
33	TABIB	0	0	1	0	1	0
34	PARAJI	1	0	2	0	3	0
35	IMAM MASJID	7	0.01	0	0	7	0.01
36	PENDETA	6	0	0	0	6	0
37	WARTAWAN	7	0.01	1	0	8	0.01
38	USTADZ/MUBALIGH	3	0	0	0	3	0
39	BUPATI	1	0	0	0	1	0
40	WAKIL BUPATI	1	0	0	0	1	0
41	ANGGOTA DPRD PROP.	2	0	0	0	2	0
42	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA	18	0.01	4	0	22	0.02
43	DOSEN	10	0.01	7	0.01	17	0.01
44	GURU	252	0.18	677	0.49	929	0.67
45	PENGACARA	2	0	0	0	2	0
46	NOTARIS	1	0	0	0	1	0

A	JENIS PEKERJAAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(JIWA)	%
		n(JIWA)	%	n(JIWA)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
47	ARSITEK	2	0	0	0	2	0
48	AKUNTAN	1	0	0	0	1	0
49	KONSULTAN	5	0	0	0	5	0
50	DOKTER	7	0.01	11	0.01	18	0.01
51	BIDAN	0	0	97	0.07	97	0.07
52	PERAWAT	12	0.01	53	0.04	65	0.05
53	APOTEKER	0	0	3	0	3	0
54	PELAUT	566	0.41	6	0	572	0.41
55	PENELITI	1	0	0	0	1	0
56	SOPIR	186	0.13	0	0	186	0.13
57	PEDAGANG	65	0.05	177	0.13	242	0.17
58	PERANGKAT DESA	114	0.08	74	0.05	188	0.13
59	KEPALA DESA	14	0.01	0	0	14	0.01
60	WIRASWASTA	9307	6.67	1796	1.29	11103	7.96
61	PEKERJAAN LAINNYA	28	0.02	18	0.01	46	0.03
JUMLAH TOTAL		68332	48.99	71138	51.01	139470	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2019

Berdasarkan data diatas jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2019 adalah sebanyak **139.470** jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki **68.332** jiwa dan jumlah penduduk perempuan **71.138** jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga **40.869**.

1.3.3. Kondisi Makro Kabupaten Kepulauan Selayar

Gambaran kondisi Kabupaten Kepulauan Selayar secara umum dapat dilihat dari perubahan angka atau nilai-nilai dari indikator-indikator makro Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari kondisi sosial, ekonomi dan kualitas pembangunan manusia. Kondisi indikator makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 dapat dilihat dari uraian dalam tabel berikut:

Tabel 1.8
Indikator Makro di Kabupaten Kepulauan Selayar 2016-2021

NO.	INDIKATOR MAKRO	TARGET		
		2019	2020	2021
A.	INDIKATOR MAKRO SOSIAL			
1.	Angka Kemiskinan (%)	12,8	8,15	7,65
2.	Indeks Pembangunan Manusia	70,25	70,55	71
3.	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	12,47	12,54	12,62
4.	Angka Melek Huruf	98	98,5	100
5.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	72	73,5	75
6.	Tingkat Pengangguran (%)	0,53	0,60	0,5
B.	INDIKATOR MAKRO EKONOMI			
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,35	8,25	8,40
2.	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	40	41,5	42,5

Sumber: Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2019

1.4. Pertumbuhan Ekonomi

Di tengah perlambatan ekonomi nasional, Kabupaten Kepulauan Selayar tetap optimis dengan laju positif perekonomian daerah. Pada Tahun 2018, penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki pendapatan sebesar 43 Juta rupiah. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 8,77%. Angka ini diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya mencapai angka 5,17% pada Tahun 2018 dan juga diatas angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang hanya sebesar 7,29%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar ini mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana pada Tahun 2016 hanya sebesar 7,35% yang kemudian terus mengalami peningkatan di Tahun 2017 menjadi 7,61%. Berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2018 atas dasar harga berlaku mencapai 5,8 triliun rupiah dengan kontribusi dari Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 45,11%. Angka PDRB tersebut mengalami peningkatan dibanding Tahun 2017 yang hanya mencapai 5,2 triliun rupiah dengan kontribusi dari Kategori A

(Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 46,6%.

Selain itu, pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatan pendapatan daerah melalui berbagai upaya, baik yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD); Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada Tahun 2016, realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 875.836.941.100,00 sementara Tahun 2017 sebesar Rp. 904.027.071.600,00. Pada Tahun 2018 ditargetkan pendapatan akan mencapai 1.060.706.020.000,00 sementara untuk Tahun 2019 dan Tahun 2020 diproyeksikan berturut-turut sebesar Rp. 1.195.575.802.191,00 dan Rp. 1.255.354.592.300,55. Sedangkan PAD pada Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 43.167.309.586,00 dan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 91.886.920.000,00. Namun pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 71.274.920.000,00 dan selanjutnya untuk Tahun 2019 dan 2020 diproyeksikan meningkat masing-masing senilai Rp. 121.520.451.700,00 dan Rp. 127.596.474.285,00.

Selain itu berbagai kebijakan pemerintah daerah diarahkan untuk memperbaiki prospek pembangunan ekonomi dan keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini dapat dilihat melalui tinjauan terhadap perkembangan variable ekonomi makro yang dijadikan sasaran utama dari pembangunan ekonomi. Variabel tersebut berkenaan dengan aspek pendapatan dengan distribusinya, pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang berkeadilan, aspek ketenagakerjaan yang ditunjukkan dengan jumlah tingkat pengangguran penduduk, aspek harga yang ditunjukkan dengan fluktuasi dari harga umum yang mempengaruhi tingkat inflasi, aspek perdagangan terkait hubungan dengan negara lain yang ditunjukkan dengan kegiatan ekspor-impor. Kesemua hal tersebut dapat terealisasi jika didukung oleh peran aktif dari seluruh lembaga ekonomi baik dari swasta, pemerintah maupun dunia perbankan serta lembaga ekonomi masyarakat di daerah yang menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing secara efisien dan efektif didukung dengan pemerintahan yang menerapkan prinsip *good governance*.

1.5. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada 18 urusan wajib yang diampu oleh 27 SKPD/Unit Kerja dan 7 urusan pilihan yang diampu oleh 6 SKPD Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan harapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat lebih berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab.

Untuk melaksanakan urusan Daerah dimaksud telah dijabarkan menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar. Tujuannya adalah mewujudkan aspirasi masyarakat secara profesional, transparansi, partisipatif, dan akuntabel. Adapun tugas pokok dan fungsi SKPD Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah;

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dengan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.

4. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

c. Dinas Daerah;

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Kepala Kantor atau Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

f. Kelurahan

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kecamatan, dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat, dengan fungsi sebagai berikut:

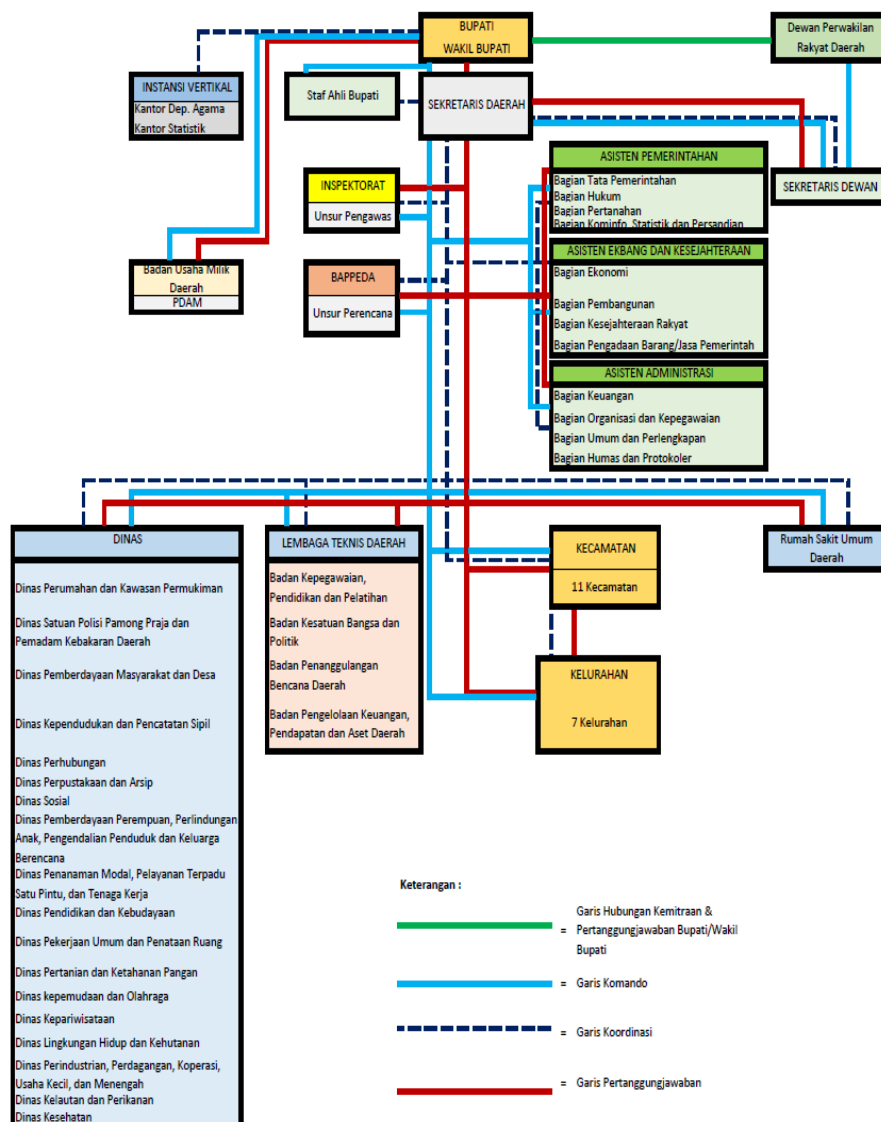
1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pelayanan masyarakat.
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

1.6. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari Sekretariat Daerah yang membawahi 3 Asisten dan 12 Bagian, Sekretariat DPRD, 17 Dinas Daerah, 5 Badan, 11 Kecamatan, 7 Kelurahan, dan 2 lembaga lain.

Bagan 1.1: Struktur Organisasi



1.7. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompetensi. Sampai dengan akhir Tahun 2019, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 3.785 orang. Adapun rincian pegawai secara umum sebagai berikut:

Tabel. 1.9
Penggolongan PNSD Tahun 2019

No.	Jenis Kelamin	Golongan Ruang				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	Pria	22	336	848	360	1566
2.	Wanita	5	387	1.408	419	2219
Jumlah		27	723	2.256	779	3785

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 2019

Kemudian ditinjau dari penggolongan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berdasarkan tingkat pendidikan, dikualifikasikan sebagai berikut :

Tabel. 1.10
Penggolongan PNSD dari Tingkat Pendidikan Tahun 2019

No.	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan									Jumlah
		SD	SMP	SMA	D.I	D.II	D.III	D.IV/ S.1	S.2	S.3	
1.	Pria	10	24	375	11	78	91	911	64	2	1566
2.	Wanita	3	6	370	19	188	324	1296	39	1	2219
Jumlah		13	30	745	30	266	415	2207	103	3	3785

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 2019

Selain Pegawai Negeri Sipil terdapat pula Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang tersebar diseluruh Organisasi Perangkat Daerah dengan jumlah 4.810 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1.11
Penggolongan Pegawai Tidak Tetap (PTT) T.A 2019

No.	Jenis Kelamin	Pegawai Tidak Tetap (PTT)				Jumlah
		Kesehatan	Guru	Guru Al-Qur'an	Teknis/strategis	
1.	Pria	144	175	52	1.439	1.810
2.	Wanita	825	753	61	1.361	3.000
Jumlah		969	928	113	2.800	4.810

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 2019

Berdasarkan data-data tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa Sumber Daya Aparatur masih rendah karena pendidikan formal masih didominasi DII dan SLTA ke bawah yang tersebar di sejumlah SKPD baik itu dinas, badan dan kantor serta di kecamatan-kecamatan dan kelurahan, dimana 6 kecamatan terdapat di daratan serta 5 kecamatan di kepulauan. Pengadaan, penyebaran, bimbingan kedisiplinan serta peningkatan kapasitas adalah merupakan tanggung jawab Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah. Keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah merupakan ukuran kinerja aparatur lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam menjalankan roda organisasi.

1.8. Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis daerah yang perlu menjadi pertimbangan dalam akselerasi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, adalah:

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan Birokrasi Pemerintahan.
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang masih rendah.
2. Masih perlunya penanggulangan kemiskinan.
Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu sebesar 13,13% pada Tahun 2018.
3. Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan.
Potensi UMKM di Kabupaten Kepulauan Selayar masih rendah dalam mengelola hasil produksi pertanian dan perikanan serta pariwisata yang menjadi sektor unggulan.
4. Masih perlunya peningkatan investasi untuk merealisasikan tiga (3) agenda strategis di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Realisasi program strategis “menjadikan Selayar sebagai KEK Pariwisata, menjadikan Selayar sebagai Pusat Perikanan Terpadu serta menjadikan Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik barang dan jasa” yang sampai saat ini belum ditetapkan.
5. Belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat terutama di wilayah dataran tinggi dan wilayah kepulauan.
 - Rasio ketersediaan air baku yang masih mencapai 55% dari target daerah yang ditetapkan sebesar 82% pada tahun 2017,
 - Rasio Ketersediaan air bersih rumah tangga yang belum mencapai target sebanyak 883 Sambungan rumah dengan realisasi hanya mencapai 553 Sambungan Rumah.
6. Masih perlunya peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat khususnya ke wilayah kepulauan.
 - Tingkat Kelancaran Barang dan Penumpang dari dan ke wilayah kepulauan yang masih berada pada angka 22% dan belum mencapai target padatahun 2017 yaitu sebesar 30%,
 - Pada Tahun 2017, jumlah sarana transportasi darat yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada angka 173 Unit dan belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 200 Unit,

- Pada tahun 2017, jumlah sarana transportasi udara yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada angka 475 flight dan belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 576 flight,
 - Pada tahun 2017, jumlah pelabuhan laut terealisasi sebanyak 7 buah dan tidak mencapai target RPJMD sebanyak 11 buah.
7. Masih terbatasnya pelayanan infrastruktur dasar terutama sektor perumahan dan kawasan pemukiman.
- Pada Tahun 2017, Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang diperbaiki sebesar 308 Unit dan sangat jauh mencapai target RPJMD yaitu sebesar 1.250 Unit,
 - Pada Tahun 2017, cakupan sanitasi layak hanya sebesar 25%. Angka ini sangat jauh dari target RPJMD yaitu sebesar 85,97%.
8. Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat.
- Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2016 sebesar 10 tahun masih jauh dari target dikdas yaitu 12 tahun,
 - Pada tahun 2017, angka melek huruf sebesar 88,54% dan belum mencapai target daerah yaitu sebesar 96%.
 - Angka usia harapan hidup pada tahun 2017 berada pada angka 69,81%, namun masih dibawah AHH Provinsi Sulsel yaitu 72,5%.
9. Masih belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan yang dapat dinikmati oleh masyarakat bagian timur Selayar serta belum optimalnya pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.
- Pada tahun 2017, persentase pembangunan jalan lingkaran timur utara sebesar 3,93% dan sangat jauh dari target RPJMD yaitu sebesar 18,87%,
 - Pada tahun 2017, persentase pembangunan jalan lingkaran timur selatan sebesar 16,91% dan sangat jauh dari target RPJMD yaitu sebesar 51,78%,
 - Infrastruktur jalan khususnya di wilayah Kepulauan masih belum memadai,
 - Pada tahun 2017, pembangunan bandara kayuadi tidak terealisasi.

10. Masih rendahnya kesetaraan gender terutama keterwakilan perempuan dalam pembangunan.
Pada tahun 2017, indeks Ketimpangan Gender sebesar 1,1 dan sangat jauh dari target daerah sebesar 20.
11. Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa.
Masih banyaknya Desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar terutama di wilayah Kepulauan.

1.9. Sistematika Penyusunan

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, gambaran umum Kabupaten Kepulauan Selayar, tugas pokok dan fungsi pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, susunan Organisasi Perangkat Daerah, jumlah Pegawai Negeri Sipil, isu-isu strategis dan sistematika Penyusunan LAKIP.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menjelaskan rencana strategis Tahun 2016 – 2021, strategi dan arah kebijakan, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Menjelaskan kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja, pengukuran capaian hasil kinerja pemerintah Tahun 2019, evaluasi dan analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 serta penjabaran akuntabilitas keuangan.

BAB IV. PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya-upaya penyelesaiannya dan langkah serta solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

2.1. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA adalah merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan Strategis ini juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik lokal, nasional maupun keseluruhan secara global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun sekali (perencanaan jangka menengah) dimana RPJMD ini menggambarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan daerah.

Gambar : 2.1:
Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Kepulauan
Selayar

RPJMD secara sistematis memuat pula tentang isu - isu lokal yang diwujudkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat di implementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan pemerintah daerah.

2.1.1. Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Kepulauan Selayar dewasa ini, serta peluang dan tantangan serta isu strategis yang akan dihadapi 5 tahun mendatang maka pasangan **H. MUH. BASLI ALI (Bupati) - Dr. H. ZAINUDDIN, SH., MH. (Wakil bupati)** membuat visi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut:

“ Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”

Dalam rumusan visi ini terdapat tiga pokok visi yakni: 1) Masyarakat maritim sejahtera; 2) Nilai keagamaan; dan 3) Nilai kultural. “Masyarakat Maritim yang Sejahtera” adalah perwujudan visi yang hendak dicapai, “Nilai Keagamaan” dan “Nilai Kultural” adalah landasan nilai yang dijadikan acuan dalam pencapaian perwujudan visi kesejahteraan.

“Masyarakat Maritim yang Sejahtera”, mengandung dua pengertian kondisi, yakni masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai masyarakat maritim, dan masyarakat Kepulauan Selayar sebagai masyarakat yang sejahtera. Dalam pokok visi ini tercakup berbagai fokus terkait kesejahteraan masyarakat dilihat dari

pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor serta kesejahteraan sosial, keterpenuhan berbagai infrastruktur wilayah, hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam yang unggul, serta produktivitas dan daya saing daerah.

“Berbasis Nilai Keagamaan”, mengandung pengertian bahwa masyarakat Selayar dalam lima tahun ke depan akan semakin mewujudkan kehidupan beragama yang berkualitas dan rukun serta menempatkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan motivasi serta basis nilai utama dalam kehidupan.

“Berbasis Nilai Kultural” mengandung pengertian bahwa dalam lima tahun ke depan kebudayaan daerah akan semakin berkembang dalam merespon dinamika kebudayaan nasional dan global. Dalam pokok visi ini tradisi dan kearifan lokal ditempatkan sebagai unsur yang akan terlestarikan secara dinamis.

Tabel 2.1
Keterkaitan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar
dengan visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar

Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar	Visi RPJPD Kabupaten Kepulauan Selayar	Analisis saling keterkaitan
Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural Sejahtera	Selayar sebagai Kabupaten Maritim, Terdepan, Mandiri, dan Berkelanjutan	Dalam pokok visi RPJMD ini tercakup berbagai fokus terkait kesejahteraan masyarakat dilihat dari; Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pada berbagai sektor serta kesejahteraan

		<p>sosial, Keterpenuhan berbagai infrastruktur wilayah, Hasil-hasil pengelolaan sumberdaya alam yang unggul, serta Produktivitas dan daya saing daerah. Hal tersebut, merupakan perwujudan dari visi RPJPD yang bermakna bahwa potensi kemaritiman akan dijadikan sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah yang menunjang peningkatan ekonomi provinsi dan nasional.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 2.2
Keterkaitan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar	Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan	Analisis saling keterkaitan
Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural	Sulawesi Selatan Sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan Pada Tahun 2018	RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar mencakup berbagai fokus terhadap; Peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial, Keterpenuhan berbagai infrastruktur wilayah, Hasil-hasil pengelolaan sumber daya alam yang unggul, serta Produktivitas dan daya saing

		<p>daerah. Fokus Visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut terkoneksi dengan penjelasan visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pada “akselerasi kesejahteraan” yakni kondisi Sulawesi Selatan di tahun 2018 yang sudah mencapai fase akhir tinggal landas, dan memasuki fase awal kematangan ekonomi. Pada saat itu; Indeks Pembangunan Manusia berada pada kategori menengah tinggi, Pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, Angka kemiskinan dan pengangguran berada di bawah rata-rata nasional.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel 2.3
Keterkaitan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan visi RPJMN RI

Visi Kabupaten Kepulauan Selayar	RPJMD	Visi RPJMN RI	Analisis saling keterkaitan
Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural		Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong	Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar mendukung visi RPJMN yang dituangkan dalam Nawacita yaitu; Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara

		<p>kesatuan, Meningkatkan kualitas hidup manusia, Meningkatkan produktifitas rakyat, dan daya saing pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya, Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, Melakukan revolusi karakter bangsa dan memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi Indonesia.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021 maka ditetapkan pula 7 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi Dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh, dan Berkelanjutan.

Misi ini mencakup Upaya-upaya dalam menciptakan situasi kondusif pada seluruh wilayah dan seluruh golongan masyarakat bagi kehidupan beragama; Membangun pusat kajian agama dan budaya; Mendorong pemenuhan sarana-prasarana dan fasilitas penyelenggaraan ibadah; Memperkuat peran agama sebagai

sumber motivasi, inspirasi dan nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan.

Misi ini mencakup upaya-upaya; Mewujudkan pemerintahan yang baik dalam bentuk menata struktur dan budaya organisasi serta sumber daya manusia sebagai faktor determinan bagi pemerintahan untuk bergerak secara sinergis dan produktif; Menerapkan *e-government* dalam peningkatan pelayanan publik; Meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta penerapan sistem *punishment and reward*; Meningkatkan kualitas pemerintahan desa dalam pemberdayaan masyarakat; Menjaga dan memelihara ketertiban serta ketenteraman dalam masyarakat; Melakukan upaya penegakan hukum secara terpadu; dan Membangun kesadaran politik; serta Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

3. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat.

Misi ini berfokus pada upaya-upaya; Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya kualitas manusia. Tercakup didalamnya upaya-upaya pemberdayaan dan fasilitasi serta peningkatan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap sumber-sumber ekonomi; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan; Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk keluarga berencana (KB) dan kesejahteraan keluarga; Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak; dan Membina kegiatan kepemudaan, membudayakan, serta dan meningkatkan prestasi keolahragaan.

4. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata.

Misi ini mencakup upaya-upaya; Pengembangan infrastruktur wilayah dan peningkatan aksesibilitas dari dan ke Selayar, serta meningkatkan prasarana dan sarana transportasi dan perhubungan yang terintegrasi wilayah daratan dan kepulauan; Mempercepat peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar yang meliputi jalan, listrik, air, dan energi; khusus pengembangan jalan pada wilayah daratan pulau Selayar, diarahkan agar terkoneksi dan searah dengan pengembangan sektor-sektor strategis lainnya; Berkembangnya sentra-sentra Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata serta Kawasan Industri Perikanan Terpadu, dan menjadikan Selayar sebagai pusat budidaya ikan karang; Memberikan akses dan kemudahan berinvestasi; serta Mendorong kerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Non Pemerintah dalam upaya mempercepat dan mengoptimalkan dukungan kebijakan untuk terealisasinya kebijakan dan program daerah yang telah ditetapkan.

5. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah.

Misi ini berfokus pada; Peningkatan posisi tawar dan letak strategis wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kemaritiman, dan

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Tercakup didalamnya upaya membangun sentra pengembangan komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan; Meningkatkan kesadaran dalam pencegahan, penanggulangan dan

pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

6. Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan.

Misi ini berfokus pada upaya-upaya;Peningkatan produktivitas dari bidang usaha ekonomi yang berkembang khususnya yang berbasis kerakyatan. Tercakup di dalamnya upaya pengembangan keterampilan dan kemampuan teknis profesi berbasis teknologi pada masyarakat; Dukungan permodalan dan manajemen bagi usaha kecil dan menengah dalam meningkatkan daya saing; serta Mencetak wirausahawan pada desa dan kelurahan.

7. Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan.

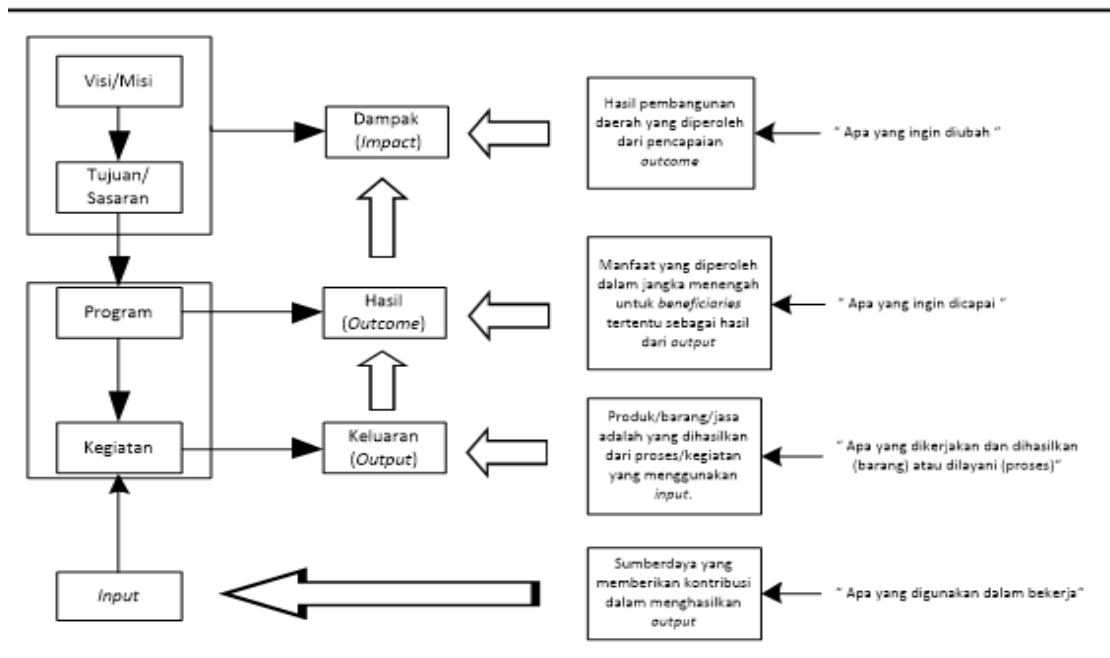
Misi ini berfokus pada strategi kebudayaan dalam melestarikan tradisi dan kearifan lokal daerah Kepulauan Selayar.Di dalamnya tercakup upaya pelestarian tradisi, pembinaan sejarah lokal dan penguatan lembaga adat; Pembinaan kesenian daerah; serta pengelolaan cagar budaya dan museum.

2.1.3. Tujuan dan Sasaran

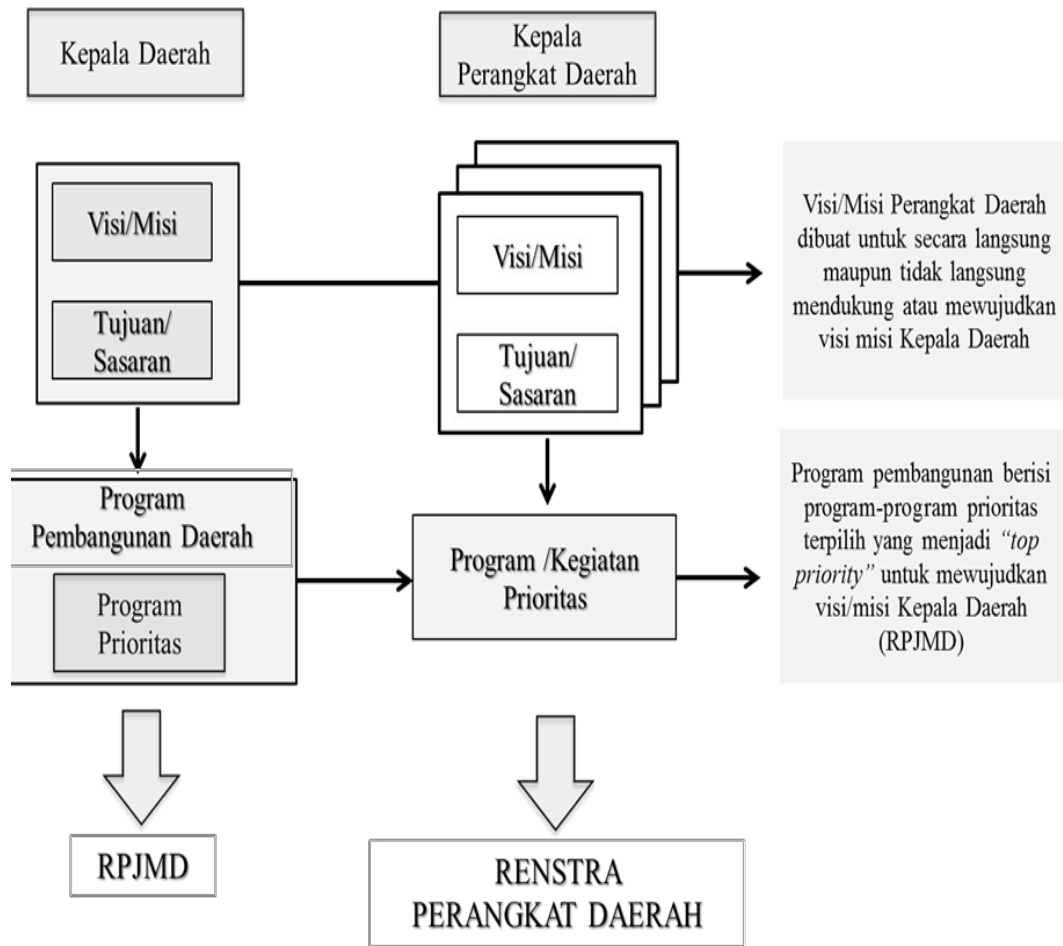
Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi

sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan yang secara totalitas menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah, dapat di gambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah



Terkait RPJMD, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini :



Gambar 2.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana dikemukakan di atas, serta dengan merujuk pada pernyataan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam lima tahun ke depan (2016 - 2021), maka tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.4

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021										
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
Visi : Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural										
Misi 1: Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi dan Basis Nilai Utama Dalam Pembangunan Secara Terencana, Menyeluruh, dan Berkelanjutan										
1.	Memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi dan inspirasi serta nilai utama dalam penyelenggaraan pembangunan (T-1)	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama (S-1)	Pelaksanaan ibadah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik
			Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	n.a	0	0	0	0	0	0
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan.										
2.	Memperkuat struktur dan budaya organisasi serta profesionalisme	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih	Opini atas laporan keuangan	Disclaimer	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
	Aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (T-2)	dan akuntabel (S-2)								
		Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	C	CC	B	BB	BB	BB	BB
			Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S-4)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	82,48%	85%	85%	90%	90%	95%	95%
3.	Memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kesadaran hukum (T-3)	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (S-5)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kabupaten	89,29	89,29	92,00	94,00	95,00	96,00	97,00
4.	Sinkronisasi dan integrasi kebijakan di	Meningkatnya pelayanan penyelenggara	Transmigran lokal (KK)	n.a	20	20	20	20	20	20

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
	bidang transmigrasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (T-4)	raan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah (S-6)								
5.	Meningkatkan kualitas pemerintahan desa (T-5)	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (S-7)	% Desa Mandiri	1 desa	3 desa (3,70)	1 desa (4,94)	5 desa (11,11)	1 desa (12,35)	3 Desa (16,05)	6 desa (24,69)
			% Desa Berkembang	72 desa	15 desa (18,52)	9 desa (29,63)	7 desa (38,27)	6 desa (45,68)	10 desa (58,01)	6 desa (65,43)
			% Desa Tertinggal	8 desa	3 desa (3,70)	1 desa (4,94)	4 desa (9,88)	0	0	0
Misi 3:										
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat										
6.	Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat (T-6)	Berkurangnya penduduk miskin (S-8)	% Angka kemiskinan	7,15	6,69	6,23	5,76	5,29	4,79	4,24
			Jumlah Penduduk Miskin (KK)	9.215	8.615	8.015	7.415	6.815	6.165	5.415
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Income per kapita penduduk	19	22,5	24	25,5	27	28,5	30

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
		(S-9)	(Juta)							
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S-10)	Angka Melek Huruf	93,98	95,15	96	97	98	98,5	100
			Angka Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11,98	12,00	12,32	12,40	12,47	12,54	12,62
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S-11)	Angka Usia Harapan Hidup	67,50	67,52	67,54	67,56	67,57	67,58	67,59
		Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan (S-12)	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	(KB)	(KB)	(KB)	(KB)	(KB)	(KB)	(KB)
				110,00	98,00	99,00	99,00	99,98	99,98	99,98
			(KS)	(KS)	(KS)	(KS)	(KS)	(KS)	(KS)	(KS)
			85,22	88,63	92,04	94,04	94,31	96,59	96,59	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	n.a	15	20	22,5	25	27,5	30
		Indeks pembangunan gender (IPG)	91,37	91,75	92,00	92,25	92,50	92,75	93,00	
		Indeks pemberdayaan gender (IDG)	59,67	59,75	59,90	60,15	60,40	60,75	61,00	

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
7.	Meningkatkan peran pemuda dan membudayakan olahraga (T-7)	Meningkatnya kemandirian pemuda (S-13)	% pemuda mandiri	n.a	0	100	100	100	100	500
		Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat (S-14)	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	13	15	15	15	15	15	15

Misi 4:

Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Peningkatan Investasi Swasta Di Sektor Perikanan, Kelautan dan pariwisata

8.	Meningkatkan kemampuan membuka isolasi daerah (T-8)	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar (S-15)	% Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat	18 %	23 %	29%	35%	41%	46%	52%
				124 Bh	160 Bh	200 Bh	240 Bh	280 Bh	320 Bh	360 Bh
			% Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut	6%	8%	10%	12 %	13 %	15 %	17 %
				30 Bh	40 Bh	50 Bh	60 Bh	70 Bh	80 Bh	90 Bh

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
			% Tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara	36 %	40 %	46 %	50 %	56 %	65 %	70 %
				455 Bh	502 Bh	576 Bh	624 Bh	704 Bh	816 Bh	881 Bh
9.	Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar (T-9)	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar (S-16)	Jalan Lingkar Timur Utara Terbangun (%)	18,87	18,87	45,91	72,96	94,95	100,00	100,00
			Jalan Lingkar Timur Tengah Terbangun (%)	78,45	78,45	78,45	78,45	85,55	92,30	100,00
			Jalan Lingkar Timur Selatan Terbangun (%)	35,71	35,71	51,78	65,60	82,18	91,55	100,00
			Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)	46,04	50,00	60,50	70,00	75,00	80,00	85,00
			Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	33 %	67 %	67 %	67 %	100 %	100 %	100 %
				1 Bh	2 Bh	2 Bh	2 Bh	3 Bh	3 Bh	3 Bh
			Berfungsinya Bandara Kayuadi	2,5	2,5	5	7	8	9	10
Study. Peny. Master	RTT sisi Darat	Pembebasan Lahan		Study KKOP dan	Pemb. Fisik sisi	Fungsional	Fungsional			

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
				Plan	dan Udara		amdal	darat dan Udara		
			Jumlah Pelabuhan Laut (%)	35 %	45 %	55 %	65 %	75 %	85 %	100 %
				7 Bh	9 Bh	11 Bh	13 Bh	15 Bh	17 Bh	20 Bh
			Perluasan terminal angkutan darat (%)	40 %	48 %	56 %	65 %	73 %	81 %	89 %
				50	60	70	80	90	100	110
			Jumlah Pelabuhan Penyeberangan (%)	33%	33%	67%	67%	83%	100%	100%
				2 Bh	2 Bh	4 Bh	4 Bh	5 Bh	6 Bh	6 Bh
			Rasio jaringan irigasi	41,35	63,22	65,00	70,00	75,00	80,00	90,00
			Rasio ketersediaan air baku	78,00	80,00	82,00	86,00	90,00	95,00	100,00
			Rasio Ketersediaan Air Bersih (%)							
			- Rumah Tangga (%)	60,47	85,00	89,72	95,05	96,77	98,80	100
			- Industri (%)	95,05	98,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
			Rumah layak Huni (%)	80,81	80,81	84.00	87.19	90,38	93,57	100
				n.a.	1250unit	1250unit	1250unit	1250unit	1250unit	7.500unit
			Cakupan Sanitasi Layak (%)	71,38	77,74	85,97	94,50	100,00	100,00	100,00
			Kawasan Pemukiman Kumuh tertangani (%)	n.a	n.a	20	40	60	80	100
				n.a	0 Ha	220 Ha	220 Ha	220 Ha	220 Ha	220 Ha
			Rasio Elektrifikasi (%)							
			- Rumah Tangga (%)	46,15	47,85	49,85	52,35	55,45	59,15	65
			- Industri (%)	8,85	15,25	23,75	30,5	37,25	43,65	50
			PLTMG Terbangun dan Beroperasi	-	Proses	Terbangun	Beroperasi	Beroperasi	Beroperasi	Beroperasi
			Terminal Gas Terbangun dan Beroperasi	-	Proses	Proses	Terbangun	Beroperasi	Beroperasi	Beroperasi
10	Merevitalisasi kawasan dan obyek wisata (T-10)	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan (S-17)	Jumlah kunjungan wisatawan (Domestik/Asin)	Domestik 5,946	(10%) 6.541 379	(20%) 7.849 588	(30%) 10,20 3	(40%) 14,28 5	(50%) 21,427 2.877	(60%) 34,283 5.322

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
			g)	Asing 253	(50%)	(55%)	940 (60%)	1.598 (70%)	(80%)	(85%)
11	Meningkatkan keterintegrasian wilayah daratan dan pulau-pulau (T-11)	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan (S-18)	Tingkat kelancaran Barang dan Penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	22 %	25 %	30 %	35 %	40 %	45 %	50 %
				55.135	63.000	76.000	89.000	103.000	115.000	127.000
12	Meningkatkan daya saing dan investasi daerah (T-12)	Meningkatnya investasi (S-19)	Nilai PMDN (dalam Milyar Rupiah)	35.147.336.660	38.662.070.000	42.528.277.500	46.781.105.000	51.459.215.500	56.605.136.000	62.265.649.500
			Nilai PMA (\$)	1.417.562	1.450.000	2.000.000	3.000.000	5.250.000	10.500.000	21.000.000
Misi 5										
Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah										
13	Meningkatkan posisi tawar dan letak	Terbangun dan berkembang	Realisasi Pembangunan KEK Pariwisata	n.a.	Fasilitas pembe	ditetapkan	ditetapkan	ditetapkan	ditetapkan	ditetapkan

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
	strategis Wilayah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Sumberdaya Kemaritiman (T-13)	nya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata (S-20)			ntukan badan usaha penyelenggara KEK					
		Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang (S-21)	Realisasi Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (%)	n.a	40	45	50	55	60	65
		Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa) (S-22)	Realisasi Pembangunan Kawasan Distribusi Logistik (%)	n.a	n.a	5	10	15	20	25
		Bertambahnya produksi	Peningkatan Produksi	Padi 29,617	32.579	35.837 (10 %)	39.421	43.363	47.699 (10 %)	52.469 (10 %)

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
		beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan (S-23)	Pertanian Tanaman Pangan (Ton)		(10 %)		(10 %)	(10 %)		
				Jagung 9,035	10.390 (15 %)	11.949 (15 %)	13.741 (15 %)	15.802 (15 %)	18.172 (15 %)	20.898 (15 %)
			Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Holtikultura (Ton)	J.Keprak 5,850.40	5,870.27 (0,30 %)	5,890,14 (0,30%)	5,910.01 (0,30 %)	5,929.88 (0,30 %)	5,949.75 (0,30 %)	5.969,62(0,30 %)
			% Peningkatan Produksi Perkebunan (Ton)	Kelapa 25,190.37	25,568.221,5%	25,951.741,5%	26,341.011,5%	26,736.121,5%	27,137.161,5%	27,544.211,5%
				Pala 292,88	305,83 0,04%	336,35 0,09%	341,60 0,02%	375,38 0,08%	410,40 0,08%	422,40 0,02%
				Cengkeh 125,39	236,70 0,47%	283,15 0.01%	290,15 0.02%	341,60 0,15%	395,55 0,14%	409,05 0,03%
				Jambu Mete 1,400.00	1,576,80 1,12%	1,754.500,10%	1,757.000,001%	1,938.20 0,09%	2,120.40 0,09%	2.129.40 0,004%

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
			Tingkat Produktivitas Pertanian Tanaman Pangan (kw/ha)	Padi 58,87	66,99	71,25	67,64	70,55	73,88	77,33
				Jagung 29,78	34,17	39,20	44,98	51,61	59,21	67,85
			Tingkat Produktivitas Pertanian Tanaman Holtikultura (kw/ha)	J.Keпок 100,96	102,01	103,05	103,90	104,50	105,50	106,75
			Tingkat Produktivitas Perkebunan (Kg/ha)	Kelapa 1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502	1,502
				Pala 316	325	350	350	375	400	400
				Cengkeh 162	300	350	350	400	450	450
				Jambu Mete 400	450	500	500	550	600	600
			Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi Pusat	30	30	50	60	70	80	100

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
			Pemurnian Sapi Bali (%)							
			Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi Pusat Pembiakan Sapi Unggul (%)	n.a	0	20	50	70	80	100
			% Peningkatan Produksi Ternak	Sapi ptg 16,756	17,621 5,16%	18,542 10,66%	19,946 19,04%	21.693 29,46%	23.715 41,53%	26.257 56,70%
				Sapi prh 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
				Kerbau 4,588	4,633 1,64%	4,740 1,65%	4,818 1,65%	4,898 1,66%	4,980 1,66%	5,062 1,66%
				Kuda 3,766	3,856 2,39%	3,948 2,39%	4,043 2,39%	4,140 2,39%	4,239 2,39%	4,340 2,39%
				Kambing 80,831	81,511 0,84%	83.827 3,71%	86.628 7,17%	90.476 11,93%	95.400 18,024%	100.973 24,92%
				Domba 36	45 25%	56 24,44%	71 26,97	89 25,35	112 25,84	141 25,89%

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
							%	%	%	
				Ay.Brs 272,372	273,5 21 0,42%	274,675 0,42%	275,8 33 0,42%	276,9 97 0,42%	278,16 6 0,42%	279,339 0,42%
				Ay. Ras pdg 8,732	9,234 5,75%	9,766 5,75%	10,32 8 5,75%	10,99 2 5,75%	11,550 5,75%	12,215 5,75%
				Ay.Ras Ptlr 11,613	12,26 9 5,65%	12,962 5,65%	13,43 5 5,65%	13,79 1 5,65%	14,295 5,65%	14,816 5,65%
				Itik 5,691	6,099 7,16%	6,536 7,16%	7,004 7,16%	7,506 7,16%	8,044 7,16%	8,620 7,16%
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan (ha)	375,45 Ha	394,2 2 Ha (5%)	413,93 Ha (10,25%)	434,6 2 Ha (15,76 %)	456,3 5 Ha (21,55 %)	479,16 Ha (27,62 %)	503,11 Ha (34,00%)
			Produksi Hasil Hutan (m3)	437,58 m3	525,0 9 M3 (20,00 %)	630,10 M3 (44,00%)	756,1 2 M3 (72,80 %)	907,3 4 M3 (107,3 5%)	1.088,8 0 M3 (148,82 %)	1.306,56 m3(198,59 %)
			Kerusakan Hutan dan Lahan (ha)	42.775, 76 Ha	42.38 1,54	41.967, 6	41.53 2,99	42.07 6,64	40.597, 48	40.094,37 Ha (- 6,27%)

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
					Ha (- 0,92%)	Ha (-1,98%)	Ha (- 2,91%)	Ha (- 3,97%)	(- 5,09%)	
			Peningkatan Produksi Perikanan dan kelautan :							
			- Perikanan Tangkap (ton dan %)	24.155,80	26.598,77 10,11%	28.992,66 20,02%	31.312,07 29,63%	33.503,92 36,69%	35.179,12 45,63%	36.938,08 53%
			- Perikanan Budidaya (ton dan %)	804,93	829,08 3,0%	853,95 6,09%	879,57 9%	905,96 13%	933,14 16%	961,13 19%
			- Produksi Olahan Hasil Perikanan (ton dan %)	117	120 2,57%	123 5,13%	126 7,69%	130 11,11%	132 12,82%	135 15,39%
			- Konsumsi Ikan (kg/org/ Tahun)	49,45	50,5 2,12%	51 3,14%	51,5 4,15%	52 5,16%	52,5 6,17%	53 7,18%
14	Memelihara fungsi	Terpeliharanya	Indeks Lingkungan	78,08	78,1	78,3	78,7	78,9	79	79,05

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
	lingkungan hidup (T-14)	kelestarian sumberdaya alam (S-24)	Hidup							

Misi 6:

Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan

15	Meningkatkan keberdayaan tenaga kerja (T-15)	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja (S-25)	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	1,84	6,40	10,48	16,30	27,95	40,76	1.750
			Tenaga Kerja yang ditempatkan (orang)	79	275	540	700	1.200	1.750	2.250
16	Meningkatkan keberdayaan usaha ekonomi kerakyatan (T-16)	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan (S-26)	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	15.016	16.087	17.210	18.242	19.270	20.304	21.516

Misi 7

Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan

17	Memantapkan jati diri keselayaran (T-17)	Meningkatnya kecintaan dan	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	1.300	1.357	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
----	------------------------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sasaran
RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016 - 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2015)	Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir (2021)
					2016	2017	2018	2019	2020	
.	17)	kebanggaan sebagai orang Selayar (S-27)	dan dikembangkan							
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan	30	40	50	60	70	80	90

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel, dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Arah kebijakan sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun ke depan. Berikut arah kebijakan pembangunan tahun 2016-2021:

1. Internalisasi nilai-nilai keagamaan dalam setiap aktivitas kehidupan
2. Penciptaan kondisi yang kondusif dan toleran bagi pelaksanaan kehidupan beragama
3. Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam pembiayaan pembangunan daerah

4. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah serta pencegahan terjadinya potensi kebocoran anggaran
5. Peningkatan kualitas pembiayaan pembangunan daerah
6. Peningkatan kualitas manajemen aset daerah
7. Penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah
8. Peningkatan kinerja penyelenggaraan program pembangunan daerah
9. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis *merit system*
10. Perbaikan dan penerapan Sistem dan Prosedur pelayanan publik
11. Peningkatan kewaspadaan dan daya antisipatif terhadap kemungkinan munculnya tindakan yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
12. Pembangunan dan pengembangan kawasan untuk penempatan transmigran lokal
13. Penerapan mekanisme kerja yang berorientasi pada pengembangan profesionalisme, pengembangan standar kompetensi aparatur dan peningkatan kesejahteraan aparatur pemerintah desa
14. Pembinaan dan peningkatan keberdayaan penduduk miskin
15. Perbaikan income perkapita
16. Pengendalian harga
17. Perluasan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan per kapita
18. Peningkatan pembinaan keaksaraan
19. Peningkatan , pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan terjangkau di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan
20. Internalisasi nilai-nilai moral terhadap peserta didik

21. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit menular dan tidak menular,serta kasus kekurangan gizi, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan manajemen kesehatan
22. Peningkatan kualitas keluarga
23. Pemberdayaan dan pemberian kesempatan bagi kaum perempuan dalam setiap aspek kehidupan
24. Peningkatan keahlian dan keterampilan pemuda
25. Pembudayaan dan peningkatan prestasi keolahragaan
26. Pengoptimalan dukungan dari pemerintah tingkat atas dalam penyelenggaraan jasa perhubungan dan transportasi
27. Penyediaan infrastruktur perhubungan baik darat, laut dan udara
28. Pembangunan dan peningkatan bendungan dan jaringan irigasi
29. Pembangunan dan peningkatan perumahan dan kawasan permukiman
30. Penyediaan energy listrik bagi rumah tangga dan industri
31. Pengoptimalan dukungan terhadap pengembangan kepariwisataan daerah
32. Peningkatan promosi dan pengembangan obyek wisata
33. Peningkatan sadar wisata bagi masyarakat
34. Peningkatan kapasitas kelembagaan kepariwisataan
35. Penyediaan infrastruktur kepelabuhanan
36. Penyediaan jasa angkutan laut dari dan ke wilayah kepulauan
37. Peningkatan promosi, pemberian kemudahan berinvestasi dan jaminan kepastian hukum bagi investor
38. Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan kepariwisataan pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian selatan Pulau Selayar)

39. Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama dan pendukung kegiatan industry perikanan terpadu
40. Pembangunan infrastruktur utama dan pendukung Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara
41. Pengembangan industri kapal rakyat
42. Peningkatan dukungan kerjasama berbagai pihak terkait penyediaan infrastruktur utama pendukung kegiatan distribusi logistik pada kawasan yang telah ditetapkan (bagian utara Pulau Selayar)
43. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani
44. Penetapan Pulau Tanamalala sebagai pusat pemurnian sapi bali
45. Penetapan Pulau Kalao sebagai pusat pembiakan sapi unggul
46. Lokalisasi pengembangan usaha peternakan pada setiap kecamatan dan pembinaan pola usaha ternak rakyat
47. Pemanfaatan lahan kritis sebagai kawasan konservasi hutan rakyat
48. Penguatan kelembagaan nelayan
49. Pelaksanaan pembangunan kawasan dan atau wilayah berdasarkan rekomendasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
50. Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi terhadap layanan ketenagakerjaan
51. Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi terhadap layanan ketenagakerjaan
52. Perluasan lapangan kerja
53. Pengoptimalan dukungan dan fasilitasi pengembangan ekonomi kerakyatan
54. Pengintegrasian tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam setiap aktivitas masyarakat dan kegiatan kesiswaan.

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, diperlukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 70 b/X/Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
“Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar”

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN PERMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KET
						SKPD UTAMA	SKPD PENDUKUNG		
I.	Misi I Mewujudkan nilai keagamaan sebagai sumber inspirasi dan basis nilai utama dalam pembangunan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan								
1.	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama (S-1)	Pengamalan ibadah		<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat 3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam 	Indikator ini diukur berdasarkan beberapa parameter, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayar Zakat, Infaq, dan Sedeqah (ZIS) meningkat; 2. Jumlah Zakat, Infaq, dan Sedeqah (ZIS) meningkat; 3. Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama turun atau tidak ada; 4. Terdapat Kerjasama antar Umat Beragama; 5. Pelanggaran 	SETDA	Bappelitbanga Badan Kesbang & Pol Dinas PK Satpol PP & Damkar		<ul style="list-style-type: none"> • KURANG BAIK = jika hanya 2 terpenuhi • BAIK = jika 4 terpenuhi • SANGAT BAIK = Terpenuhi Semua

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN PERMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KET
						SKPD UTAMA	SKPD PENDUKUNG		
				Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat	agama dana tau K3 menurun				
II.	Misi II Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan								
2.	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel (S-2)	Opini Atas LK Daerah		Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 293 dan 330)	Hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	DPPK AD	Seluruh SKPD	Program Peningkatan Kualitas Manajemen Keuangan dan Aset Daerah	
3.	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien (S-3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah		1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan	Nilai SAKIP yang diterima dari Kementerian PAN dan RB RI	Bappelitbang da	Seluruh SKPD	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	
		Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)			Nilai Hasil EKPPD yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri RI	Bappelitbang da	Seluruh SKPD		

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN PERMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KET
						SKPD UTAMA	SKPD PENDUKUNG		
				Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah					
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S-4)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	skor	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat	SKPD Penyelenggara Kepuasan Publik	Seluruh SKPD	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
5.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (S-7)	% Desa Mandiri	%	<i>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</i>	Sesuai dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan <i>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</i>	Bapemdes Kel	Seluruh SKPD	Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa	
		% Desa	%	<i>Undang-Undang</i>					

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN PERMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KET
						SKPD UTAMA	SKPD PENDUKUNG		
		Berkembang		<i>Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</i>					
		% Desa Tertinggal	%	<i>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa</i>					
III.	Misi III Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat								
6.	Berkurangnya penduduk miskin (S-8)	Angka Kemiskinan	%	Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin dibagi total penduduk dikali 100	Dinas Sosial	Seluruh SKPD	Program Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	
		Income per Kapita Penduduk (juta)	Rupiah		Sesuai Data Statistik yang dikeluarkan oleh BPS	Bappelitbang da	Seluruh SKPD	Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyediaan Lapangan Kerja	
7.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat (S-10)	Angka Melek Huruf	%	Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara	Jumlah Penduduk yang melek huruf dibagi total penduduk dikali 100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SETDA ▪ Bappelitbang da ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ▪ Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 	Program Peningkatan Keaksaraan	
		Angka Rata-rata Lama	Tahun	1. <i>Peraturan Pemerintah No. 17</i>	Jumlah tahun belajar penduduk	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SETDA ▪ Bappelitbang 	Program Peningkatan	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN PERMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KET
						SKPD UTAMA	SKPD PENDUKUNG		
		Sekolah (Tahun)		<p><i>Tahun 2010 Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan</i></p> <p>2. <i>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</i></p>	usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki (data diperoleh sesuai hasil perhitungan statistic yang dilaksanakan oleh BPS)	dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 	Kualitas Layanan Pendidikan	
8.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (S-11)	Angka Usia Harapan	Tahun	SPM Bidang Kesehatan	Harapan Hidup merupakan jumlah rata-rata usia yang	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • SETDA • Bappelitbang da 	Program Peningkatan Kapasitas	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN PERMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KET
						SKPD UTAMA	SKPD PENDUKUNG		
		Hidup			diperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang. (data diperoleh sesuai hasil perhitungan statistic yang dilaksanakan oleh BPS)		<ul style="list-style-type: none"> • RSUD • DLHK • Dinas Pertanian dan KP • Dinas KP • Dinas Sosial • Dinas Perindagkum • DP3AP2KB 	Pelayanan Kesehatan	
IV	Misi IV Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah								
9.	Terbangun dan berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata (S-20)	Realisasi Pembangunan KEK Pariwisata	%	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi dan keunggulan posisi strategis daerah • Selayar ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus bidang Pariwisata dan realisasi kemajuan pembangunan infrastuktur dalam kawasan KEK Pariwisata 	ΣInfrastruktur dan Suprastruktur yang telah terbangun dan fungsional pada Kawasan KEK Pariwisata dibagi total Infrastruktur dan Suprastruktur yang harus dibangun sesuai Masterplan pembangunan KEK Pariwisata dikali 100	Dinas Kepariwisata an	SETDA BAppelitbangda Dinas PMPTSPTK Dinas PUPR Dishub DLHK Dinas PKP	Program Peningkatan Dukungan Terhadap KEK Pariwisata	
10.	Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi	Realisasi pembangunan kawasan	%	Potensi dan keunggulan posisi strategis daerah	ΣInfrastruktur dan Suprastruktur yang telah terbangun	Dinas Perindagkum	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SETDA ▪ Bappelitbang da 	Program Peningkatan Koordinasi dan	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN PERMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KET
						SKPD UTAMA	SKPD PENDUKUNG		
	logistik (barang dan jasa) (S-22)	distribusi logistik (%)			dan fungsional pada Kawasan Distribusi Logistik dibagi total Infrastruktur dan Suprastruktur yang harus dibangun sesuai Masterplan pembangunan Kawasan Distribusi Logistik dikali 100		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ▪ Dinas PUTR ▪ Dinas Perhubungan ▪ DPMPSTPTK ▪ Dinas LHK 	Pembangunan Infrastruktur Daerah	
V.	Misi V Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan								
11.	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah		<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Kajian Atas Kebijakan Penguatan Daya Saing Daerah dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Keuangan RI 	daya saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor input (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan output (inti dari kinerja perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat) yang ada di daerah Indeks Daya Saing Daerah dihitung berdasarkan Standar Indeks Daya saing Daerah	Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD	Program Penguatan Daya Saing Daerah	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN PERMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA		PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	KET
						SKPD UTAMA	SKPD PENDUKUNG		
					dengan menggunakan 4 aspek. Yakni aspek lingkungan penguat/enabling environmental, aspek SDM, aspek pasar dan aspek ekosistem inovasi, 12 pilar, 23 dimensi dan 90 indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi RI.				
VI	Misi VI Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal melalui Strategi Kebudayaan								
12.	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar (S-27)	Indeks Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 	Menggunakan hasil perhitungan statistic dari BPS	Sekretariat Daerah	Seluruh SKPD	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	

2.4. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen dan perjanjian kinerja bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka Intensifikasi pencegahan korupsi; Peningkatan kualitas pelayanan publik; Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi.

Untuk itu, penyusunan Perencanaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor :

152/NK/XI/TAPEM/2018
172/450/DPRD/XI/2018

tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2019. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi

misi dan akan menjadi komitmen bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mencapainya dalam Tahun 2019. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.5. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuandan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sangksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural”

	Misi	No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi dan Basis Nilai Utama dalam Pembangunan secara Terencana, Menyeluruh, dan Berkelanjutan	1	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama	Pelaksanaan ibadah	Baik
				Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	0
II	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan	2	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan	WTP
		3	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	BB
				Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Sangat Tinggi
		4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%
		5	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keamanan) di kabupaten	95,00

	Misi	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		6	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah	Transmigran lokal (KK)	20
		7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa mandiri	1 desa (12,35)
				Persentase desa berkembang	6 desa (45,68)
				Persentase desa tertinggal	0
III	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat	8	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase angka kemiskinan	5,29
				Jumlah penduduk miskin (KK)	6.815
		9	Meningkatnya daya beli masyarakat	Income per kapita penduduk (Juta)	27
		10	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka melek huruf	98
Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	12,47				
		11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	67,57
		12	Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	(KB) 99,98 (KS) 94,31
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	25
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,50
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,40
		13	Meningkatnya kemandirian pemuda	Persentase pemuda mandiri	100 %
14	Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	15		
IV	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan	15	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas	41% 280 Bh

	Misi	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
	Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata		Selayar	melalui moda transportasi darat		
				Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut	13 % 70 Bh	
				Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara	56 % 704 Bh	
			16	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar	Jalan lingkaran timur utara terbangun (%)	94,95
					Jalan lingkaran timur tengah terbangun (%)	85,55
					Jalan lingkaran timur selatan terbangun (%)	82,18
					Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)	75,00
					Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	100 % 3 Bh
					Berfungsinya Bandara Kayuadi	8 Pemb. Fisik sisi darat dan Udara
					Jumlah Pelabuhan Laut (%)	75 % 15 Bh
					Perluasan terminal angkutan darat (%)	73 % 90
			Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)		83% 5 Bh	
			Rasio jaringan irigasi		75,00	
				Rasio ketersediaan air baku	90,00	
				Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	96,77	
				Rasio ketersediaan air bersih industri (%)	100,00	
				Rumah layak huni (%)	90,38 1.250 Unit	
				Cakupan sanitasi	100	

	Misi	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
				layak (%)	
				Kawasan pemukiman kumuh tertangani (%)	60 220 Ha
				Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	55,45
				Rasio elektrifikasi industri (%)	37,25
				PLTMG terbangun dan beroperasi	Beroperasi
				Terminal gas terbangun dan beroperasi	Beroperasi
		17	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	(40%) 14,285
				Jumlah kunjungan wisatawan asing	1.598 (70%)
		18	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	40 % 103.000
		19	Meningkatnya investasi	Nilai PMDN	51.459.215.50 0
				Nilai PMA (\$)	5.250.000
V	Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah	20	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Realisasi pembangunan KEK pariwisata	Ditetapkan
		21	Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang	Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	55
		22	Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa)	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	15
		23	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan,	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (ton)	Padi : (10%) 43.363
				Persentase peningkatan	Jagung : (15%) 15.802
					Jeruk keprok : (0,30%)

	Misi	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			kehutanan, perikanan, dan kelautan	produksi pertanian tanaman holtikultura (ton)	5.929,88	
				Persentase peningkatan produksi perkebunan (ton)	Kelapa : 1,5 % 26.736,12	
					Pala : (0,08 %) 375,38	
					Cengkeh : (0,15%) 341,60	
					Jambu mete : 0,09 % 1.938.20	
				Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan (kw/ha)	Padi : 70,55	
					Jagung : 51,61	
				Tingkat produktivitas pertanian tanaman holtikultura (kw/ha)	Jeruk Keprok : 104,50	
				Tingkat produktivitas perkebunan (kg/ha)	Kelapa : 1,502	
					Pala : 375	
					Cengkeh : 400	
					Jambu Mete : 550	
				Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali (%)	70	
				Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi unggul (%)	70	
				Persentase peningkatan produksi ternak	Sapi potong : 21.693 (29,46%)	
			Sapi perah : 0%			
			Kerbau : 4,898 (1,66%)			
			Kuda : 4,140 (2,39%)			
			Kambing : 90.476			

	Misi	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
					(11,93%)
					Domba : 89 (25,35%)
					Ayam Buras : 276,997 (0,42%)
					Ayam Pedaging : 10,992 (5,75%)
					Ayam ras petelur : 13,791 (5,65%)
					Itik : 7,506 (7,16%)
				Rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	456,35 Ha (21,55%)
				Produksi hasil hutan (m ³)	907,34 M3 (107,35%)
				Kerusakan hutan dan lahan (ha)	42.076,64 Ha (-3,97%)
				Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (ton dan %)	(36,69 %) 33.503.92 ton
				Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (ton dan %)	(13 %) 905,96
				Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	(11,11 %) 130
				Persentase peningkatan konsumsi ikan (kg/ orang/tahun)	(5,16%) 52
		24	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam	Indeks Lingkungan Hidup	78,9
VI	Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di	25	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	27,95 %
				Tenaga kerja yang ditempatkan	1.200

	Misi	No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan			(orang)	
		26	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	19.270
VII	Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan	27	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	1.600
				Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	70

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 2.177.599.615.518,- (Dua trilyun seratus tujuh puluh tujuh milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu lima ratus delapan belas rupiah) dengan total realisasi per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 1.943.163.669.959,82,- (Satu trilyun sembilan ratus empat puluh tiga milyar seratus enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah delapan puluh dua sen). Dari perbandingan antara jumlah APBD dengan total realisasi belanja APBD Tahun 2019 maka nampak bahwa pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 234.435.945.558,18,- (Dua ratus tiga puluh empat milyar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah, delapan belas sen).

3.1. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2019 telah dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan serta masih mendasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar agar terwujud Masyarakat Maritim yang Sejahtera Berbasis Nilai Keagamaan dan Kultural. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut digunakan skala nilai

peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	≥ 91	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasi kemampuan instansi pemerintah untuk:

1. Merencanakan kinerja dan target kinerja;
2. Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang direncanakan;
3. Menyesuaikan apa yang dilaksanakan dengan yang dianggarkan;
4. Serta telah melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah dapat melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJM) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD terdapat 7 (tujuh) misi, 17 (tujuh belas) tujuan, 27 (dua puluh tujuh) sasaran dan 76 (tujuh puluh enam) indikator kinerja sasaran. Sesuai dengan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor: 70.b/III/Bappelbangda, maka capaian sasaran dalam

rangka mencapai misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2:
Pencapaian Indikator Sasaran

NO.	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN	JUMLAH INDIKTOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1.	Misi 1	1	1	2	Sangat Tinggi = 2
2.	Misi 2	4	6	9	Tinggi = 1 Sangat Tinggi = 8
3.	Misi 3	2	7	12	Sangat Tinggi = 8 Tinggi = 2 Sangat Rendah = 2
4.	Misi 4	5	5	28	Sangat Tinggi = 6 Tinggi = 4 Sedang = 2 Rendah = 4 Sangat Rendah = 8 * 4 indikator
5.	Misi 5	2	5	20	Sangat Tinggi = 8 Tinggi = 4 Sedang = 1 Sangat Rendah = 3 Rendah = 1 * 3 indikator
6.	Misi 6	2	2	3	Sangat Tinggi = 1 Sangat Rendah = 2
7.	Misi 7	1	1	2	Sangat Tinggi = 1 Tinggi = 1

* Kewenangannya dialihkan ke provinsi

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3

Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama	1	Pelaksanaan ibadah	Baik	Baik	100%
		2	Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	0	0	100%
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	1	Opini atas laporan keuangan	WTP	proses	-
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	1	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	(70) BB	(58,85) CC	84,07%
		2	Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Sangat Tinggi (3.0000)	Sangat Tinggi (3.0094)	100,3%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	89,25	99,17%
5	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keamanan) di kabupaten	95,00	100%	105,26%
6	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah	1	Transmigran lokal (KK)	20	0	0%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	1	Persentase desa mandiri	1 desa (12,35)	1 desa (12,35)	100%
		2	Persentase desa berkembang	6 desa (45,68)	6 desa (45,68)	100%
		3	Persentase desa tertinggal	0	0	100%
8	Berkurangnya penduduk miskin	1	Persentase angka kemiskinan	5,29	11,47	46,12%
		2	Jumlah penduduk miskin (KK)	6.815	15.942	42,74%
9	Meningkatnya daya beli masyarakat	1	Income per kapita penduduk (Juta)	27	27,17	100,63%
10	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	1	Angka melek huruf	98	98,15	100,15%
		2	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	12,47	12,40	99,43%
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup	67,57	68,34	101,14%
12	Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan	1	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	(KB) 99,98 (KS) 94,31	(KB) 71,17 (KS) 75,65	(KB) 71,18% (KS) 80,21%
			2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	25	0,26
		3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,50	0,26	78,56%
		4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,40	72,67	110,93%
13	Meningkatnya kemandirian pemuda	1	Persentase pemuda mandiri	100%	92,25%	92,25%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
14	Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat	1	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	15	15	100%
15	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar	1	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat	(41%) 280 Bh	(24,67%) 170	60,71%
		2	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut	(13%) 70 Bh	(12,09%) 63	90%
		3	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara	(56%) 704 flight	(54,32%) 679 flight	96,45%
16	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar	1	Jalan lingkaran timur utara terbangun (%)	94,95	0	0%
		2	Jalan lingkaran timur tengah terbangun (%)	85,55	0	0%
		3	Jalan lingkaran timur selatan terbangun (%)	82,18	0	0%
		4	Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)	75,00	78,47	104,63
		5	Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	(100%) 3 Bh	3 buah	100 %
		6	Berfungsinya Bandara Kayuadi	(8) Pemb. Fisik sisi darat dan Udara	Tidak terealisasi	0%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		7	Jumlah Pelabuhan Laut (%)	(75%) 15 Bh	7 buah	47%
		8	Perluasan terminal angkutan darat (%)	(73%) 90	(40%) 50	56%
		9	Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)	(83%) 5 Bh	(50%) 3 buah	60%
		10	Rasio jaringan irigasi	75,00	91,87	122,50
		11	Rasio ketersediaan air baku	90,00	81,03	90,04
		12	Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	96,77	74,65	77,14
		13	Rasio ketersediaan air bersih industri (%)	100,00	0	0
		14	Rumah layak huni (%)	(90,38%) 1.250 Unit	609	48,72%
		15	Cakupan sanitasi layak (%)	100	72,77	72,77%
		16	Kawasan pemukiman kumuh tertangani (%)	(60) 220 Ha	9,69 Ha	4,40%
		17	Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	55,45	-	-
		18	Rasio elektrifikasi industri (%)	37,25	-	-
		19	PLTMG terbangun dan beroperasi	Beroperasi	-	-

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		20	Terminal gas terbangun dan beroperasi	Beroperasi	-	-
17	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	1	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	(40%) 14,285	11.355	79,49%
		2	Jumlah kunjungan wisatawan asing	(70%) 1.598	1.068	66,83%
18	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	1	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	(40%) 103.000	(21,17%) 54.185	53%
19	Meningkatnya investasi	1	Nilai PMDN (Rp)	51.459.215.500	537.235.402.298	1.044%
		2	Nilai PMA (\$)	5.250.000	9.330.000	177,71%
20	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	1	Realisasi pembangunan KEK pariwisata	Ditetapkan	Belum ditetapkan (80%)	80%
21	Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang	1	Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	55	48%	87,27%
22	Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa)	1	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	15	13	86,67%
23	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	1	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (ton)	Padi : (10%) 43.363 Ton	34.979 Ton	80,67%
				Jagung : (15%) 15.802 Ton	7.127 Ton	54,89%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		2	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman hortikultura (ton)	Jeruk keprok : (0,30%) 5.929,88 Ton	3.219,8 Ton	54,33%
		3	Persentase peningkatan produksi perkebunan (ton)	Kelapa : (1,5 %) 26.736,12 Ton	24.342,36 Ton	91,05%
	Pala : (0,08 %) 375,38 Ton			396,39 Ton	105,59%	
	Cengkeh : (0,15%) 341,60			488,72 Ton	143,07%	
	Jambu mete : (0,09 %) 1.938.20			1.976,10 Ton	101,96%	
		4	Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan (kw/ha)	Padi :70,55 Ku/Ha	79,79 Ku/Ha	113,09%
				Jagung : 51,61 Ku/Ha	68,80 Ku/Ha	133,31%
		5	Tingkat produktivitas pertanian tanaman hortikultura (kw/ha)	Jeruk Keprok : 104,50 Ton	67,71 Ku/Ha	64,79%
		6	Tingkat produktivitas perkebunan (kg/ha)	Kelapa : 1,502 Kg/Ha	24.342,36 Kg/Ha	91,05%
				Pala : 375 Kg/Ha	396,39 Kg/Ha	105,59%
				Cengkeh : 400 Kg/Ha	488,72 Kg/Ha	143,07%
				Jambu Mete : 550 Kg/Ha	1.976,10 Kg/Ha	101,96%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
		7	Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali (%)	70 %	70 %	100%
		8	Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi unggul (%)	70 %	0%	0%
		9	Persentase peningkatan produksi ternak	Sapi potong : 21.693 ekor (29,46%)	21.823 ekor	100,60%
	Sapi perah : 0%			0	0%	
	Kerbau : 4,898 ekor (1,66%)			4.847 ekor	98,96%	
	Kuda : 4,140 ekor (2,39%)			4.108 ekor	99,23%	
	Kambing : 90.476 ekor (11,93%)			90.582 ekor	100,12%	
	Domba : 89 ekor (25,35%)			35 ekor	39,32%	
	Ayam Buras : 276,997 ekor (0,42%)			285.766 ekor	103,17%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
			Ayam Pedaging : 10,992 ekor (5,75%)	11.030 ekor	100,35%
			Ayam ras petelur: 13,791 ekor (5,65%)	15.897 ekor	115,27%
			Itik : 7,506 ekor (7,16%)	7.643 ekor	101,83%
10	Rehabilitasi hutan dan lahan (ha)		456,35 Ha (21,55%)	-	-
11	Produksi hasil hutan (m ³)		907,34 M3 (107,35%)	-	-
12	Kerusakan hutan dan lahan (ha)		42.076,64 Ha (-3,97%)	-	-
13	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap		(36,69 %) 33.503.92 ton	28.268,30	84,37%
14	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		(13%) 905,96	573,12	63,26%
15	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan		(11,11%) 130	165,75	127,50%
16	Persentase peningkatan konsumsi ikan (kg/orang/tahun)		(5,16%) 52	57,4	110,39%

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
24	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam	1	Indeks Lingkungan Hidup	78,9	78,74	99,80%
25	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	1	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	27,95%	12,64%	45,22%
		2	Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	1.200	316	26,33%
26	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan	1	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	19.270	19.347 (UMKM) 162 (Koperasi)	101,24%
27	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar	1	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	1.600	5.460	341%
		2	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	70	61	87%

3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya Aktivitas Keagamaan dan Kesalehan Sosial serta Toleransi Antar Umat Beragama

Sasaran strategis 1 ini merupakan upaya mencapai misi pertama sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi dan Basis Nilai Utama dalam Pembangunan secara Terencana, Menyeluruh, dan Berkelanjutan"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Untuk mengukur sasaran pertama ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **100%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pelaksanaan ibadah	Baik	Baik	100%	Baik	Baik	100%
2	Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	0	0	100%	0	0	100%
Rata-rata Capaian Kinerja				100%	Rata-rata Capaian Kinerja		100%

1. Pelaksanaan Ibadah



Gambar 1.2 :
Pelaksanaan ibadah bersama Bupati dan Wakil Bupati Kep. Selayar

Kerukunan umat beragama merupakan hubungan umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya, dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah telah melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus

memperhatikan pertimbangan Ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah. Sesuai dengan tingkatannya, Forum Kerukunan Umat Beragama telah terbentuk di Kabupaten Kepulauan Selayar, melalui hubungan yang bersifat konsultatif dengan tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat, menampung aspirasi Ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan. Dukungan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan tersebut diantaranya adalah terciptanya pemahaman bagi masyarakat tentang masalah nilai-nilai keagamaan, terbangunnya sarana dan prasarana ibadah, pelaksanaan zikir dan doa akhir tahun berjalan sesuai yang diharapkan.

2. Jumlah Insiden dalam Hubungan Antar Umat Beragama

Untuk mencapai indikator kinerja ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dengan tujuan agar seluruh umat beragama dapat saling menghargai dan menghormati didalam pelaksanaan kegiatan keagamaan masing-masing sehingga diharapkan tidak terjadi konflik antar umat beragama di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun unsur-unsur keagamaan yang tergabung ke dalam Forum Kerukunan Umat beragama ini adalah unsur MUI, NU, Muhammadiyah, Protestan, Katholik , Hindu, Budha dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Disamping itu FKUB juga melaksanakan kegiatan monitoring, pertemuan, silaturahmi antar pengurus dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan toleransi umat beragama lainnya. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama serta pelaksanaan kegiatan kemah kerukunan yang dilaksanakan pada bulan desember 2018 bertempat di Bahorea Kecamatan Bontosikuyu.

Selain itu dilaksanakan juga kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan dengan tujuan agar seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang multi etnik dapat terjalin ikatan sosial di masyarakat di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan diadakannya Forum Kerukunan Umat Beragama ini diharapkan tidak terjadi konflik antar umat beragama dan antar etnis di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun unsur-unsur etnis yang tergabung ke dalam Forum Pembauran Kebangsaan ini adalah unsur Kerukunan Keluarga Bone, Kerukunan Keluarga Mandar, Kerukunan Keluarga Toraja, Paguyuban masyarakat Jawa, Kerukunan Keluarga Jeneponto dan kerukunan etnis Tionghoa.

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena ;

- a) Efektivitas sosialisasi tokoh lintas agama dan etnis;
- b) Kesadaran terbentuknya Forum yang menjembatani kepentingan lintas agama dan etnis.
- c) Koordinasi antara Tokoh Lintas agama dan etnis dengan SKPD yang semakin Intesitas;
- d) Kesadaran para warga masyarakat dan banyak belajar pada daerah-daerah lain di Indonesia dalam penanganan konflik antar Suku, Ras maupun Agama.

Dengan keberhasilan pembentukan forum tersebut diharapkan:

- 1) Terjaganya dan terpeliharanya kerukunan antar umat beragama
- 2) terciptanya keharmonisan antar umat beragama.
- 3) Terwujudnya kerukunan antar umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dalam menjalankan ajaran agamanya serta tolong menolong dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- 4) Menghimpun aspirasi, menyalurkan dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait kebijakan dalam menciptakan kerukunan umat beragama.
- 5) Saling tukar menukar informasi dalam hal meningkatkan kerukunan antar umat beragama.

Selain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam mendukung indikator tersebut melaksanakan kegiatan pengamanan hari-hari besar keagamaan dan melakukan patroli ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam rangka pencegahan tindak kriminal yang dilaksanakan secara terpadu bersama TNI dan POLRI.

Tabel 3.4.1
Menciptakan kondisi stabilitas keamanan daerah yang kondusif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Penurunan Angka Kriminalitas	340	322	105,29%
Jumlah Insiden dalam hubungan antar umat beragama	0%	0 %	100%

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Akuntabel

Sasaran strategis 2 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh seluruh SKPD. Untuk mengukur sasaran kedua ini terdapat 1 (satu)

indikator sasaran dan hasil pengukuran peningkatan kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Opini atas laporan keuangan	WTP	Proses	WTP	WTP	proses	-
Rata-rata Capaian Kinerja				100%	Rata-rata Capaian Kinerja		-

Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 sementara ini masih dalam proses audit oleh Team Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga untuk indikator ini belum ada realisasi capaian kinerja.

Namun berdasarkan Hasil Resume LHP BPK, terdapat 10 entitas dari 57 entitas atau 17,54% entitas memiliki temuan BPK RI dan 47 entitas atau 82,45% entitas telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dari 95% yang ditargetkan oleh Inspektorat Daerah untuk indikator Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersaji sesuai SAP, pada Tahun 2019 hanya terealisasi sebesar 82,45% dengan persentase capaian sekitar 86,78%.

Tabel 3.5.1
Peningkatan Realisasi Kinerja dari 2017 s.d 2019

INDIKATOR KINERJA	TAHUN		
	2018 (LK 2017)	2019 (LK 2018)	2020 (LK 2019)
- Persentasi Laporan Keuangan perangkat daerah yang tersaji sesuai SAP	80%	82,45%	82,45%

Sumber: Inspektorat Daerah 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 yang memuat opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dengan Nomor: 42.A/LHP/XIX.MKS/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 42.B/LHP/XIX.MKS/05/2019 tanggal 27 Mei 2019 serta Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 42.C/LHP/XIX.MKS/05/2019 tanggal 27 Mei 2019. Jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya, pencapaian tersebut juga menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Tabel 3.5.2
Opini Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2016 s.d. 2019

No	Uraian	TAHUN 2016 (LKPD 2015)	TAHUN 2017 (LKPD 2016)	TAHUN 2018 (LKPD 2017)	TAHUN 2019 (LKPD 2018)
-	Opini BPK atas LKPD	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Daerah 2019

Telah banyak upaya yang dilakukan, baik oleh Inspektorat melalui APIP Inspektorat maupun dalam bentuk kerjasama dengan KPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Peran APIP dalam melaksanakan pengawasan adalah sebagai *Quality Assurance, Consulting Partner* dan *Catalyst* yang

diimplementasikan melalui kegiatan pemeriksaan regular dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang mengacu kepada isu strategis yang ada pada saat itu, selain itu dilaksanakan program-program Pendampingan, Reviu dan Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan OPD.

Selanjutnya, untuk mengatasi adanya kelemahan-kelemahan yang menjadi temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan sebagai alternatif solusi untuk meningkatkan realisasi kinerja, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar kedepannya melaksanakan beberapa kebijakan, diantaranya:

1. Meningkatkan peran pengawasan secara optimal dan berkualitas, agar OPD dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan fasilitas koordinasi yang lebih intensif antara fungsi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program/kegiatan;
3. Meningkatkan komunikasi antar OPD dalam menyusun rencana aksi atas tindak lanjut temuan BPK dan memaksimalkan pendampingan penanganan Tindak Lanjut terhadap temuan tersebut berdasarkan rekomendasi BPK RI.

Sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah juga telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung pencapaian indikator tersebut antara lain program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. Keberhasilan pencapaian opini WTP atas LKD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018, juga tak lepas dari dukungan:

1. Adanya peraturan perundangan yang berlaku.
2. Kebijakan pimpinan dalam mengupayakan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Adanya upaya seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kualitas LK-OPD-nya masing-masing.

Selain itu pemerintah juga terus berusaha memperbaiki kelemahan baik pada sistem pengendalian Intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta berupaya untuk meningkatkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab.

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien

Sasaran strategis 3 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh seluruh SKPD. Untuk mengukur sasaran ketiga ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **92,19%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	BB (70,00)	CC (58,21)	83,16%	BB (70,00)	CC (58,85)	84,07%
2	Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Tinggi (2.0000)	Tinggi (2.8555)	142,78%	Sangat Tinggi (3.0000)	Sangat Tinggi (3.0094)	100,31%
Rata-rata Capaian Kinerja				112,97%	Rata-rata Capaian Kinerja		92,19%

1. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

Hasil penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2018 adalah 58,21 dengan predikat "CC". Sedangkan untuk Tahun 2019 masih dengan predikat yang sama tetapi dengan nilai yang berbeda yaitu meningkat menjadi 58,85. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dibandingkan dengan capaian kinerja. Hal ini disebabkan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum berjalan dan memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat beberapa faktor yang harus ditindak lanjuti antara lain:

- a. Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil/outcome berupa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat;

- b. Menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi lebih andal;
- c. Memperbaiki penjabaran perencanaan kinerja (*cascade down*) dari level pemerintah daerah kepada OPD hingga level individu. Hasil penyempurnaan tersebut ditindaklanjuti dengan perbaikan pada Renstra OPD, program/kegiatan dan anggarannya, serta perjanjian kinerja individu untuk memastikan bahwa kinerja seluruh pegawai dan penggunaan anggaran daerah hanya untuk mencapai sasaran strategis daerah;
- d. Menyusun rencana aksi setiap OPD sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja OPD dengan target kinerja secara periodik/triwulan yang kemudian dimonitoring dan evaluasi secara berkala. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi agar lebih optimal;
- e. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan kinerja di periode yang akan datang;
- f. Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja OPD serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan SAKIP yang berkelanjutan terhadap masing-masing OPD.

Tabel 3.6.1
Perkembangan capaian Nilai SAKIP Kab. Kep. Selayar
Tahun 2015 - 2019

Indikator	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	C 43,50	CC 50,48	CC 55,00	CC 58,21	CC 58,85

Sumber: Bappelitbangda 2019

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 menunjukkan adanya perkembangan dari tahun ketahun namun belum sesuai dengan target yang diinginkan. Adapun hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut antara lain:

1. Internal Birokrasi:

- a. Masih lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD dengan kegiatan-kegiatan yang *project error*;
- b. Masih rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan;
- c. Masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap*).

2. Internal Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah:

- a. Belum mampu menyediakan *Standard Operating Procedure* (SOP) perencanaan yang baik, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
- b. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan;
- c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Adapun alternatif strategi yang dapat dilaksanakan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para aparatur perencana, khususnya terhadap tugas-tugas dibidang perencanaan;
2. Melaksanakan penyusunan perencanaan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah;
3. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Kepala Daerah dan bekerja sama dengan SKPD atau pihak yang terkait;
4. Meningkatkan pengetahuan dan teknologi informasi dengan selalu melakukan komunikasi untuk menjalin kerja sama.
5. Diperlukan adanya koordinasi yang menyeluruh agar pada tahun mendatang target dapat dicapai.

Pencapaian indikator ini didukung oleh semua perangkat daerah melalui kegiatan penyusunan LAKIP SKPD, Asistensi LAKIP SKPD, dan program Pengembangan Indikator dan Capaian Kinerja Individu, Kegiatan dan Program SKPD.

2. Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahun melaksanakan Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebagai salah satu alat untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah. Pada Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menempati peringkat 176 untuk skala nasional dengan Skor sebesar 3.0335 dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi** sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 53 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional. Sedangkan pada Tahun 2018, skor EKPPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami penurunan menjadi 2.8555 dan menempati peringkat 199 untuk skala nasional dengan predikat kinerja **Tinggi** sesuai

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 - 8840 Tahun 2018 tentang Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional.

Secara umum, nilai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat itu mengalami peningkatan walaupun tidak secara signifikan. Hanya saja terdapat beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengalami penurunan disebabkan oleh meningkatnya penilaian terhadap indikator tersebut. Penilaian EKPPD bukan hanya administrasi semata, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan penggalian potensi sumber ekonomi untuk memajukan daerah sekaligus mensejahterakan rakyat. Nilai EKPPD selain sebagai tolok ukur, juga merupakan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di tahun-tahun mendatang. Untuk itu diharapkan kepada seluruh instansi agar melakukan berbagai perbaikan serta menjadikan EKPPD sebagai pedoman kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Untuk hasil EKPPD Tahun 2019, skor EKPPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mengalami kenaikan menjadi 3.0094 dan menempati peringkat 21 untuk provinsi Sulawesi Selatan dengan predikat kinerja **Sangat Tinggi** (Sumber data: Bimtek EKPPD Februari 2020). Nilai tersebut diperoleh setelah sebelumnya melalui beberapa kali proses validasi sesuai mekanisme EKPPD terhadap LPPD kabupaten/kota. Evaluasi LPPD diawali dengan pelaksanaan validasi oleh Tim Teknis Daerah yang beranggotakan Tim dari Inspektorat Provinsi dan Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang kemudian disusul dengan pelaksanaan validasi terhadap hasil evaluasi Tim Daerah atas hasil monitoring dan kertas kerja evaluasi kabupaten /kota yang dilaksanakan oleh Tim Teknis Nasional LPPD.

Tabel 3.6.2
Perkembangan Capaian Nilai EKPPD

Indikator	Tahun 2017 (LPPD 2016)	Tahun 2018 (LPPD 2017)	Tahun 2019 (LPPD 2018)
Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	3.0335	2.8555	3.0094

Sumber: Bappelitbangda 2019

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan formal dan bimtek/diklat/workshop;
2. Kerjasama yang baik antar SKPD dalam pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan memperbaiki nilai capaian yang masih dibawah standar minimal.
3. Dukungan yang kuat dari para kepala SKPD.

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran strategis 4 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan**". Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas pariwisata serta Dinas Perikanan dan Kelautan. Untuk mengukur sasaran keempat ini terdapat 1 (satu) indikator

sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **99,17%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	86,87%	96,22%	90%	89,25 %	99,17%
Rata-rata Capaian Kinerja				96,22%	Rata-rata Capaian Kinerja		99,17%

Indeks Kepuasan masyarakat pada pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, yang diukur melalui upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap penerima layanan pada Tahun 2019 memiliki nilai realisasi sekitar 89,25% dari 90% yang ditargetkan dengan persentase capaian kinerja sekitar 99,17%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai 86,87% dari target 90% yang ditetapkan, maka capaian kinerja ini mengalami peningkatan sekitar 2,38% dengan pengertian bahwa semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

- a. Adanya peningkatan kualitas perilaku (cakap, ramah dan baik) dan keprofesionalan aparatur pemerintah daerah;
- b. Adanya peningkatan fasilitas yang menjadi penunjang kualitas pelayanan publik;
- c. Sistem pelayanan yang tidak lagi panjang dan berbelit-belit.

Sasaran Strategis 5

Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Sasaran strategis 5 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Untuk mengukur sasaran kelima ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **105,26%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keamanan) di kabupaten	94%	100%	106,38%	95 %	100%	105,26%
Rata-rata Capaian Kinerja				106,38%	Rata-rata Capaian Kinerja		105,26%

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman dan keindahan) adalah jumlah kasus pelanggaran K3 yang dapat diselesaikan pada tahun tersebut. Capaian indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 merupakan perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dari hasil operasi terkait, dikali 100 %. Pada

Tahun 2019, jumlah kasus yang terjadi sebanyak 118 berdasarkan data dari Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaraan dan keseluruhannya telah diselesaikan dengan baik. Jumlah kasus tersebut mengalami penurunan dibanding Tahun 2018 yang mencapai 173 kasus pelanggaran K3.

Tabel 3.8.1
Data Angka Kriminalitas Tahun 2014 – 2019

NO.	Jenis Kejahatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Narkoba	10	20	15	0	0
2	Pengrusakan	12	18	18	11	8
3	Penyerobotan Tanah	5	18	10	17	11
4	Senjata Tajam	1	2	2	1	1
5	Penodongan	0	0	0	0	0
6	Minuman keras	0	0	3	0	0
7	Perkelahian	0	0	0	0	1
8	Pemerasan	0	0	0	1	1
9	Penculikan	0	0	0	0	0
10	Curanmor	8	7	5	9	3
11	Pencurian Ternak	0	4	0	0	1
12	Pencurian Berat	1	1	0	1	2
13	Pencurian biasa	42	32	30	11	47
14	Penganiayaan	80	41	37	24	21
15	Penipuan	28	40	30	27	17
16	Pembakaran	0	-	0	0	0
17	Pengeroyokan	0	5	0	9	6
18	Kesusilaan	11	5	3	3	1
19	Pencabulan	14	13	3	6	1
20	Perjudian	2	1	3	1	2
21	Pemeriksaan	3	2	0	1	2
22	Penyalahgunaan BBM	0	-	0	0	2

NO.	Jenis Kejahatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
23	Percobaan Pemerkosaan	0	-	0	2	1
24	Senpi Ilegal / Rakitan	0	-	0	0	0
25	Korupsi	1	2	2	3	2
	Jumlah	218	211	161	127	130

Sumber : Satpol.PP Kab. Kepulauan Selayar 2019

Tabel 3.8.2
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3

NO.	URAIAN	TAHUN	
		2018	2019
1.	Jumlah Pelanggaran K3 (kasus)	173	118
2.	Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan (kasus)	173	118
3.	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (%)	100 %	100 %

Sumber: Satpol.PP Kab. Kepulauan Selayar 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut diatas antara lain pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kegiatan ini merupakan pembentukan forum – forum kewaspadaan dini masyarakat di seluruh tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan yang diketuai oleh Bupati Kepulauan Selayar dengan unsur - unsur keanggotaan yang terlibat dalam Tim ini adalah unsur Kepala Perangkat Daerah dan para camat se Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah yang dilaksanakan guna mengidentifikasi masalah Ipoleksosbud Hankam melalui pengumpulan bahan keterangan di Kabupaten Kepulauan Selayar dilaksanakan setiap bulannya melalui kegiatan rapat koordinasi dan melakukan rapat konsultasi/evaluasi bersama dengan unsure-unsur intelijen daerah yang dibentuk

pada 11 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah melaksanakan koordinasi dengan melakukan rapat/pertemuan membahas agenda permasalahan yang merupakan isu sentral di kalangan masyarakat serta melakukan pengkajian dan evaluasi perkembangan situasi aktual daerah dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Selain itu dilaksanakan pula kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Orang asing yang dilaksanakan melalui rapat – rapat koordinasi, monitoring dan konsultasi serta pengolahan informasi tentang kegiatan orang asing yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Kegiatan Pengawasan dan Pemantauan Orang Asing yang dikoordinasikan oleh Badan Kesbangpol dengan jumlah anggota sebanyak 26 orang terdiri dari unsur Intelijen Polres Kepulauan Selayar, Intelijen dari Kodim 1415 Kepulauan Selayar, para camat dan unsur dari ketenagakerjaan juga berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Makassar.

Dilaksanakan pula kegiatan Penyelenggaraan Pusat Komunikasi dan Informasi (Puskominfo) bidang Sosial Kemasyarakatan Bakesbangpol yang merupakan sarana pengumpulan data dan informasi yang berkembang di masyarakat terutama dalam bidang Ideologi, Politik, ekonomi, sosial dan Budaya serta Pertahanan Keamanan. Data dan informasi yang dihimpun merupakan data dari kecamatan – kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga perekrutan anggota intelijen di tiap kecamatan sebanyak 3 orang per kecamatan sehingga jumlah keseluruhan anggota tim sebanyak 33 orang informan (pemberi informasi), dari target sebanyak 33 orang informan yang direkrut dari 11 kecamatan dan terealisasi sebanyak 9 orang yang telah merekrut yaitu dari kecamatan Pasilambena, kecamatan pasimasunggu dan kecamatan Pasimarannu.

Terdapat pula kegiatan Workshop Pencegahan Radikalisme / Terorisme ditujukan untuk membina / memberdayakan masyarakat dan aparat pemerintah di kelurahan untuk turut serta dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

masyarakat terutama yang berkaitan dengan bahaya radikalisme / terorisme dengan materi yang diberikan sebagai berikut :

- a. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme oleh Kapolres Selayar
- b. Terorisme dan Radikalisme oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- c. Bahaya Aksi Terorisme/Radikalisme oleh Dandim 1415 Kepulauan Selayar.

Pelaksanaan kegiatan Deteksi Dini Potensi Konflik bagi Aparat Pemerintah yang dimaksudkan untuk menumbuhkan pemahaman serta Pemantapan Jiwa Kebangsaan dan bernegara dalam menjaga Stabilitas Daerah yang Kondusif dalam mendukung iklim investasi di daerah dengan materi yang diberikan sebagai berikut:

- a) Konflik- konflik Sosial masa kini dalam hubungannya antar umat beragama (Kajian sosial dan teologis) oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- b) Deteksi dini potensi konflik bagi aparat pemerintah oleh Kapolres Kepulauan Selayar
- c) Peningkatan Kemampuan Deteksi dini aparat pemerintah Oleh Dandim 1415 Kepulauan Selayar.

Selain Badan Kesatuan Bangsa turut memegang peranan penting pula program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain pelaksanaan program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Program Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Kebakaran, Program Penanggulangan Kebakaran, serta Program Pemberantasan Peredaran Cukai Rokok Illegal.

Menurunnya angka kriminalitas di Kabupaten Kepulauan Selayar dipengaruhi oleh berbagai faktor. Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja tersebut adalah :

1. Adanya forum-forum strategis yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kewaspadaan Dini Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Terjalinnnya koordinasi dan konsolidasi antara Kesbangpol dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Adanya rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di daerah yang difokuskan kepada kasus-kasus sosial yang ada di masing-masing daerah demi menjaga kondusifitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di daerah.
4. koordinasi yang baik dari masing-masing instansi yang membidangi antara lain Satpol PP, Kantor Kementrian Agama, Kodim 1415, Kantor Kesbangpol, dan Kepolisian.
5. Keterbukaan pada masing-masing sekolah untuk mengatasi masalah kenakalan remaja, Miras dan narkoba serta illegal fishing.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Pelayanan Penyelenggaraan Transmigrasi Lokal Berdasarkan Kebutuhan Daerah

Sasaran strategis 6 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan”**. Untuk mengukur sasaran keenam ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar 0 % dengan kategori predikat **Sangat Rendah**. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hasil pengukuran peningkatan pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Transmigran lokal (KK)	20	0	0%	20	0	0%
Rata-rata Capaian Kinerja				0%	Rata-rata Capaian Kinerja		0%

Jumlah transmigrasi lokal yang ditargetkan dalam RPJMD untuk Tahun 2019 sebanyak 20 KK, target yang sama dengan Tahun 2018. Namun berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan belum ada pembebasan lahan dikarenakan sampai saat ini belum ada titik temu dan kesepakatan antara pemerintah desa dan masyarakat desa. Dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pemerintah desa

bersama masyarakat yang ada di Desa Bontoborusu dan Desa Bontobulaeng Kecamatan Bontoharu sebagai wilayah yang dipilih sebagai lokasi transmigrasi. Adapun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam usaha pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Belum ada kesepakatan dan keputusan bersama antara masyarakat dan pemerintah.
2. Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator ini relatif kecil sehingga target belum bisa dicapai. Untuk Tahun 2019 program yang mendukung pencapaian indikator ini adalah Program Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Wilayah Transmigrasi dengan kegiatan peningkatan kerjasama antar wilayah kawasan transmigrasi.

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sasaran strategis 7 ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi kedua sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Inspektorat. Untuk mengukur sasaran ketujuh ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **100%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase desa mandiri	5 desa (11,11)	5 desa (11,11)	100%	1 desa (12,35)	1 desa (12,35)	100%
2	Persentase desa berkembang	7 desa (38,27)	7 desa (38,27)	100%	6 desa (45,68)	6 desa (45,68)	100%
3	Persentase desa tertinggal	4 desa (9,88)	4 desa (9,88)	100%	0	0	100%
Rata-rata Capaian Kinerja				100 %	Rata-rata Capaian Kinerja		100%

1. Persentase desa mandiri

Suatu Desa dikatakan Desa Mandiri apabila sudah memiliki sarana dan prasana yang memadai (pendidikan, perkantoran, kesehatan, tempat ibadah serta akses jalan dan komunikasi), terjadinya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, sumber daya alamnya bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan, memiliki kemampuan untuk menunjang pembangunan dan mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Dari total 81 desa di Kabupaten Kepulauan Selayar, pada Tahun 2019 terdapat 1 desa yang menjadi kategori desa mandiri yaitu Desa Polebunging, terletak di Kecamatan Bontomanai dengan skor IPD (Indeks Pembangunan Desa) Tahun 2019 sebesar 75,56 % dari nilai skor Tahun 2018 sebesar 74,98. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan 0,58 % dari tahun sebelumnya yaitu pada dimensi kondisi infrastruktur pada infrastruktur air bersih dan sanitasi dan dimensi aksesibilitas transportasi.

2. Persentase desa berkembang

Desa Berkembang adalah desa yang sudah terpenuhi SPM desa pada semua aspek tetapi pengelolaannya belum menunjukkan keberlanjutan. Pada

desa berkembang ini sudah terjadi perkembangan baik dari segi mata pencaharian yang sudah beragam, adat istiadat yang sudah mengalami perubahan, pengaruh dari luar sudah masuk sehingga terjadi perubahan cara berfikir, gotong royong membangun desa sudah meningkat, lapangan kerja bertambah, masyarakat telah mampu meningkatkan taraf kehidupannya sehingga bantuan pemerintah hanya sebagai perangsang saja. Berikut ini 6 desa yang termasuk desa berkembang pada Tahun 2019 antara lain:

- a. Desa Kayu Bauk, terletak di Kecamatan Bontomatene dengan skor IPD (Indeks Pembangunan Desa) pada Tahun 2019 sebesar 55,13%, dari nilai skor tahun 2018 sebesar 53,10%, terjadi peningkatan capaian sebesar 0,03% dari tahun sebelumnya yaitu pada dimensi Pelayanan Dasar di Pelayanan Pendidikan dan dimensi kondisi infrastruktur di infrastruktur energi dan infrastruktur komunikasi dan informasi.
- b. Desa Tamalanrea, terletak di Kecamatan Bontomatene dengan skor IPD (Indeks Pembangunan Desa) pada Tahun 2019 sebesar 68,22% dari nilai skor tahun 2018 sebesar 66,87%, terjadi peningkatan capaian sebesar 1,35% dari tahun sebelumnya yaitu pada dimensi kondisi infrastruktur di infrastruktur komunikasi dan informasi dan dimensi aksesibilitas/transfortasi.
- c. Desa Bontomarannu, terletak di Kecamatan Bontomanai dengan skor IPD (Indeks Pembangunan Desa) pada Tahun 2019 sebesar 72,98% dari nilai skor tahun 2018 sebesar 71,71%, terjadi peningkatan capaian sebesar 1,27% dari tahun sebelumnya yaitu pada dimensi pelayanan dasar di pelayanan pendidikan.
- d. Desa Kembang Ragi, terletak di Kecamatan Pasimasunggu dengan skor IPD (Indeks Pembangunan Desa) pada Tahun 2019 sebesar 63,53% dari nilai skor tahun 2018 sebesar 60,17%, terjadi peningkatan capaian sebesar 3,36% dari tahun sebelumnya yaitu pada dimensi Pelayanan Dasar di Pelayanan Kesehatan dan dimensi aksesibilitas/transfortasi.

- e. Desa Kayuadi, terletak di Kecamatan Takabonerate dengan skor IPD (Indeks Pembangunan Desa) pada Tahun 2019 sebesar 58,88% dari nilai skor tahun 2018 sebesar 56,73%, terjadi peningkatan capaian sebesar 2,15% dari tahun sebelumnya yaitu pada dimensi Kondisi infrastruktur di infrastruktur ekonomi dan dimensi aksesibilitas/transfortasi.
- f. Desa Lalang Bata, terletak di Kecamatan Buki dengan skor IPD (Indeks Pembangunan Desa) pada Tahun 2019 sebesar 71,17 % dari nilai skor Tahun 2018 sebesar 69,23 % terjadi peningkatan sebesar 1,94 % dari tahun sebelumnya yaitu pada dimensi pelayanan dasar di pelayanan pendidikan dan dimensi pelayanan umum di olahraga.

3. Persentase desa tertinggal

Desa tertinggal ini adalah desa dimana pendidikan masyarakat masih rendah, sebagian besar penduduk hidup bertani, daerahnya bergunung-gunung atau daerah perbukitan, lembaga-lembaga yang ada masih sangat sederhana, kegiatan penduduk dipengaruhi oleh alam, kegiatan ekonomi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sendiri, lokasi desa terpencil dan masyarakatnya masih cenderung tertutup. Dari total 81 desa di Kabupaten Kepulauan Selayar, pada Tahun 2019 tidak terdapat lagi desa yang masuk kategori desa tertinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keberhasilan capaian ke 3 indikator tersebut diatas tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik antar semua pihak yang berperan didalamnya. Khusus untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2019 antara lain:

1. Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan:
 - a. Persentase BUMDES yang aktif :

Dari 81 Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah BUMDES baru terbentuk pada 77 desa. Namun desa yang memiliki BUMDES yang aktif baru berjumlah 68 BUMDES dari target 75% BUMDES yang aktif dengan persentase capaian kinerja sekitar 80%. Dari 77 BUMDES yang terbentuk terdapat 14 BUMDES yang tidak aktif, hal ini disebabkan 14 BUMDES tersebut belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan dan masih sedikitnya pemahaman masyarakat desa tentang BUMDES serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta kurangnya manajerial pengelolaan BUMDES. Pada Tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan Pembinaan/Monitoring Pengelolaan BUMDES di 34 BUMDES.

b. Persentase pembinaan UMKM

Pada Tahun 2019 target untuk pembinaan UMKM adalah 10 UMKM. Target ini dapat terealisasi 100% dikarenakan adanya kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pembinaan UMKM, yaitu fasilitasi pembinaan UMKM sehingga rutin dilaksanakan pembinaan ke UMKM yang ada di desa.

2. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan:

a. Kelompok Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang dibina pada Tahun 2019 adalah 81 KPM sesuai dengan target yang ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 100%. Sedangkan keberadaan LPM tidak lagi menjadi kewenangan Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa sejak Tahun 2017 dan telah menjadi kewenangan Kelurahan.

b. PKK yang aktif sebanyak 100 dan tersebar di 81 Desa, 7 Kelurahan dan 11 Kecamatan yaitu 6 kecamatan daratan dan 5 kecamatan kepulauan dan 1 PKK Kabupaten. Capaian kinerja ini terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditargetkan.

c. Jumlah Posyandu yang aktif pada Tahun 2019 adalah sebanyak 225 posyandu yang tersebar di seluruh desa. Capaian kinerja ini terealisasi

100% sesuai dengan target dikarenakan posyandu sangat dirasakan manfaatnya khususnya untuk kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita.

3. Pengembangan teknologi tepat guna:

a. Jumlah desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna

Target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2019 dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna adalah 11 Pengrajin dari 11 Desa. Dari jumlah keseluruhan yaitu sebanyak 81 Desa, persentase desa yang memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) hanya 13,5%, antara lain alat penyaring pasir, pembuatan aspal butas, alat pemotong padi dan lain-lain.

b. Persentase pembinaan terhadap pengrajin Teknologi Tepat Guna

Untuk tahun 2019 monitoring dan pembinaan pembinaan Teknologi Tepat Guna (TTG) telah dilaksanakan 100% yang dilakukan di 81 desa, dengan jumlah binaan 11 Pengrajin.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya antara lain :

- Akses transportasi yang masih belum memadai dalam melakukan monitoring dan pembinaan terhadap pengrajin Teknologi Tepat Guna (TTG) utamanya desa kepulauan.
- Masih banyaknya Desa yang yang belum terjangkau jaringan telepon seluler (beberapa desa/lingkungan di Daratan Selayar dan banyak desa di daerah Kepulauan) , termasuk yang menjadi hambatan adalah ketidaktersediaan tenaga listrik yang memadai.
- Masih kurangnya minat pemuda dalam menciptakan dan mengembangkan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Sasaran Strategis 8

Berkurangnya Penduduk Miskin

Sasaran strategis 8 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran kedelapan ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **44%** dengan kategori predikat **Sangat Rendah**. Hasil pengukuran pengurangan penduduk miskin adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase angka kemiskinan	5,76%	11,19%	51,47%	5,29 %	11,47%	46,12%
2.	Jumlah penduduk miskin (KK)	7.415 kk	9.464 kk	78,35%	6.815 kk	15.942 kk	42,74%
Rata-rata Capaian Kinerja				65 %	Rata-rata Capaian Kinerja		44,43%

1. Persentase angka kemiskinan.

Persentase angka kemiskinan pada Tahun 2019 yaitu 11,47% dari target 5,29% yang ditetapkan dengan persentase capaian sekitar 46,12%. Realisasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan masyarakat miskin sebesar 6,18% pada Tahun 2019 ini.

2. Jumlah Penduduk Miskin.

Pada Tahun 2019 jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial adalah sebanyak 15.942 kk yang tersebar di seluruh desa dan kecamatan baik di wilayah kecamatan daratan maupun di wilayah kecamatan kepulauan. Jumlah ini mengalami peningkatan dibanding jumlah masyarakat miskin pada Tahun 2018 yang hanya sebesar 15.486 jiwa atau 9.464 kk. Salah satu penyebab meningkatkan jumlah penduduk miskin adalah karena Basis Data Terpadu (BDT) yang dimiliki Dinas Sosial belum lagi dilakukan pemutakhiran data sejak Tahun 2015 sehingga saat ini masih ditemukan warga yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan atau telah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam BDT.

Walaupun demikian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, selalu konsisten memadukan program pusat dengan daerah secara sinergis dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan. Berbagai langkah strategis pemerintah daerah untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan melalui intervensi program/kegiatan secara terintegrasi antar lembaga pemerintah yang dapat dilihat pada uraian berikut ini.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator sasaran meningkatnya subsidi pendidikan bagi masyarakat tidak mampu.

Pada Tahun 2019 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan kegiatan program gratis yaitu dengan penyediaan seragam gratis bagi 3.466 siswa SD dan SMP kurang mampu di seluruh kecamatan.

Gambar 1.3:
Penyerahan bantuan seragam sekolah oleh Bupati Kep. Selayar



2. Dinas Sosial dengan sasaran meningkatnya akses keluarga miskin terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan ekonomi produktif dan meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial.
 - Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui bantuan UEP, dengan kegiatan:
 - a. Pembinaan dan pemberdayaan keluarga miskin melalui UEP dengan capaian kinerja 153 KK.
 - b. Pembinaan dan pemberdayaan keluarga rentan melalui UEP dengan capaian kinerja 12 KK.
 - c. Pembinaan dan pemberdayaan Wanita rawan sosial ekonomi melalui UEP dengan capaian kinerja 16 KK
 - d. Pembinaan dan pemberdayaan Anak terlantar melalui UEP dengan capaian kinerja 10 Anak
 - e. Pembinaan dan pemberdayaan Lanjut usia potensial melalui UEP dengan capaian kinerja 20 KK
 - f. Pembinaan dan pemberdayaan Penyandang disabilitas melalui UEP dengan capaian kinerja 7 KK

- g. Pembinaan dan pemberdayaan Eks Narapidana melalui UEP dengan capaian kinerja 6 KK
 - h. Pemberdayaan Masyarakat Kurang Mampu dengan capaian kinerja 50 KK
 - Jumlah keluarga Miskin yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan melalui bantuan KUBE dengan kegiatan Pembinaan dan pemberdayaan keluarga miskin melalui KUBE dengan capaian kinerja 6 KK.
 - Jumlah Keluarga Miskin yang memperoleh bantuan Rastra dan Bantuan Pangan dengan rincian Jumlah masyarakat miskin yang terbantu dengan bantuan Rastra yang berubah nama menjadi BPNT (Bantuan pangan non tunai) dan sejak 2020 berubah nama lagi menjadi Program Sembako sebanyak 9215 KPM sedangkan jumlah penerima bantuan pangan sebanyak 1.085 KK, jd total penerima bantuan untuk indikator jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan Rastra dan Bantuan pangan sebanyak 10.300 KK.
 - Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan Tunjangan Hidup sebanyak 750 orang
 - Jumlah Anak Yatim Piatu dan anak yatim yang mendapatkan bantuan tunjangan hidup sebanyak 127 Anak
 - Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan bantuan tunjangan hidup (penyandang cacat fisik dan mental) dengan jumlah sebanyak 176 Orang
 - Jumlah Masyarakat Miskin penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebanyak 5.590 KPM
3. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, memberikan bantuan usaha kepada para alumni Balai Latihan Kerja yang pada Tahun 2019 bantuan tersebut berupa bantuan peralatan

pertukangan kepada 5 kelompok, peralatan perbengkelan sebanyak 30 kelompok dan bantuan mesin jahit sebanyak 10 kelompok.

4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pada Tahun 2019 memberikan bantuan berupa handtraktor kepada 20 kelompok petani, bibit sapi betina dan sapi jantan kepada 2 kelompok peternak, bibit kambing jantan dan betina kepada 16 kelompok peternak, bibit ayam buras super kepada 2 kelompok peternak, kawat duri kepada 16 kelompok petani, mesin penggiling padi kepada 2 kelompok petani, bak fiber kepada 6 kelompok petani, jaring pengaman kebun kepada 10 kelompok petani, serta pengadaan berbagai macam bibit dan pupuk yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dan tersebar hampir diseluruh kecamatan.
5. Dinas Perikanan dan Kelautan, pada Tahun 2019 memberikan bantuan kepada nelayan kurang mampu berupa Perahu Ikan Lebih Kecil dari 3 GT beserta Mesin, Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan kepada 27 kelompok, cool box kepada 7 kelompok, fix finder kepada 23 kelompok, pengadaan alat tangkap kepada 8 kelompok, pengadaan mesin kepada 22 kelompok, pengadaan perahu kepada 76 kelompok, senter selam kepada 10 kelompok, bantuan jarring keramba kepada 4 kelompok, mesin alcon dan pompa kepada 4 kelompok serta pengadaan bibit ikan air tawar kepada 7 kelompok nelayan.
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, pada Tahun 2019 memberikan bantuan kepada kelompok usaha kurang mampu berupa mesin jahit dan obras kepada 12 kelompok, alat pertukangan kepada 17 kelompok, alat perajang keripik kepada 15 kelompok, mesin parut kelapa dan penepung beras kepada 11 kelompok, mesin pencetak batu merah kepada 5 kelompok, alat masak memasak kepada 25 kelompok, alat pengupas sabut kelapa kepada 5 sentra usaha, mesin pencacah sampah dan mesin pres sampah kepada 1 sentra usaha, bantuan alat pengrajin souvenir kepada 17 kelompok usaha, bantuan mesin pemipil jagung

kepada 2 kelompok, bantuan alat ketrampilan tata busana kepada 4 kelompok, mesin penggiling kacang hijau kepada 1 kelompok serta bantuan peningkatan mutu batu merah (alcon dan gerobak) kepada 17 kelompok usaha.

7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan bantuan pembangunan sarana air bersih dan pemasangan sambungan jaringan air bersih kerumah yang pada Tahun 2019 mencakup 3 desa yaitu desa Bontosale kec. Pasimasunggu sebanyak 59 sambungan rumah (SR), desa Kembang Ragi Kec. Pasimaunggu sebanyak 234 SR, desa Bontokoraang kec. Bontomanai sebanyak 110 SR, desa Kohala kec. Buki sebanyak 78 SR dan desa Onto kec. Bontomatene sebanyak 135 SR dengan jumlah total 616 SR.

Belum optimalnya pencapaian indikator persentase masyarakat miskin dan jumlah masyarakat miskin disebabkan karena:

1. Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial dari Tahun 2015 sampai Tahun 2019 belum pernah dilakukan verifikasi dan validasi data, sehingga data yang ada sudah tidak up to date.
2. Masih kurangnya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lintas sektor/SKPD dengan mengedepankan kepentingan masyarakat miskin.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan belum bersinergi dan bersifat sektoral sehingga terkesan program yang dilahirkan bersifat parsial yang berdampak pada pelaksanaan program tidak terpadu dan terintegrasi.
4. Masih terdapatnya Program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kurang tepat sasaran.
5. Masih kurang intensifnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan

Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan serta masih terdapatnya beberapa kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut maka disarankan

kepada Pemerintah daerah untuk menjalankan program terpadu secara serius dan bertanggung jawab agar dapat segera mengatasi masalah kemiskinan di kabupaten kepulauan selayar , antara lain:

1. Perlunya data yang akurat (nama dan alamat Rumah Tangga Miskin) yang akan menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan .
2. Program yang diterima oleh Rumah Tangga Miskin harus sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan hasil identifikasi program.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan hendaknya bersinergi dan terpadu yang melibatkan (pemerintah, swasta, masyarakat, pelaku ekonomi serta LSM) berdasarkan prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas dan transparansi yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan agar program tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
5. Mengembangkan Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga bagi masyarakat miskin.
6. Meningkatkan Akses Usaha kecil terhadap Sumberdaya Produktif.
7. Meningkatkan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan selayar.

Sasaran Strategis 9

Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Sasaran strategis 9 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat”**. Untuk mengukur sasaran kesembilan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan

Pengembangan Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kepariwisata, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB. Untuk mengukur sasaran kesembilan ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **100,63%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran sasaran peningkatan daya beli masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Income per kapita penduduk (Juta)	25,5	25,45	99,80%	27	27,17	100,63%
Rata-rata Capaian Kinerja				99,80%	Rata-rata Capaian Kinerja		100,63%

Pendapatan perkapita penduduk (income perkapita) adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah yang diperoleh dari hasil pembagian antara pendapatan Daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDRB perkapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya maka semakin besar juga kemungkinan daerah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Data Badan Pusat Statistik Tahun 2020 menunjukkan bahwa pada Tahun 2019 Income perkapita penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar adalah

sebesar 27.168.780,- sedangkan Tahun 2018 sebesar 25.489.050,- dan Tahun 2017 sebesar Rp. 23.654.040,-. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan pendapatan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya. Pada Tahun 2018 Income perkapita penduduk mengalami peningkatan sebesar Rp.1.679.730,- atau sekitar 6,59% dari Tahun 2017. Sedangkan pada Tahun 2019 Income perkapita penduduk mengalami peningkatan kembali sebesar Rp.1.835.010,- atau sekitar 7,76% dari Tahun 2018. Income perkapita penduduk sering diring digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah; semakin besar Income perkapita penduduknya maka semakin makmur daerah tersebut. Adapun keberhasilan capaian indikator tersebut di dukung oleh:

1. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menekan laju inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2019 yaitu sebesar 2,84% dimana Tahun 2018 mencapai 3,85%. Pengendalian inflasi ini dilakukan melalui berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga di Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain senantiasa meningkatkan koordinasi baik di tingkat kecamatan, sidak ke pasar, toko dan gudang sembako yang ada, kemudian peningkatan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi BBM, gas LPG.
2. Laju pertumbuhan ekonomi yang mana penunjang utamanya adalah konsumsi rumah tangga disamping konsumsi makanan dan minuman, kesehatan, transportasi, komunikasi dll.

Sasaran Strategis 10

Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Sasaran strategis 10 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **"Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat"**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Untuk mengukur sasaran kesepuluh ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **99,97%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan derajat pendidikan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.13
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka melek huruf	97	87,88	90,59%	98	98,15	100,15%
2.	Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	12,40	12,40	100%	12,47	12,40	99,43%
Rata-rata Capaian Kinerja				95,30%	Rata-rata Capaian Kinerja		99,97%

1. Angka melek huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk 15 tahun ke atas terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis. Meningkatnya jumlah penduduk usia >15 tahun melek huruf merupakan sasaran strategis untuk mengatasi persoalan yang terkait dengan bebas buta aksara, maka dirasa penting untuk tetap melanjutkan program penuntasan wajib belajar bagi mereka yang sudah dewasa. Tingkat melek huruf menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya

Pada Tahun 2019, realisasi angka melek huruf adalah sebesar 98,15 dari 98 yang ditargetkan dalam RPJMD dengan persentase capaian sekitar 100,15%. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendidikan kesetaraan dan keaksaraan melalui Paket A setara SD, Paket B setara SMP, Paket C setara SMP yang pembelajarannya dilaksanakan tiga kali seminggu pada sore hari tergantung kesempatan masyarakat.
2. Membuka pelatihan keahlian untuk masyarakat di sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang cukup efektif untuk meningkatkan Angka Melek Huruf yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 3.13.1
Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2016 – 2019

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Angka Melek Huruf	96,14	96	87,88	98,15

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019

2. Angka rata-rata lama sekolah (tahun)

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP. Indikator Kinerja Utama Angka Rata-rata Lama Sekolah, adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk

berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

Tabel 3.13.2
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2016 – 2019

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Rata-rata lama sekolah	10	10,68	12,40	12,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019

Berdasarkan tabel 3.12.2 diatas dapat dilihat bahwa pencapaian Angka Rata rata Lama Sekolah (RLS) dapat direalisasikan sebesar 12,40 tahun dari target sebesar 12,47 tahun, dengan persentase capaian kinerja sekitar 99,43%, masih ada kesenjangan sebesar 0,07 point. Hal ini diketahui bahwa rata rata pendidikan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menyelesaikan sekolah sampai lulus kelas 3 Sekolah Menengah. Ada banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah bagi penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar antara lain:

1. Dengan menggulirkan sekolah bebas biaya;
2. Memberikan bantuan kepada siswa baru yang kurang mampu seperti bantuan seragam sekolah sehingga tidak ada alasan lagi bagi masyarakat untuk tidak menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi dengan alasan tidak mampu membeli seragam sekolah.
3. Pengalokasian dana BOS untuk seluruh sekolah SD dan SMP dengan harapan semua siswa dapat bersekolah dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menekan angka putus sekolah baik di tingkat SD /MI maupun SMP/MTs.

4. Meningkatkan kualitas pendidik yang merupakan faktor penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran;
5. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Walaupun demikian, sampai saat ini pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam upaya peningkatan angka rata-rata lama sekolah yang salah satunya adalah banyaknya warga diwilayah kepulauan Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih bertempat tinggal tidak tetap/ berpindah- pindah sehingga pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam usaha memberikan bantuan.

Tabel 3.13.3.
Data Jumlah siswa dan Jumlah penduduk

NO	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Siswa PAUD	5.701
2	Jumlah Siswa SD Sederajat	15.226
3	Jumlah Siswa SMP Sederajat	6.173
4	Jumlah Penduduk Usia 4-6 Tahun	8.465
5	Jumlah Penduduk Usia 7-12 Tahun	14.644
6	Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun	5.973

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019

Berikut ini data Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018:

1.1. Angka Partisipasi Kasar (APK)

a. APK PAUD

Berdasarkan tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa target angka partisipasisasi kasar PAUD yaitu 61% dengan realisasi capaian 110%. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah penduduk

usia 4-6 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 8.465 jiwa. Sementara jumlah siswa di jenjang pendidikan PAUD adalah 5.701 siswa. Sehingga APK PAUD pada tahun 2019 adalah 67,34 % . Hal tersebut dikarenakan kesadaran minat orang tua untuk menyekolahkan anak di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terutama untuk Ibu yang tidak bekerja sudah mengalami peningkatan. Kondisi ini diakibatkan oleh ketersediaan sarana ruang pembelajaran dan fasilitas pendukungnya yang memadai. Begitupula dengan guru pada TK terpenuhi sesuai rasio yang dibutuhkan.

Tabel 3.13.4
Data Angka Partisipasi

No	Indikator	Target 2019	Realisasi	Capaian
				(%)
1	Angka Partisipasi Kasar	61	67,34	110
2	Angka Partisipasi Kasar SD	100	103	103
3	Angka Partisipasi Kasar SMP	97,90	98	100,1

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019

b. APK PAUD

Berdasarkan tabel 3.9 diatas dapat dilihat bahwa target angka partisipasi kasar PAUD yaitu 61% dengan realisasi capaian 110%. Berdasarkan data BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, jumlah penduduk usia 4-6 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 8.465 jiwa. Sementara jumlah siswa di jenjang pendidikan PAUD adalah 5.701 siswa. Sehingga APK PAUD pada tahun 2019 adalah 67,34 % . Hal tersebut dikarenakan kesadaran minat orang tua untuk menyekolahkan anak di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terutama untuk Ibu yang tidak bekerja sudah mengalami peningkatan. Kondisi ini

diakibatkan oleh ketersediaan sarana ruang pembelajaran dan fasilitas pendukungnya yang memadai. Begitupula dengan guru pada TK terpenuhi sesuai rasio yang dibutuhkan.

c. APK SD/MI

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat pada Tahun 2019 direalisasikan sebesar 103% dari target 100% dengan capaian kinerja 103%. Adapun faktor pendukung pencapaian target adalah pemerataan akses pendidikan dan adanya program wajib belajar sembilan tahun. Berdasarkan data BPS di Kabupaten Kepulauan Selayar jumlah penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 14.644 jiwa. Sementara jumlah siswa di jenjang pendidikan SD adalah 15.226 siswa. Sehingga APK SD pada tahun 2019 adalah 103%. Pencapaian realisasi APK SD terjadi peningkatan dalam hal pencapaian realisasinya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain mutasi siswa dari luar daerah yang ingin bersekolah di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

d. APK SMP/MTs

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat pada Tahun 2019 direalisasikan sebesar 98% dari target 97,90% dengan capaian kinerja 100,1%. Berdasarkan data BPS di Kabupaten Kepulauan Selayar jumlah penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 5.973 jiwa. Sementara jumlah siswa di jenjang pendidikan SMP adalah 6.173 siswa. Sehingga APK SD pada tahun 2019 adalah 98%. Pencapaian realisasi APK SD terjadi peningkatan dalam hal pencapaian realisasinya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan beberapa faktor, antara lain mutasi siswa dari luar daerah yang ingin bersekolah di daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Angka Partisipasi Murni (APM)

Tabel 3.13.5
Capaian Angka Partisipasi Murni

No	Indikator	Target	Realisasi
1	Angka Partisipasi Murni SD	97,73	89
2	Angka Partisipasi Murni SMP	97,50	86

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa APM tingkat SD tahun 2019 mencapai 89%, hal ini menunjukkan bahwa usia siswa yang masuk sekolah pada jenjang sekolah dasar masih tidak sesuai dengan standar usia yaitu 7 tahun sehingga tidak mencapai target yang telah ditentukan. APM di tingkat SMP mencapai 86%, dari hasil perhitungan masing-masing jenjang pendidikan dapat dianalisis bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SMP Tahun 2019 masih belum sesuai dengan target yang ditentukan. Tingkat capaian kinerja angka partisipasi murni (APM) disebabkan karena menurunnya tingkat kesadaran masyarakat tentang batas usia penerimaan siswa baru. Salah satu faktor keberhasilan dalam peningkatan angka partisipasi belajar bagi usia sekolah dapat mencapai 100 persen, bila dalam hal penerimaan siswa baru di sekolah dasar harus berusia 7 tahun.

Sasaran Strategis 11

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis 11 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat**”. Untuk mengukur sasaran kesebelas ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk mengukur sasaran kesebelas ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **101,14%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 11

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Angka usia harapan hidup	67,56	67,82	100,38%	67,57	68,34	101,14%
Rata-rata Capaian Kinerja				100,38%	Rata-rata Capaian Kinerja		101,14%

Angka Harapan Hidup menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah karena semakin baik kesehatan seseorang maka cenderung untuk hidup lebih lama. Angka Harapan Hidup juga merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan pembangunan

kesehatan baik itu kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk usaha pemberantasan kemiskinan. Pada Tahun 2019, Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar telah mencapai 68,34 dari 67,57 yang ditargetkan dengan persentase capaian sekitar 101,14%. Artinya bahwa bayi-bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki harapan hidup rata-rata sampai 68 tahun.

Gambar : 1.4
Bupati Kepulauan Selayar
Menerima Penghargaan
Universal Health Coverage
(UHC) dari Presiden RI



Untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata maka Dinas Kesehatan dan RSUD melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung berperan dalam peningkatan kesehatan masyarakat yang mencakup aspek:

1. Pelayanan kesehatan ibu yang melaksanakan berbagai kegiatan seperti pertemuan peningkatan cakupan program kesehatan keluarga dan gizi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kesehatan keluarga dan gizi serta adanya jaminan persalinan yang pada Tahun 2019 ini melayani 497 orang ibu bersalin. Keberhasilan aspek ini didukung oleh:
 - a. Meningkatnya kompetensi petugas dan kepatuhan dalam memberi layanan sehingga keterlambatan dalam mendeteksi penanganan ke tempat rujukan dapat diminimalkan;

- b. Mengoptimalkan sistim rujukan dari fasilitas kesehatan pada tingkat pertama (bidan pratek) ke fasilitas kesehatan rujukan.
2. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang melaksanakan berbagai kegiatan seperti penanggulangan penyakit TB dan kusta, pengendalian penyakit hepatitis dan HIV, penanggulangan penyakit diare, rabies, tifoid, kecacingan dan ISPA, pengendalian penyakit dan pengendalian malaria yang capaiannya sampai 10 desa.
3. Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular yang melaksanakan berbagai kegiatan antara lain BIMTEK Petugas P2PTM, Pelatihan Petugas Kesehatan Jiwa, POSBINDU OPD/Organisasi, Pengambilan Logistik dan Vaksin Program Imunisasi, Pemantauan Kualitas Vaksin, Surveilens Dan Imunisasi, Supervisi supportive (SS) Program imunisasi, Kesehatan Haji, Pengadaan Alat Deteksi Dini Posbindu (DBH CHT).
4. Upaya kesehatan masyarakat yang melaksanakan berbagai kegiatan antara lain Operasional Posko Publik Servis Center (PSC), Save Quarding, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), JKN, BPJS dengan capaian Tahun 2019 sebanyak 3.805 orang. Keberhasilan aspek ini didukung oleh:
 - a. Meningkatnya akses fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar baik di wilayah kecamatan daratan maupun di wilayah kecamatan kepulauan. Salah satu capaiannya adalah dengan dibangunnya Rumah Sakit Pratama di Pulau Jampea dan sejumlah puskesmas dan puskesmas pembantu di pulau-pulau lainnya;
 - b. Pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu yang merupakan program prioritas Pemerintah Kabupaten Kepulauan selayar;
 - c. Dukungan dari berbagai dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan tenaga kesehatan yang memadai dan terampil;
 - d. Ruang rawat inap yang bersih dan nyaman, mulai dari kelas III sampai kelas VIP;

- e. Meningkatnya upaya promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya.

Sasaran Strategis 12

Meningkatnya Kualitas Keluarga, Keberdayaan, dan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Sasaran strategis 12 ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat**”. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk mengukur sasaran kedua belas ini terdapat 4 (empat) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **118,12%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 12

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga	(KB) 99,00 (KS)	(KB) 72,50 (KS)	(KB) 73,23% (KS)	(KB) 99,98 (KS)	(KB) 71,17 (KS)	(KB) 71,18% (KS)

	Sejahtera	94,04	73,11	77,74%	94,31	75,65	80,21%
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	22,5	1,00	215%	25	0,26	249,74%
3	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,25	98,00	106,23%	92,50	72,67	78,56%
4	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,15	67,00	111,39%	60,40	67	110,93%
Rata-rata Capaian Kinerja				116,72%	Rata-rata Capaian Kinerja		118,12%

1. Rasio Keluarga Berencana (KB)

Rasio Keluarga Berencana adalah Perbandingan antara jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB dengan Jumlah PUS yang ada. Berdasarkan realisasi data Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Tahun 2019 dimana Rasio KB adalah 71,18%. Pada tahun 2019, cakupan akseptor KB aktif ditargetkan sebesar 14.738 (75,66%) akseptor. Dari Pus proyeksi sedangkan dari PUS lapangan yaitu 76,51% yang mencapai (102,91%) atau sebanyak 15.132 akseptor KB Aktif. Pencapaian Akseptor KB Aktif masing – masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 , dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15.1
Peserta KB Aktif menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	Peserta KB Aktif (PA)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	persenPA terhadap PUS
1	2	3	4	5
1	Pasilambena	920	1211	75,97
2	Pasimarannu	1476	1772	83,29
3	Pasimasunggu	972	1391	69,87
4	Taka Bonerate	1820	2275	80
5	Pasimasunggu Timur	732	1212	60,39
6	Bontosikuyu	1836	2337	78,56
7	Bontoharu	1436	2024	70,94
8	Benteng	2237	3059	73,12
9	Bontomanai	1431	1922	74,45
10	Buki	630	867	72,66
11	Bontomatene	1150	1646	69,86
	TOTAL	14.738	19.716	74,75

Sumber : DPP3AP2KB (Bid. Data & Info) Kab. Kep. Selayar, 2019

Dari tabel tersebut diatas, hasil pendataan dan pemuktahiran data keluarga Tahun 2019 DP3AP2KB peserta KB Aktif tertinggi adalah Kecamatan Pasimarannu mencapai 83,29% sedangkan yang terendah adalah kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 60,39%. Dari kecamatan yang ada di Kepulauan Selayar, maka kecamatan yang presentase kesertaan Ber-KB berada diatas rata-rata pencapaian kabupaten hanya 3 kecamatan yaitu: Kecamatan Pasimarannu, Kecamatan Takabonerate dan Kecamatan Bontosikuyu, sedangkan 8 kecamatan berada dibawah pencapaian kabupaten (74,21%).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terus berupaya mewujudkan slogan 2 anak cukup bagi setiap keluarga. Dan berdasarkan hasil pendataan keluarga Tahun 2019 diperoleh data bahwa rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga adalah 3,54 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu keluarga terdapat 3 – 4 jiwa yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Sehingga diasumsikan bahwa jumlah anak yang dimiliki oleh setiap keluarga di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah antara 1 – 2 orang.

Secara nasional, SDKI 2017 jumlah anak dalam satu keluarga atau lebih tepatnya disebut Total Fertility Rate (TFR) tercatat rata-rata 2,4. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka di Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun survei lain yakni Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2019 menunjukkan data yang berbeda. Menurut survei ini, TFR di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah lebih rendah dibanding TFR nasional menurut SDKI 2017 yakni 2,85.

Tingkat kesertaan ber-KB, juga cukup memuaskan. Sebanyak 76,51 persen pasangan usia subur di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah menjadi peserta KB aktif, sementara angkanya secara nasional baru mencapai 57,4 persen. Jumlah *unmet need* atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, Kepulauan Selayar mencatatkan angka terendah yakni 7,6 persen, sedangkan angka secara nasional masih 8,1 persen.

2. Rasio Keluarga Sejahtera (KS)

Rasio KS adalah perbandingan antara Jumlah KS (KS II, KS III, KS III+) dengan jumlah Keluarga yang ada berdasarkan realisasi data Perjanjian Kerja DP3AP2KB Tahun 2019 dimana Rasio KS adalah sebesar 75,65%, menunjukkan bahwa dari 100 keluarga yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 76 keluarga yang berada pada kategori Keluarga Sejahtera sedangkan 24 keluarga berada pada Pasangan Keluarga Pra S dan KS 1

(belum sejahtera). Jumlah keluarga yang ada saat ini di Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Pendataan Tahun 2019 adalah sebanyak 36.581 KK yang terdiri dari Keluarga Pra S dan KS 1 adalah 9.685 KK dan keluarga yang masih kategori KS II, KS III dan KS III+ adalah 27.674 KK.

3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kesenjangan pendapatan yang diterima tidak terlepas dari perbedaan kualitas pendidikan. European Commission (2005) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan adalah karakteristik terpenting dalam menjelaskan fenomena ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut, Mussida dan Picchio (2013) menjelaskan bahwa penurunan kesenjangan upah dalam beberapa dekade terakhir terjadi karena peningkatan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja perempuan.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Kepulauan Selayar masih relatif tinggi karena masih terjadi diskriminasi gender yang menandakan bahwa kesetaraan gender masih rendah terutama dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen, antara perempuan dan laki - laki masih timpang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perempuan dalam hal kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih belum setara dengan laki- laki. Adapun capaian Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 0,26% dari target 25 dalam RPJMD.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah karena masih lemahnya komitmen pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menerapkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Meskipun Indonesia sudah memiliki kebijakan dalam Pengarusutamaan Gender yaitu Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Surat Keputusan bersama 4 Menteri (Bappenas, Kemendagri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) untuk penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif

Gender (PPRG), namun dua kebijakan tersebut tidak lagi di terapkan secara konsisten.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam memperkuat penerapan PUG dan PPRG guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan. Beberapa solusi yang direkomendasikan oleh Koalisi Perempuan adalah:

- a. Pemerintah pusat segera menyusun Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (Stranas PUG) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat sipil, swasta dan akademisi.
- b. Pemerintah daerah menertibkan kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan menerapkannya dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pembangunan gender bertujuan untuk mewujudkan persamaan kualitas pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan. Meski masih belum menyamai laki-laki, kualitas pembangunan perempuan di Indonesia selalu menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang terkait dengan pemberdayaan gender.

Dalam menilai sejauh mana pemberdayaan gender di Indonesia, digunakan sebuah indeks komposit, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Berbeda dengan IPG, IDG lebih fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, pengambilan keputusan, dan ekonomi. Indikator ini merupakan adopsi dari Gender Empowerment Measure (GEM) yang disusun oleh UNDP. Capaian Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 adalah 72,67% dari target 92,5%, menandakan bahwa pembangunan Gender dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sudah semakin meningkat yang berarti bahwa angka harapan

hidup perempuan, angka harapan lama sekolah dan rata - rata lama sekolah juga sudah meningkat.

Indeks pembangunan gender tingginya IPG Kabupaten Kepulauan Selayar menandakan bahwa pembangunan Gender dari dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sudah semakin meningkat yang berarti bahwa angka harapan hidup perempuan, angka harapan lama sekolah dan rata - rata lama sekolah juga sudah meningkat.

5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pemberdayaan gender erat kaitannya dengan pembangunan gender. Pemberdayaan gender terjadi ketika perbaikan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan ekonomi berhasil mendorong terwujudnya pemberdayaan (Cinar, 2018). Idealnya, peningkatan pembangunan gender akan menciptakan keseimbangan pemberdayaan antara laki-laki dan perempuan. Selama ini, perempuan cenderung tertinggal di berbagai peran seperti ekonomi tenaga kerja dan pengambilan keputusan yang disebabkan oleh mengakarnya budaya patriarki. Seiring dengan meningkatnya kualitas perempuan antar waktu, yang ditandai dengan peningkatan IPG, pemberdayaan yang adil dan seimbang antara laki-laki dan perempuan diharapkan dapat terwujud. Capaian pada Tahun 2019 Indeks Pemberdayaan Gender di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 67% dari target 60,4%, ini menandakan bahwa peningkatan presentase jumlah perempuan yang berprofesi sebagai tenaga profesional dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. sementara keterlibatan perempuan diperlemen dan pengambilan keputusan cenderung menurun untuk menselaraskan antara IPG dan IDG diperlukan upaya yang berkesinambungan dengan melibatkan semua sektor dan berbagai peran, sehingga akan menjadi pedoman dalam perencanaan, penganggaran yang responsif gender (PPRG) oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB dalam pencapaian indikator adalah sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya berbagai regulasi mengenai perlindungan perempuan dan anak termasuk SPM/SPO Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
- b. Masih terbatasnya Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk belum optimalnya Operasionalisasi P2TP2A.
- c. Kurangnya komitmen OPD sebagai penentu kebijakan dalam hal penganggaran yang responsif Gender dan Anak.
- d. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat akan pentingnya berKB .
- e. Kurangnya jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana, seharusnya satu orang satu Desa, sementara yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar tidak ada Kecamatan yang cukup jumlah penyuluhnya.
- f. Adanya wilayah yang tidak mempunyai pejabat defenitif sebagai Kepala UPT Wilayah Kecamatan.

Solusi Yang dilakukan adalah :

- a. Penyusunan dan pengesahan PERDA tentang sistem Perlindungan Perempuan dan Anak termasuk perda KLA/TPPO dan Penyediaan SPM/SPO penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
- b. Penyediaan anggaran yang memadai untuk berbagai kegiatan dan program perlindungan perempuan dan anak termasuk pembiayaan yang selektif mungkin untuk mendukung operasionalisasi dan kinerja P2TP2A.
- c. Perlu adanya komitmen SKPD sebagai penentu kebijakan agar lebih meningkatkan penganggaran yang responsif gender dan anak.
- d. Peningkatan Sumber Daya Manusia setiap lapisan masyarakat.
- e. Peningkatan jumlah Penyuluh Keluarga Berencana.

Sasaran Strategis 13

Meningkatnya Kemandirian Pemuda

Sasaran strategis 13 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat**”. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran ketiga belas ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **92,25%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kemandirian pemuda adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 13

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase pemuda mandiri	100 %	92,49%	92,49%	100%	92,25%	92,25%
Rata-rata Capaian Kinerja				92,49%	Rata-rata Capaian Kinerja		92,25%

1. Pengelolaan anggaran pembangunan kepemudaan dan olahraga berbasis kinerja.

Pencapaian indikator ini diukur melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang 2012-2025 dan Stranas PPK Jangka Menengah Tahun 2012–2014 yang secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK (Transparency International, 2016).

Sebagai implementasi pelaksanaan Stranas PPK maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui tugas dan fungsinya terus berupaya mencegah terjadinya korupsi melalui penyelenggaraan kegiatan pembangunan kepemudaan dan olahraga. Langkah nyata yang telah dilakukan adalah membangun, mengembangkan, dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern terhadap pelaksanaan anggaran yang dikelola serta meningkatkan kompetensi SDM Aparat pengelola keuangan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Langkah tersebut ditempuh melalui pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Daerah. Dari upaya tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mampu melaksanakan anggaran dan menyampaikan Laporan Keuangan tepat waktu sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Nilai indeks persepsi korupsi Pada Tahun 2019 yang dihitung berdasarkan rumus yang dijelaskan dalam metodologi adalah sebesar 87,83 dari target yang ditetapkan sebesar 95 dengan persentase capaian 97,58%.

Tabel 3.16.1
Responden pada pelaksanaan Survey Persepsi Korupsi

No	Status Responden	Jumlah
1.	Aparat APIP Inspektorat KKS (orang)	10
2.	Aparat Pengelola Keuangan BPKP-AD (orang)	25
3.	Unsur Organisasi Kepemudaan (orang)	25
4.	Tokoh Masyarakat	15
	Total	75

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga, 2019

2. Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan Bahasa Asing

Dalam rangka mendukung kesuksesan pencapaian ketiga agenda strategis yaitu mewujudkan Selayar sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, mewujudkan Selayar sebagai Kawasan Distribusi Logistik Indonesia (khususnya KTI), mewujudkan Selayar sebagai Pusat Industri Perikanan Terpadu maka Dinas Kepemudaan dan Olahraga menetapkan kebijakan berupa penyiapan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan penguasaan bahasa asing. Kelompok sasaran yang dibina adalah remaja dan orang dewasa.

Dalam Tahun 2019, Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah memfasilitasi kegiatan English Park dengan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 1.238 orang terdiri dari pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum.

Tabel 3.16.2
Proporsi Remaja dan Orang Dewasa yang
memiliki
Kemampuan Bahasa asing Tahun 2019

Uraian	Jumlah
Penduduk Usia Remaja dan Dewasa	71,103 orang
Penduduk Usia Remaja dan Dewasa yang memiliki Kemampuan Bahasa Asing (Inggeris, Jerman, Prancis)	197 orang
Proporsi Remaja dan Dewasa yang memiliki Kemampuan Bahasa Asing	0.28 persen

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga, 2019

Tabel 3.16.3

Jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan yang

layak dan kewirausahaan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Proporsi Remaja dan Dewasa yang memiliki Kemampuan Bahasa Asing	0.35 persen	0.28 persen	79.16 (Kurang Baik)

Sumber: Dinas Pemuda dan Olah Raga, 2019

Rendahnya capaian kinerja pada sasaran ini, dipengaruhi oleh beberapa faktor, selain karena faktor keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan English Park, juga karena faktor lain, yaitu :

- a. Rendahnya minat masyarakat dalam mempelajari Bahasa Asing;
 - b. Terbatasnya tenaga instruktur / fasilitator yang dapat membimbing proses pembelajaran Bahasa Asing;
 - c. Kondisi geografis dimana terdapat 34 pulau yang berpenduduk dengan aksesibilitas yang berbeda-beda;
 - d. Lapangan pekerjaan yang tersedia saat ini, belum mempertimbangkan kemampuan Bahasa Asing sebagai syarat dalam proses rekrutment tenaga kerja.
3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pramuka dalam rangka melahirkan generasi muda berkarakter tangguh.
- a. Jumlah Fasilitasi Pendidikan Kepanduan

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan kegiatan kepramukaan di Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan Kursus Pembina Pramuka Mahir Dasar dan Lanjutan kerjasama Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan Kwarcab Pramuka Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan

22 september 2019 dengan jumlah peserta 45 orang. Kegiatan diatas dibiayai melalui anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar yang diperoleh melalui Bantuan Biaya Operasional Pramuka dari Dinas Kepemudaan dan Olah Raga. Dengan demikian, dari target kinerja yang ditetapkan dengan tolok ukur, jumlah peserta kursus pembina pramuka mahir dasar dan lanjutan mencapai 45 orang, capaian kinerjanya dapat direalisasikan 100%.

b. Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan Paskibraka

Pemuda yang mengikuti seleksi paskibraka tingkat kabupaten di rekrut dari sekolah menengah atas dan sederajat se kabupaten kepulauan selayar. Seleksi tersebut menghasilkan 71 paskibraka tingkat kabupaten dan 2 paskibraka tingkat provinsi. Kegiatan seleksi paskibraka tingkat kabupaten mengikuti karantina dan pemusatan latihan mulai tanggal 24 juli 2019 sampai dengan tanggal 18 agustus 2019. Sebagai apresiasi dan penghargaan bagi paskibraka tingkat kabupaten maka dilaksanakan studi wawasan purna paskibraka Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 11 oktober 2019 di kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Pemusatan latihan paskibraka utusan selayar di tingkat provinsi dilaksanakan mulai tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan 18 Agustus 2019. Sebagai bentuk penghargaan bagi purna paskibraka tingkat provinsi dilaksanakan studi wawasan purna paskibraka di Bali pada tanggal 28 Nopember sampai 30 Nopember 2019.

Gambar 1.5
Paskibraka Tahun 2019



c. Indeks Pembangunan Olahraga

Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index – SDI) adalah metode pengukuran untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga. Indeks Pembangunan Olahraga dihitung berdasarkan empat dimensi dasar dalam pembangunan olahraga, yaitu : (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, (2) sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga, (3) partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur dan (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat.

Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar menyatakan bahwa kondisi kebudayaan berolahraga di Kabupaten Kepulauan Selayar masih rendah yang dapat dilihat dari tingkat kemajuan pembangunan olahraga daerah yang hanya mencapai 13.80 pada Tahun 2019. Indeks ini dihitung berdasarkan angka indeks partisipasi, ruang terbuka, sumber daya manusia, dan kebugaran. Rendahnya kesempatan untuk beraktivitas olahraga disebabkan oleh terbatasnya lapangan dan fasilitas untuk berolahraga, lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam hal penyediaan fasilitas umum untuk lapangan dan fasilitas olahraga bagi masyarakat umum dan tempat pemukiman.

Kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga sebagai landasan untuk menjaga kualitas kesehatan sekaligus kesadaran akan budaya olahraga masih rendah yakni berkisar 75%, hanya 25% masyarakat yang sadar akan berolahraga. Data IPO 2019 menunjukkan

kondisi kebugaran masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar : 1,08% masuk dalam kategori baik sekali; 4,07% baik; 13,55% sedang; 43,90% kurang; dan 37,40% kurang sekali.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa sistem keolahragaan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar saat ini dalam kondisi yang masih kurang. Untuk itu dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas olahraga masyarakat, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2019 telah melaksanakan beberapa program, yaitu :

- Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan seni

Untuk mencapai sasaran dari program ini dilaksanakan kegiatan Lomba olahraga tradisional pelajar yang dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 10 agustus 2019 dengan jumlah peserta 350 orang yang terdiri dari cabang olahraga Acilok, a asing, akkappo, akka'daro aklonggak, dan akbendi-bendi yang dilaksanakan di lapangan pemuda benteng.

Tabel 3.16.4
Capaian Indikator Pemuda Mandiri

Indikator	Target	Capaian	Persentas e
Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	95%	87,83%	97,58%
Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan Bahasa Asing	0.35%	0.28%	79,16%
kapasitas kelembagaan pramuka dalam rangka melahirkan generasi	100%	100%	100%

muda berkaracter tangguh			
Rata-rata capaian			92,25%

Sasaran Strategis 14

Meningkatnya Prestasi Olahraga Bagi Pemuda dan Masyarakat

Sasaran strategis 14 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat**”. Sasaran ini didukung oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemuda dan Olah Raga serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk mengukur sasaran keempat belas ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **100%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 14

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	15	15	100%	15	15	100%
Rata-rata Capaian Kinerja				100%	Rata-rata Capaian Kinerja		100%

Pada Tahun 2019 dari 15 cabang olah raga yang ditargetkan baik itu berprestasi di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional dapat direalisasikan 100%. Berbagai macam event olahraga telah diikuti oleh atlit-atlit berprestasi dari Kabupaten Kepulauan Selayar baik itu bertaraf internasional, nasional dan tingkat provinsi.



Gambar 1.6.
Andi Try Sandi Saputra peraih medali emas dari cabang olah raga Sepak Takraw pada SEA GAMES ke-30 di Philipina

Untuk tingkat internasional, pada Tahun 2019 Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengirimkan 15 orang atlit berprestasi untuk mewakili Indonesia pada gelaran SEA GAMES ke-30 yang merupakan pesta olah raga terbesar di Asia Tenggara yang dilaksanakan di Philipina. Dua orang atlit yang berhasil meraih medali emas pada SEA GAMES ke-30 tersebut adalah Andi Try Sandi Saputra dari cabang olah raga Sepak Takraw dan Mahendra Yanto dari cabang olah raga Dayung. Sedangkan Miftahul Ichsan, meraih medali perak pada Asean School Games 2019 pada cabang olah raga sepak takraw.





Gambar 1.7.
Mahendra Yanto peraih medali emas dari cabang olah raga dayung pada SEA GAMES ke-30 di Philipina

Sedangkan untuk tingkat nasional, Kabupaten Kepulauan Selayar juga telah mengirim 15 orang atlit berprestasinya selama Tahun 2019 untuk mengikuti berbagai kejuaraan seperti Karate, Dayung, Atletik, Sepak Takraw, Bulu Tangkis dan Renang. Dalam ajang Kejuaraan Nasional Kualifikasi Pra PON yang dilaksanakan di Jawa Barat, atlit Kabupaten Kepulauan Selayar yang bernama Devi, berhasil meraih medali perunggu pada cabang olah raga dayung (rowing) dan lolos ke ajang Pekan Olah Raga Nasional XX yang akan dilaksanakan di Papua pada Tahun 2020.



Gambar 1.8.
Devi peraih medali
perunggu dari cabang
olah raga dayung
(rowing) pada Pra
PON Jawa Barat



Gambar 1.9.
Para atlit peraih medali
emas pada Kejuaraan
Nasional di
Jakabaring,
Palembang

Sedangkan pada tingkat provinsi, berbagai kejuaraan pun telah diikuti sepanjang Tahun 2019 seperti cabang olah raga Voli, Voli Pantai/voli pasir, Road Race, Futsal, Catur, judo, Tinju, Brigde dan Taekwondo. Dari cabang Sepak Takraw, salah seorang atlit yang bernama Riswan Ariadi Saiful dan Andi Marzuki berhasil meraih juara 1 dan Miftahul meraih juara 3 pada Kejuaraan Daerah Sepak Takraw yang dilaksanakan di Makassar. Sedangkan pada Pekan Olah Raga Pelajar Daerah (POPDA) Tahun 2019, pelajar dengan nama Arjunaidi, Febrianti Nur dan Muh. Idris masing-masing berhasil memperoleh medali perak dan perunggu.

Terhadap keberhasilan indikator ini, terdapat beberapa faktor pendukung yang sangat berperan dibalik pencapaian tersebut antara lain:

1. Proses pembinaan terhadap para atlit melalui latihan rutin yang berkualitas;

2. Telah memiliki pelatih handal yang memiliki lisensi kepelatihan dan wasit bertaraf internasional;
3. Sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pelatihan;
4. Adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Disamping itu, Dinas Kepemudaan dan olah raga terus melaksanakan berbagai macam pertandingan sebagai ajang uji coba atlit, diantaranya Trail Adventure/Road Race yang diikuti oleh beberapa kabupaten, Kejuaraan Volly Bupati Cup, Kejuaraan Atletik, Kejuaraan Bulutangkis Bupati Cup, Kejuaraan Sepak Takraw antar Klub se Kabupaten Kepulauan Selayar (PSTI) dan Kejuaraan Sepak Takraw Piala Bupati dan Ketua Tim Penggerak PKK serta Kejuaraan Sepak Bola Bupati Cup. Selain itu dilaksanakan pula lomba olah raga tradisional (permainan rakyat) dalam acara Takabonerate Island Expedition (TIE) dan pelaksanaan acara Half Marathon oleh Dinas Kepariwisata dengan 5 negara sebagai pesertanya.

Sasaran Strategis 15

Meningkatnya Aksesibilitas Dari dan Ke Kepulauan Selayar

Sasaran strategis 15 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Dinas Perhubungan. Untuk mengukur sasaran kelima belas ini terdapat 3 (tiga) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **82,39%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.18
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 15

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat	(35%) 240 unit	(24,96%) 172 unit	71,67%	(41%) 280 Unit	(24,67%) 170	60,71%
2.	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut	(12%) 60 buah	(10,56%) 55 buah	91,67%	(13 %) 70 Bh	(12,09%) 63	90%
3.	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara	(50%) 624 buah	(55,44%) 693 buah	111,06%	(56 %) 704 Bh	(54,32%) 679	96,45%
Rata-rata Capaian Kinerja				91,47%	Rata-rata Capaian Kinerja		82,39%

1. Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat

Pencapaian pada indikator ini adalah sebesar 71,67% yang didapatkan dari hasil perhitungan dari hasil yang dicapai dan target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019, dimana dari 280 unit sarana transportasi darat yang ditargetkan terealisasi sebanyak 170 unit transportasi darat yang beroperasi selama Tahun 2019. Capaian ini diperoleh dari berapa banyak angkutan melakukan uji KIR di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2018, terlihat mengalami penurunan nilai capaian dari 172 unit dengan persentase sebesar 71,67% menjadi 170 unit dengan persentase sebesar 60,71% capaian target pada Tahun 2019. Hal ini terjadi disebabkan karena beberapa hambatan sebagai berikut :

- 1) Tidak adanya fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor yang memadai sesuai standar.
- 2) SDM aparat petugas penguji kendaraan bermotor yang masih kurang berpengalaman.

- 3) Masih banyaknya sopir angkutan umum yang belum sadar akan pentingnya memiliki SIM umum.
- 4) Razia/operasi yang digelar belum menyentuh kesadaran pengemudi angkutan umum.

Adapun rekomendasi untuk perbaikan di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi kepada operator kendaraan tentang pentingnya keselamatan transportasi baik bagi penumpang maupun awak kendaraan itu sendiri.
- b. Meningkatkan pengawasan di lapangan, bekerja sama dengan stake holder terkait, seperti Satlantas Polres Kepulauan Selayar.
- c. Mendorong pihak terkait guna memberlakukan sanksi maksimal bagi siapaun operator kendaraan umum yang tidak memiliki SIM umum, tidak memiliki kendaraan yang laik jalan sesuai rekomendasi Pengujian Kendaraan Bermotor dan tidak memiliki kelengkapan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan angkutan barang.
- d. Mengupayakan agar secepatnya diadakan fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor sesuai standar.

2. Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut

Pencapaian pada indikator ini adalah sekitar 90% yang diperoleh dari gambar 3.6. Pelabuhan Laut yang dicapai yaitu sebanyak 63 unit dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 70 unit kapal laut angkutan penumpang dan barang yang beroperasi di perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2019. Sedangkan pencapaian pada Tahun 2018 adalah sekitar 91,67% dengan realisasi capaian 55 unit kapal laut angkutan penumpang dari 60 unit kapal laut yang ditargetkan . Dari capaian tersebut terjadi penurunan realisasi capaian kinerja yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:

mbar 3.6. Pelabuhan Laut

- 1) Sejak Tahun 2018 Kabupaten Kepulauan Selayar sudah masuk dalam rute pelayaran Tol Laut melalui Kapal Kendhaga Nusantara 4 yang merupakan program dari pemerintah pusat dalam upaya peningkatan perekonomian daerah dengan pemerataan harga kebutuhan masyarakat sampai ke daerah pinggiran.
- 2) Adanya 1 (satu) unit kapal angkutan penumpang atau kapal rakyat bantuan dari Kementerian Perhubungan yaitu KM. Banawa Nusantara yang diperuntukkan untuk melayani pelayaran ke wilayah kepulauan dari Pelabuhan Benteng.
- 3) Meningkatnya pembangunan infrastruktur perhubungan terutama di bidang perhubungan laut seperti pelabuhan laut yang sudah ada di tiap kecamatan kepulauan serta pembangunan tambatan perahu yang hampir sebagian desa di wilayah kepulauan sudah memiliki tambatan perahu sebagai tempat sandar dan bongkar muat penumpang maupun barang.
- 4) Koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang sangat memperhatikan pembangunan di daerah terutama daerah-daerah terpencil. Dari hasil koordinasi tersebut diperoleh bantuan armada angkutan laut 1 (satu) unit dan rute pelayaran perintis yang masih diperpanjang sejak Tahun 2018.
- 5) Berkembangnya sektor-sektor lain seperti perikanan, perkebunan, perdagangan, pertanian, pariwisata, dan sebagainya yang mendorong semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga meningkatkan kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pokok yang tentunya hal ini mendorong pula meningkatnya pengusaha-pengusaha angkutan laut.

Tabel 3.18.1
Data Kapal Angkutan Tahun 2018 – 2019

No	Bulan	Kunjungan	Baran	Barang (ton)		Penumpang	
				Muat	Lanjutan	Turun	Naik

		Kapal	g (ton)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2017	1.369	269.948	39.900	8.758.021	1.564	1.500
2	2018	1.368	5.173.692	17.551	1.086.073	3.307	2.444
3	2019	1.316	40.757	11.616	3.964	5.150	1.803
Jumlah		4.053	5.484.397	69.067	9.848.058	10.021	5.747

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

Gambar 1.10
Kapal Rakyat KM Banawa Nusantara 9 Bantuan dari



Gambar 1.11
KM Sabuk Nusangtara 85
Rute Makassar-Bantaeng-Bulukumba-Selayar-Maumere NTT (PP)



3. Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara

Pencapaian indikator ini adalah sebesar 96,45% yang diperoleh dari realisasi Tahun 2019 sebanyak 679 flight dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 704 flight keberangkatan pesawat udara melalui Bandar Udara H. Aroeppala Kabupaten Kepulauan Selayar. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pencapaian kinerja ketersediaan moda transportasi udara mengalami penurunan sekitar 14,61% penerbangan. Hal tersebut terlihat dimana pada Tahun 2018 capaian target sebesar 111,06% dengan jumlah penerbangan sebanyak 693 dari 624 flight yang ditargetkan.

Salah satu penyebab menurunnya capaian kinerja pada moda transportasi udara adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil keputusan rapat management pusat PT. Garuda Indonesia per tanggal 24 januari sampai tanggal 30 maret 2019, mengalihkan semua pesawat jenis ATR Garuda Indonesia ke anak perusahaannya yaitu Citilink, sehingga untuk sementara tidak ada penerbangan Makassar-Selayar-Makassar.
2. PT. Trans Nusa Aviation Mandiri atau Trans Nusa telah menutup penerbangan Rute Makassar-Selayar-Makassar sejak 19 Desember 2019.

Adapun langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk mengatasi kendala tersebut adalah:

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan kunjungan ke PT. Garuda Indonesia untuk membicarakan kemungkinan dibukanya kembali rute Makassar-Selayar-Makassar yang disambut positif oleh pihak PT. Garuda Indonesia dan berjanji bahwa setelah pergantian direksi, anak perusahaan PT. Garuda Indonesia, Citilink berencana akan melayani rute Makassar-Selayar PP.
2. Bupati Kepulauan Selayar telah melaksanakan koordinasi dengan pihak maskapai Wings Air, sehingga jadwal penerbangan Wings Air yang selama ini hanya satu kali dalam sehari menjadi dua kali sehari dari Bandara Internasional Hasanuddin Makassar ke Bandara H. Aroepala Selayar. Diharapkan dengan penambahan jadwal penerbangan ini, akan memperlancar wisatawan dan masyarakat ulang-alik ke Selayar melalui jalur udara.

Gambar 1.12
Maskapai Penerbangan yang melayani Makassar – Selayar (PP)



Sasaran Strategis 16

Meningkatnya Kapasitas Infrastruktur Dasar

Sasaran strategis 16 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata**”. Sasaran ini didukung oleh beberapa SKPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bersama dengan Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk mengukur sasaran keenam belas ini terdapat 4 (empat) program pembangunan daerah yang terdiri dari 20 (dua puluh) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **76,93%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan kapasitas infrastruktur dasar adalah sebagai berikut:

16.1. Program Peningkatan Kapasitas infrastruktur Perhubungan dan Transportasi

Tabel 3.19.1
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jalan lingkaran timur utara terbangun (%)	72,96	19,80	27,14%	94,95	0	0%
2.	Jalan lingkaran timur tengah terbangun (%)	78,45	0	0	85,55	0	0%
3.	Jalan lingkaran timur selatan		60,46	92,16%	82,18	0	0%

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	terbangun (%)	65,60					
4.	Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)	70,00	33,57	47,96%	75,00	78,47	104,63%
5.	Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	(67%) 2 buah	3 buah	150%	100 % 3 Bh	3 buah	100 %
6.	Berfungsinya Bandara Kayuadi	Study KKOP dan amdal	Tidak terealisasi	0%	8 Pemb. Fisik sisi darat dan Udara	Tidak terealisasi	0%
7.	Jumlah Pelabuhan Laut (%)	(65%) 13 buah	7 buah	54%	(75 %) 15 Bh	7 buah	47%
8.	Perluasan terminal angkutan darat (%)	(65%) 80	(40%) 50	63%	(73 %) 90	(40%) 50	56%
9.	Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)	(67%) 4 buah	(50%) 3 buah	75%	83% 5 Bh	(50%) 3 buah	60%
Rata-rata Capaian Kinerja				77,22%	Rata-rata Capaian Kinerja		73,53%

1. Jalan lingkaran timur utara terbangun

Salah satu indikator kinerja peningkatan kapasitas infrastruktur dasar adalah terbangunnya jalan lingkaran timur utara. Namun untuk capaian indikator ini sejak awal RPJMD Tahun 2016 sampai Tahun 2019 dimana telah memasuki tahun ke empat, jalan lingkaran timur utara yang terbangun masih tetap sepanjang 3,90 km dari 19,70 km (19,80%). Jalan yang telah terbangun adalah Lembangia - Langsangereng, Tanaera – Lembangia dan Patori – Tanaera yang dibangun pada Tahun Anggaran 2018 yang lalu.

Untuk Tahun 2019, tidak terdapat anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan jalan lingkaran timur utara dikarenakan sesuatu hal sehingga tidak ada capaian untuk indikator ini.

2. Jalan lingkaran timur tengah terbangun

Indikator kinerja lainnya untuk peningkatan kapasitas infrastruktur dasar adalah terbangunnya jalan lingkaran timur tengah. Tidak jauh beda dengan pembangunan jalan lingkaran timur utara, untuk indikator terbangunnya jalan lingkaran timur tengah, sejak awal RPJMD Tahun 2016 sampai Tahun 2019 dimana telah memasuki tahun ke empat, pembangunan untuk indikator ini masih belum terlaksana disebabkan karena belum adanya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan indikator tersebut. Hal ini disebabkan karena data Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tidak sesuai dengan data Kementerian Pekerjaan Umum, maka kegiatan yang terkait dengan pembangunan jalan lingkaran timur tengah belum pernah dilaksanakan. Atau dengan kata lain, realisasi pembangunan jalan lingkaran timur tengah masih tetap sama dengan posisi awal RPJMD, yaitu tahap pembukaan jalan lingkaran timur tengah.

3. Jalan lingkaran timur selatan terbangun

Selain terbangunnya jalan lingkaran timur utara dan jalan lingkaran timur tengah, dibangun juga jalan lingkaran timur selatan yang terletak di kecamatan Bontosikuyu yaitu pembangunan ruas jalan Jammeng – Maja-Maja, namun karena ruas tersebut telah dialihkan ke jalan Provinsi sesuai Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1159/IV/Tahun 2018 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi Sulawesi Selatan dan anggaran untuk ruas Jammeng – Maja Maja dialihkan ke ruas Peningkatan jalan dalam kota Onto dan Pengaman Tebing Sungai Tulang karena telah terjadi longsor dan sudah masuk ke

badan jalan. Oleh karena itu untuk Tahun 2019 tidak ada capaian untuk indikator ini dan luas Jalan lingkaran Timur Selatan kabupaten Kepulauan Selayar yang terbangun sampai Tahun 2019, masih tetap sepanjang 29,20 km dari 48,30 km (60,46%) yaitu sepanjang jalan Ngapaloka - Jammeng, Maja - Maja – Jammeng Patumbukang - Batu goreng dan Komba – Maja - Maja.



Gambar: 1.13
Kondisi jalan di
Kecamatan Bontosikuyu

4. Tingkat pemenuhan jaringan jalan

Tabel 3.19.1.1
Data kondisi jalan

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	75,00	78,47	104,63
2	Panjang Jalan dilalui roda 4	548,81 km	824,79 km	150,29%
3	Kawasan Permukiman Penduduk (minimal dilalui roda 4)	548,81 km	615,43 km	112,14%
4	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (40 km/jam)	548,81 km	615,43 km	112,14%
5	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan	14.417 meter	16.443 meter	114,05%

air (minimal 1,5m)			
--------------------	--	--	--

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2019

Tabel 3.19.1.2
Daftar jalan menurut keadaan dan status jalan dalam kilometer
Tahun 2019

Keadaan	Status jalan			
	Jalan Provinsi		Jalan Kabupaten	
	2018	2019	2018	2019
I. JENIS PERMUKAAN				
a. Diaspal			454,52	
b. Beton			8,86	
c. Kerikil			136,31	
d. Tanah			225,10	
e. Tidak dirinci			-	
Jumlah			824,79	
II. KONDISI JALAN				
a. Baik			260,61	233,10
b. Sedang			94,99	102,90
c. Rusak			120,58	279,43
d. Rusak Berat			348,61	252,17
Jumlah			824,79	867,60

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2019

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dapat merealisasikan indikator kinerja sesuai target yang ditetapkan dengan dukungan berbagai pihak terkait dan alokasi anggaran yang memadai. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang antara lain sebagai berikut:

- a. program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan dengan panjang jalan yang telah selesai direhabilitasi pada Tahun 2019 adalah sepanjang 3.129 meter, sedangkan jembatan sepanjang 9,8 meter.

- b. Program peningkatan jalan kabupaten sepanjang 19.425,9 meter ditambah 13.663 meter dengan anggaran yang berasal dari DAK.
- c. Program pembangunan infrastruktur pedesaan dengan panjang jalan desa yang terbangun adalah 22.215,88 meter.

Tabel 3.19.1.3
Pembangunan infrastruktur pedesaan

No.	Uraian	Realisasi (Meter)				Total (meter)
		2016	2017	2018	2019	
1	Pembangunan dan peningkatan Jalan Desa	40.271,4	28.254	64.187,6	22.215,88	154.928,88

Sumber data: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2019

5. Kapasitas Bandara Aroepalla

Indikator kapasitas Bandara Aroepalla dapat diukur dari daya tampung *apron* (terminal pesawat) yang dalam hal ini terkait berapa unit pesawat yang mampu ditampung *apron* (terminal pesawat) Bandara Aroepalla . Pada Tahun 2019 realisasi capaian kinerja untuk indikator ini mencapai 100% dimana *apron* (terminal pesawat) Bandara Aroepalla mampu menampung pesawat sebanyak 3 unit pesawat jenis ATR sesuai dengan yang ditargetkan.

Selain itu perluasan terminal pesawat yang merupakan standar ukuran capaian kinerja kapasitas Bandara Aroepalla, pada Tahun 2019 juga dilakukan pengembangan terminal penumpang dengan kegiatan pembangunan gedung baru terminal penumpang. Sebelumnya terminal penumpang masih merupakan bangunan lama sejak Bandara Aroepalla pertama dibangun. Terminal penumpang yang lama sudah tidak mampu lagi menampung kapasitas penumpang pengguna jasa Bandara Aroepalla dan seluruh aktifitas petugas bandara seperti *checking counter*, pemuatan bagasi, pemeriksaan keamanan, boarding dan sebagainya. Dengan adanya pembangunan terminal penumpang yang baru,

penumpang akan merasa lebih nyaman karena kondisi terminal yang lebih luas.

Faktor yang menjadi penyebab peningkatan capaian indikator kinerja peningkatan kapasitas Bandara Aroeppala tersebut antara lain karena :

- 1) Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menggunakan jasa transportasi udara, hal ini terlihat dari peningkatan produktifitas penumpang pada Bandara Aroeppala dari tahun ke tahun.
- 2) Bertambahnya frekuensi penerbangan yang selama ini hanya satu kali dalam satu hari menjadi dua kali dengan jenis pesawat yang sama yaitu pesawat ATR.

Gambar 1.14
Area Parkir Pesawat (*Apron*) Bandara H. Aroeppala



6. Berfungsinya Bandara Kayuadi

Capaian indikator berfungsinya Bandara Kayuadi dapat dilihat dari sejauh mana proses pembangunan Bandara Kayuadi mulai dari proses study, pembangunan fisik sampai dapat difungsikannya. Pada Tahun 2019 target capaian berupa terlaksananya pembangunan fisik sisi darat dan udara, namun sama dengan tahun sebelumnya target capaian indikator yang ditetapkan tidak dapat terealisasi.

Tidak tercapainya indikator berfungsinya Bandara Kayuadi sebagaimana pada tabel di atas disebabkan oleh :

- 1) Terkendala belum adanya Peraturan Menteri Perhubungan terkait penetapan lokasi dimana ini merupakan salah landasan hukum yang menjadi dasar acuan untuk pelaksanaan tahapan proses pembangunan Bandara Kayuadi mulai dari proses study, pembangunan fisik sampai tahap fungsional.
- 2) Kementerian Perhubungan mengutamakan untuk lebih fokus terlebih dahulu pada pengembangan Bandara H. Aroepala sebagai salah satu fasilitas penting dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar ke depan.

7. Jumlah Pelabuhan Laut

Capaian kinerja jumlah pelabuhan laut sejak awal periode RPJMD tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 7 (tujuh) unit. Hanya pada persentase capaian yang mengalami penurunan dikarenakan jumlah capaian yang ditargetkan setiap tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 capaian indikator ini hanya sekitar 46,67% dari 75% yang ditargetkan, yang diperoleh dari jumlah pelabuhan laut yang terbangun yaitu sebanyak 7 unit pelabuhan dibagi dengan target yang ditetapkan sebanyak 11 unit pelabuhan laut. Adapun hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 54% menjadi 46,67% dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Untuk membangun pelabuhan laut membutuhkan waktu yang lama karena harus melalui beberapa tahapan. Tahapan awal membutuhkan beberapa study yang menentukan apakah pembangunan pelabuhan laut pada wilayah tersebut layak untuk dilaksanakan.
- 2) Pelabuhan laut yang ada saat ini dapat dikatakan sudah dapat mewakili kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan karena pada

setiap kecamatan sudah memiliki pelabuhan laut, sehingga APBD bisa dimaksimalkan untuk pembangunan di sektor lain yang lebih penting.

- 3) Biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan laut yang sangat besar sehingga untuk membiayai pembangunan pelabuhan laut sangat diharapkan adanya bantuan dari dana APBN.

Gambar 1.15
Pelabuhan Penyeberangan Pamatata



Tabel 3.19.1.4
Data Pelabuhan Laut Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Nama Pelabuhan	Lokasi
1.	Pelabuhan Laut Pamatata	Pamatata Kec. Bontomatene
2.	Pelabuhan Laut Benteng	Benteng Kec. Benteng
3.	Pelabuhan Laut Jampea	Benteng Jampea Kec. Pasimasunggu
4.	Pelabuhan Laut Kayuadi	Kayuadi Kec. Takabonerate
5.	Pelabuhan Laut Jinato	Jinato Kec. Takabonerate
6.	Pelabuhan Laut Bonerate	Bonerate Kec. Pasimarannu
7.	Pelabuhan Laut Kalaotoa	Kalaotoa Kec. Pasilambena

Walaupun demikian, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melaksanakan berbagai upaya untuk menambah jumlah pelabuhan laut, antara lain dengan melaksanakan:

1. Penyusunan Kajian Studi Pulau Madu dan Pulau Rajuni dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2.000.000.000,00 sebagai tahapan dalam pembangunan pelabuhan laut di Pulau Rajuni dan Pulau Madu.
2. Penyusunan Kajian Studi Pulau Tambolongan yang terdiri dari Feasibility Study (FS), Study Investigasi dan Design (SID), Rencana Induk Pelabuhan (RIP), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari Kegiatan Study Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dengan anggaran Rp. 1.400.000.000,00 sebagai tahapan dalam pembangunan pelabuhan laut di Pulau Tambolongan.
3. Dilaksanakannya Studi Pembangunan Dermaga Plengsengan di 4 (empat) Kec. Kepulauan (Kec. Takabonerate, Kec. Pasimasunggu, Kec. Pasimarannu dan Kec. Pasilambena) dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,00.
4. Dilaksanakannya DED Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang dengan alokasi dana dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Perluasan terminal angkutan darat

Capaian indikator perluasan terminal angkutan darat pada Tahun 2019 adalah sebesar 56% atau sebanyak 50 unit kendaraan angkutan dari 90 unit kendaraan angkutan yang ditargetkan mampu ditampung di area parkir Terminal Angkutan Darat Benteng. Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 nilai capaian kinerja perluasan terminal angkutan darat tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 50 unit kendaraan angkutan, namun mengalami penurunan persentase capaian dari 63% menjadi 56% atau turun sebesar 7%.

Belum adanya peningkatan nilai capaian indikator perluasan terminal angkutan darat tersebut disebabkan antara lain :

- 1) Belum maksimalnya fungsi terminal angkutan darat Benteng sebagai fasilitas bongkar muat penumpang, dimana masih banyak kita jumpai angkutan pedesaan yang melakukan bongkar muat penumpang disembarang tempat seperti pasar, tempat pelelangan ikan dan sebagainya.
- 2) Jika dilakukan pengembangan terhadap terminal angkutan darat yang ada sekarang, akan berdampak pada peningkatan tipe terminal dari tipe C ke tipe B. Jika terjadi peningkatan ke tipe B maka secara otomatis pengelolaan Terminal Angkutan Darat Benteng diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.
- 3) Jika dilakukan pengembangan terhadap terminal angkutan darat yang ada sekarang, akan berdampak pada peningkatan tipe terminal dari tipe C ke tipe B. Jika terjadi peningkatan ke tipe B maka secara otomatis pengelolaan Terminal Angkutan Darat Benteng diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.

Gambar 1.16
Area Parkir dan Peron Kedatangan/Keberangkatan
Terminal Angkutan Darat Benteng





9. Jumlah pelabuhan penyeberangan

Persentase capaian kinerja pada Tahun 2019 sebesar 60% dengan nilai capaian jumlah pelabuhan penyeberangan sebanyak 3 unit dari target sebanyak 5 unit. Jika dibandingkan dengan capaian indikator pada Tahun 2018 sebesar 75%, maka pada tahun ini realisasi capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 15%. Hal ini disebabkan karena jumlah pelabuhan penyeberangan yang terbangun sampai Tahun 2019 adalah sebanyak 2 (dua) pelabuhan, yang ditambah 1 (satu) unit pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan plensengan yang dibangun pada pelabuhan pamatata sebagai alternatif tempat sandar kapal ferry saat pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi *Moveable Bridge* (MB) Pelabuhan Penyeberangan Pamatata.

Peningkatan capaian kinerja Jumlah Pelabuhan Penyeberangan disebabkan oleh adanya pembangunan pelabuhan plensengan pada Pelabuhan Pamatata sebagai jembatan penyeberangan alternatif saat berjalannya proses pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi *Moveable Bridge* (MB) Pelabuhan Penyeberangan Pamatata. Pelabuhan plensengan tersebut dapat dimanfaatkan seterusnya setelah selesainya proses

pelaksanaan kegiatan rehabilitasi MB tersebut. Kita patut bersyukur dengan adanya kegiatan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Pamatata karena selain perbaikan MB juga disertai dengan pembangunan sarana prasarana lain seperti, gedung kantor, mushollah, toilet dan kios.

Selain pelabuhan Penyeberangan Pamatata, terdapat satu lagi pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang yang menghubungkan daratan Selayar dengan wilayah kepulauan dan wilayah timur Indonesia seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain pembangunan wilayah daratan tentunya diharapkan adanya pemerataan pembangunan terutama di kepulauan, sehingga diharapkan pada wilayah kepulauan terdapat juga pelabuhan penyeberangan terutama pada ibu kota kecamatan. Namun, sampai saat ini apa yang diharapkan tersebut belum dapat terealisasi. Hal tersebut disebabkan oleh :

- 1) Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan pelabuhan penyeberangan, sehingga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sangat berharap adanya bantuan dana dari Pemerintah Pusat melalui dan APBN.
- 2) Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan harus melalui beberapa tahap antara lain sebelum pembangunan fisik harus melalui beberapa studi kelayakan yang harus dibiayai sendiri oleh pemerintah daerah. Untuk itu, pada Tahun 2019 telah dilaksanakan dan dibagi menjadi 4 (empat) lokasi sehingga lebih menghemat waktu.

Tabel 3.19.1.5
Data Pelabuhan Penyeberangan dan kunjungan kapal

No.	Pelabuhan Penyeberangan	Kunjungan Kapal			Ket.
		2017	2018	2019	
1.	Pelabuhan Penyeberangan Pamatata	737	840	768	
2.	Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang	97	92	122	
Jumlah		834	932	990	



Pattumbukang



16.2. Prog

Tabel 3.19.2
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio jaringan irigasi	70,00	84,49	120,07%	75,00	91,87	122,50%
2.	Rasio ketersediaan air baku	86,00	78,04	90,74	90,00	81,03	90,04%
Rata-rata Capaian Kinerja				105,41%	Rata-rata Capaian Kinerja		106,27%

1. Rasio Jaringan Irigasi

Dari uraian tabel di atas tergambar bahwa indikator kinerjanya dapat terlaksana melebihi target yang direncanakan, hal ini disebabkan karena alokasi dana untuk pelaksanaan program melebihi dari dana yang

diusulkan sehingga target terlampaui. Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Pada Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menargetkan luas daerah irigasi yang dapat dialiri jaringan irigasi dalam kondisi baik seluas 808,5 m dan dapat terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian realisasi panjang jaringan irigasi yang telah dibangun sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 adalah sepanjang 29.457,5 meter.

Keberhasilan pelaksanaan program ini ditujukan untuk mendukung upaya mempertahankan kemandirian di bidang pangan, khususnya beras, dan peningkatan produksi pertanian lainnya, dengan tersedianya prasarana irigasi yang memadai.

Tabel 3.19.2.1
Rasio Jaringan Irigasi

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Rasio jaringan irigasi	70,00%	84,49%	120,07%
2	Luas daerah irigasi dalam kondisi baik	78,74%	84,94%	108,25%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2019

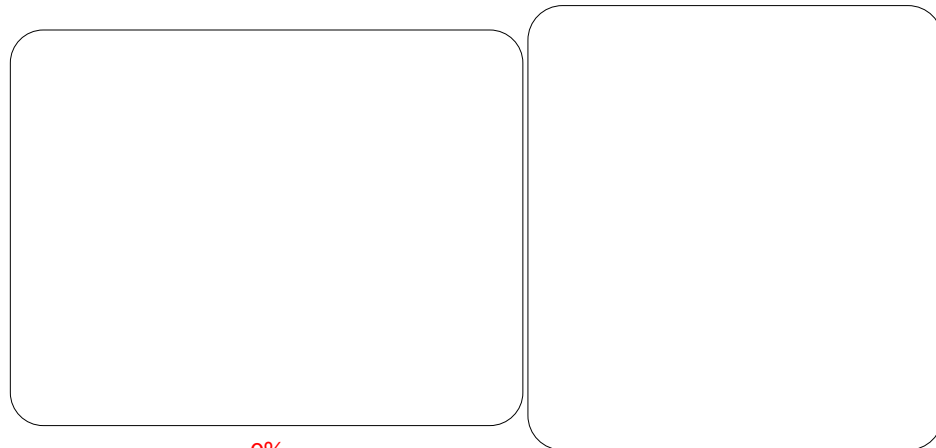
Gambar 1.18: Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bolu-Bolu

2. Rasio ketersediaan air baku

Permasalahan yang timbul pada sumber air permukaan dan sumber air non permukaan yaitu pada musim kemarau jumlah air permukaan yang mengalir sangat kecil karena air permukaan yang mengalir merupakan air buangan maupun air tanah yang keluar ke dalam saluran. Sebaliknya pada musim hujan, jumlah air yang dialirkan sangat besar yang berasal dari air hujan yang melimpah. Hal ini berpotensi menimbulkan banjir, karena penampang saluran yang terbatas dan banyak material yang menghambat aliran air dalam saluran, seperti sampah dan tanaman.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber air permukaan ini adalah: pengaturan aliran, perlindungan daerah tangkapan air, pengaturan tata ruang, melakukan proteksi dan konservasi daerah recharge dan lokasi sumber air baku potensial, dukungan regulasi/kebijakan dari pemerintah, menerapkan teknologi daur pakai air, menerapkan manajemen pengelolaan dan pemanfaatan air, studi lebih detail identifikasi potensi sumber air baku. Sedangkan untuk sumber air non permukaan: menampung dan menyalurkan air ke dalam akifer melalui bangunan tertentu, menghambat air permukaan supaya meresap ke dalam tanah dan mengatur penggunaan air secara optimal. Untuk menjamin ketersediaan air tanah untuk masa mendatang maka pengaturan pemanfaatan air tanah harus dilakukan. Dalam hal ini sangat diperlukan peraturan yang tegas, jelas dan mengikat terhadap pemanfaatan air tanah itu sendiri.

Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku melalui pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang pada Tahun 2019 telah membangun 1 unit bangunan air. Program lainnya adalah pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya melalui pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya yang pada tahun ini telah membangun 2 unit penampungan air.



Gambar 1.19: Prasarana Air Baku Buhung Se'la
0% 100%

16.3. Program Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Tabel 3.19.3
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	95,05	73,41	77,23%	96,77	74,65	77,14%

2.	Rasio ketersediaan air bersih industri (%)	100	0	0	100	0	0%
3.	Rumah layak huni (%)	(87,19) 1250 unit	983 unit	78,64%	(90,38) 1.250 Unit	621 Unit	49,68%
4.	Cakupan sanitasi layak (%)	94,50	69,17	73,20%	100	72,77	72,77%
5.	Kawasan pemukiman kumuh tertangani (%)	(40) 220 Ha	3,90 Ha	1,77%	(60) 220 Ha	9,69 Ha	4,40%
Rata-rata Capaian Kinerja				74,21%	Rata-rata Capaian Kinerja		51%

1. Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga

Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga pada Tahun 2019 adalah 74,65 dari target 96,77. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2018 yang hanya sebesar 73,41, maka capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,24%. Untuk mencapai indikator tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2019 melaksanakan berbagai program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dengan kegiatan seperti pendampingan program PANSIMAS, pembangunan sarana dan prasarana air bersih serta pembangunan sarana air bersih dan pemasangan sambungan jaringan air bersih ke rumah (SR) yang merupakan program hibah air minum perdesaan dimana Tahun 2019 ini diberikan kepada 5 (lima) kecamatan yaitu Desa Bontosaile Kecamatan Pasimasunggu sebanyak 59 SR (Sambungan Rumah), Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu sebanyak 234 SR, Desa Bontokoraang Kecamatan Bontomanai sebanyak 110 SR, Desa Kohala Kecamatan Buki sebanyak 78 SR dan Desa Onto sebanyak 135 SR dengan total sambungan air bersih kerumah sebanyak 616 SR.

Belum maksimalnya pencapaian kinerja indikator ini disebabkan

karena masih adanya kendala yang dihadapi seperti:

- a. Jauhnya jarak dari sumber air bersih ke rumah penduduk dengan lokasi yang bergunung-gunung dan curam sehingga menyulitkan dalam pendistribusian dengan menggunakan mesin pompa;
- b. Kualitas air yang berbeda dengan instalasi di kampung satu dengan kampung lainnya sehingga dibutuhkan pengolahan yang berbeda-beda;
- c. Kurangnya sumber air di daerah tersebut.

2. Rasio ketersediaan air bersih industri

Sama halnya dengan tahun sebelumnya, pada Tahun 2019 tidak ada realisasi yang dicapai untuk rasio ketersediaan air bersih industri disebabkan karena belum adanya anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan indikator tersebut.

3. Rumah layak huni

Pada Tahun 2019, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang terdapat di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, baik di wilayah daratan maupun wilayah kepulauan adalah sebanyak 7.734 unit dari total 32.326 jumlah rumah keseluruhan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jumlah ini berdasarkan hasil pendataan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan rincian rumah tidak layak huni sebagai berikut:

Tabel 3.19.3.1
Jumlah Keluarga Miskin dengan Rumah Tidak Layak Huni
Tahun 2019

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KK	KK RTLH *)	%
1	Bontomatene	3.949	769	19,47
2	Buki	1.922	305	15,86
3	Bontomanai	3.846	711	18,48
4	Benteng	5.461	525	9,61
5	Bontoharu	3.768	915	24,28
6	Bontosikuyu	4.333	1102	25,43
7	Pasimasunggu	2.404	553	22,17
8	Pasimasunggu Timur	2.177	549	25,21
9	Takabonerate	3.536	980	27,71
NO.	KECAMATAN	JUMLAH KK	KK RTLH *)	%
10	Pasimarannu	3.084	704	22,82
11	Pasilambena	2.101	621	29,55
	Jumlah	36.581	7.734	21,14

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2019

Pada Tahun 2017, jumlah rumah tidak layak huni yang telah ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebanyak 308 unit. Sedangkan Tahun 2018, jumlah rumah tidak layak huni yang telah tertangani sebanyak 434 unit sedangkan Tahun 2019 jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani adalah sebanyak 539 unit dengan rincian 139 unit rumah ditangani melalui anggaran dana alokasi khusus (DAK), 200 unit rumah ditangani melalui Program BSPS reguler dan 200 unit rumah melalui Program BSPS Strategi. Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dengan kegiatan :

- Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi dan Pendataan RTLH

- Verifikasi Data RTLH Secara Berkala di Kabupaten Kepulauan Selayar
- Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (DAK)
- Peningkatan Peran Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Pendampingan Program BSPS
- Pendampingan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya

Untuk mewujudkan indikator tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terus berupaya setiap tahunnya untuk memperoleh bantuan dana APBN melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) baik reguler maupun strategi seperti tahun ini. Diharapkan juga kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran lebih besar lagi kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun berikutnya agar supaya dapat mencapai target sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Sedangkan Dinas Sosial melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan membantu masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni juga telah melaksanakan program RTLH dan menangani sebanyak 549 unit rumah pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebanyak 82 unit rumah.

Tabel 3.19.3.2
Capaian Rumah Layak Huni Tahun 2017 – 2019

Indikator	Instansi	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Rumah layak huni	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	308 unit	434 unit	539 unit
Rumah layak huni	Dinas Sosial	-	549 unit	82 unit
Jumlah		308 unit	983 unit	621 unit

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2019

Dari data tersebut diatas, dipastikan bahwa dari 7.734 jumlah rumah tidak layak huni yang terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2019, yang telah mendapatkan penanganan dari pemerintah daerah adalah sebanyak 621 unit rumah

atau hanya sekitar 8,03% dari jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni yang terdapat diseluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, atau dengan kata lain masih terdapat 7.113 rumah tidak layak huni di Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain:

1. Kurangnya SDM atau tenaga teknis
2. Adanya fluktuasi harga
3. Beberapa kali terjadi Pergantian pejabat (PPK), Sehingga dokumen kelengkapan berkas juga d buat beberapa kali
4. Ketersediaan bahan baku yang terlambat dari pemasok atau rekanan
5. Biaya operasional yang masih kurang.

Adapun saran perbaikan dalam rangka pencapaian indikator sesuai target yang telah ditentukan adalah:

1. Diharapkan adanya dukungan kebijakan di bidang perumahan yang memadai;
2. Peningkatan Koordinasi dan penataan kelembagaan dibidang perumahan;
3. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan;
4. Perlunya kejelasan arah kebijakan tentang Pengembangan Perumahan.

4. Cakupan sanitasi layak

Ketersediaan sanitasi yang layak merupakan upaya menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam kawasan pemukiman, salah satu cara dengan pembangunan drainase pada tempat tersebut. Pada Tahun 2019, realisasi yang dicapai untuk indikator cakupan sanitasi layak adalah sebesar 72,77 dari target 94,50 dengan persentase capaian

sekitar 81,31%. Capaian ini mengalami peningkatan dibanding Tahun 2018 dimana realisasi yang dicapai untuk indikator cakupan sanitasi layak adalah sebesar 69,17 dari target 85,97 dengan persentase capaian sekitar 80,46%. Sedangkan pada Tahun 2019 berfungsinya saluran drainase dalam kondisi baik adalah sebesar 95% dari target 93% dengan persentase capaian sekitar 102,15%. Cakupan ini mengalami sedikit penurunan dibanding Tahun 2018 lalu yang mencapai 95% dari target 85,97% atau sekitar 106,75%.

Adapun faktor yang mendukung pencapaian indikator ini adalah keberhasilan pelaksanaan program Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase dan Air Limbah dengan kegiatan pembangunan drainase dan air limbah yang pada Tahun 2019 telah membangun drainase sepanjang 3.600 meter serta kegiatan infrastruktur sanitasi yang telah melayani 650 KK pada tahun ini.

Tabel 3.19.3.3
Cakupan sanitasi layak

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi persatuan penduduk	94,50%	72,77%	81,31%
2	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	93%	95,00%	102,15%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2019

5. Kawasan pemukiman kumuh tertangani

Sesuai data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, luas kawasan kumuh untuk wilayah perkotaan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 24,27 Ha sesuai Surat Keputusan Bupati No. 365/V/Tahun 2014 tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman

kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan luas kawasan kumuh untuk wilayah pedesaan adalah seluas 248,77 Ha sesuai dengan Surat Keputusan Bupati nomor No.567/X/Tahun 2017 dan Surat Keputusan Bupati nomor 641/XII/Tahun 2018 tentang penetapan lokai perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga total luas kawasan kumuh secara keseluruhan adalah seluas 401,16 Ha.

Tabel 3.19.3.4
Kawasan Kumuh Tertangani 2016 – 2019

Indikator	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Total Capaian
Kawasan Pemukiman Kumuh yang tertangani (%)	0	3,20 Ha	0,7 Ha	5,79 Ha	9,68 Ha

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2019

Dari tabel tersebut diatas nampak bahwa sampai Tahun 2019 luas kawasan kumuh yang telah ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah seluas 9,69 Ha. Capaian kinerja ini sangat jauh dibandingkan target yang ditetapkan dalam RPJMD atau dengan persentase capaian hanya sekitar 4,40%. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk menangani permasalahan kawasan kumuh di Kabupaten Kepulauan Selayar dibandingkan dengan luas kawasan kumuh yang harus ditangani baik itu pada kawasan perkotaan maupun di pedesaan. Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman selalu mengusulkan permohonan anggaran ke Provinsi agar mendapatkan alokasi dana untuk program KOTAKU. Program ini ditujukan untuk mendukung terciptanya kawasan Kota Tanpa Kumuh KOTAKU.

Dalam mewujudkan sasaran ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Selayar disamping melaksanakan

Program Pemberdayaan Komunitas Kawasan Permukiman dengan kegiatan:

- Pendampingan Program KOTAKU
- Penataan Kawasan Kumuh Perdesaan Kabupaten Kepulauan Selayar
- Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu (Jalan dan Drainase Lingkungan)
- Pembinaan Kawasan Layak Huni di Kecamatan Benteng
- Sosialisasi Pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh

Turut mendukung pula program Penataan Bangunan dan Lingkungan yang pada Tahun 2019 ini telah membangun jalan lingkungan sepanjang 7.811,93 meter dan drainase lingkungan dengan panjang 756,76 meter. Adapun saran perbaikan dalam rangka pencapaian indikator sesuai target yang telah ditentukan adalah:

1. Diharapkan adanya dukungan kebijakan di bidang kawasan permukiman yang memadai;
2. Peningkatan Koordinasi dan penataan kelembagaan dibidang kawasan permukiman;
3. Peningkatan Pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman;
4. Perlunya dukungan dari pihak terkait untuk pembangunan areal Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
5. Perlunya kejelasan arah kebijakan tentang Pengembangan Kawasan Permukiman.

16.4. Program pembangunan dan Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Energi

Tabel 3.19.4
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 16

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	52,35%	-	-	55,45	-	-
2.	Rasio elektrifikasi industri (%)	30,5	-	-	37,25	-	-
3.	PLTMG terbangun dan beroperasi	Beroperasi	-	-	Beroperasi	-	-
4.	Terminal gas terbangun dan beroperasi	Terbangun	-	-	Beroperasi	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja				-	Rata-rata Capaian Kinerja		-

1. Rasio elektrifikasi rumah tangga dan industri

Untuk indikator rasio elektrifikasi rumah tangga dan industri pada Tahun 2019 ini sudah tidak ada lagi realisasi capaian sehubungan dengan adanya perubahan kewenangan Dinas Energi, Sumber Daya Manusia dan Pertambangan yang kepengurusannya dialihkan ke provinsi sejak Tahun 2017 lalu sehingga pemerintah daerah sudah tidak mengalokasikan anggaran lagi untuk pencapaian indikator tersebut.

2. PLTMG dan terminal gas terbangun dan beroperasi

Sama halnya dengan Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga dan Industri, PLTMG dan Terminal Gas Terbangun dan Beroperasi sudah tidak ada lagi realisasi capaian sejak Tahun 2017 disebabkan karena terjadinya peralihan kewenangan dari daerah ke provinsi sehingga

pemerintah daerah sudah tidak mengalokasikan anggaran lagi untuk pencapaian indikator tersebut.

Sasaran Strategis 17

Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Sasaran strategis 17 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata**”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Kepariwisata, Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil menengah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Perhubungan serta Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Untuk mengukur sasaran ke tujuh belas ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **73,16%** dengan kategori predikat **Sedang**. Hasil pengukuran peningkatan kunjungan wisatawan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.20
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 17

No	Indikator	Tahun 2018	Tahun 2019
----	-----------	------------	------------

		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	(30%) 10.203	9.209 orang	90,26%	(40%) 14,285	11.355 orang	79,49%
2.	Jumlah kunjungan wisatawan asing	(60%) 940	574 orang	61,06%	(70%) 1.598	1.068 orang	66,83%
Rata-rata Capaian Kinerja				75,66%	Rata-rata Capaian Kinerja		73,16%

Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2019 ini banyak dikunjungi wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing. Diperoleh angka jumlah kunjungan wisatawan domestik pada Tahun 2019 adalah sebanyak 11.355 orang dari target 14.285 orang. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa target yang ditetapkan belum tercapai, namun jika dibandingkan dengan kunjungan wisatawan domestik tahun sebelumnya yang hanya mencapai 9.209 orang dari 10.203 orang yang ditargetkan pada Tahun 2018, maka jumlah kunjungan wisatawan domestik tersebut mengalami peningkatan sebanyak 2.145 orang atau sekitar 18,90%. Adapun program dan kegiatan yang langsung berdampak pada capaian target kunjungan wisatawan adalah :

- a. Pengadaan bahan dan Alat promosi, kegiatan ini mengadakan bahan dan alat promosi yang akan dibagikan kepada wisatawan baik yang datang ke Kepulauan Selayar maupun yang berkunjung ke stand pameran saat pameran di luar daerah. Tapi kadang bahan promosi ini diberikan kepada tamu daerah pada acara-acara seremoni di daerah sehingga kurang tepat dalam mempromosikan destinasi daerah.
- b. Promosi pariwisata lewat event wisata seperti Selayar Fishing Competition 2019, Wonderful Sail to Indonesia, Festival Takabonerate dan Selayar International Half Maraton yang diikuti oleh 5 negara dengan jumlah peserta 11.549 orang.
- c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

d. Program Pengembangan Kemitraan



Gambar 1.20.
Bupati Kep. Selayar
bersama juara International
Half Marathon dari Republik
Kenya

Tidak tercapainya target untuk wisatawan mancanegara disebabkan oleh :

- a. Meningkatnya persaingan antar destinasi dengan daerah lain, terutama sesama destinasi bahari.
- b. Destinasi di kepulauan selayar masih berupa potensi, yang belum terkelola dengan baik.
- c. Aksesibilitas ke lokasi destinasi masih belum mendukung wisata di Kepulauan Selayar, terutama wisatawan yang memiliki waktu berwisata sangat singkat.
- d. Beberapa kegiatan yang mendukung peningkatan wisatawan berupa atraksi pendukung destinasi masih kurang diminati karena dikelola kurang profesional.



Gambar 1.21.
Kunjungan wisatawan
mancanegara

Berikut ini beberapa potret obyek wisata yang menjadi destinasi di Kabupaten Kepulauan Selayar:

1. Pantai Liang kareta



Pantai Liang Karet adalah salah satu obyek wisata pantai yang terdapat di Desa Bontoborusu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten

Kepulauan Selayar. Lokasinya berjarak sekitar setengah sampai 1 jam perjalanan laut dari ibu kota kabupaten. Bagi yang punya kendaraan bisa juga menuju Desa Bontosunggu terlebih dahulu yang jaraknya sekitar 5 km dari kota Benteng lalu kemudian menggunakan perahu reguler sehingga perjalanan lautnya paling cuma ditempuh sekitar 15 menit ke lokasi ini.

2. Takabonerate



Takabonerate adalah Taman Laut Nasional yang terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar,

Sulawesi Selatan. Jarak dari Benteng, ibu kota Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 25 kilometer. Sementara kalau dari Kota Makassar sekitar 300 kilometer. Asal-usul Takabonerate adalah sebuah gunung berapi yang meletus dan sisa-sisanya terendam sekitar 2.000 meter di bawah permukaan laut. Terbentuklah terumbu karang dengan aneka tanaman laut. Sampai-sampai ada satu bagian yang lapang sekali mirip sabana di daratan yang disebut padang lamun.

3. Baloiya

Pantai Baloiya Sulawesi Selatan Pemandangan Batu di Tengah



Pantai Menjadi Daya Pikat Luar Biasa Sebagai daerah kepulauan, Selayar memiliki banyak spot wisata pantai

yang menarik.

Salah satu tempat yang bisa menjadi pilihan adalah Pantai Baloiya. Pantai Baloiya merupakan sekian banyak lokasiobyek wisata bahari primadona yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Jaraknya hanya sekitar 10 km arah utara kota Benteng. Di kawasan Pantai

Baloiya tersedia fasilitas penginapan dan fasilitas lain seperti cafe dan restoran. Suasananya juga tak kalah eksotis dengan Taman Nasional Takabonerate yang sudah terkenal itu. Di kawasan Pantai Baloiya sendiri, terdiri dari beberapa spot wisata yang bisa anda datangi. Selayar Island Resort adalah salah satu diantaranya. Seayar Island Resort dikelola oleh pihak asing dan tersedia fasilitas restoran serta bungalow.

4. Pantai Pa'badilang



Topografi Pantai Pa'badilang yang berbentuk tanjung, menawarkan pesona tersendiri untuk anda yang berkesempatan menyinggahi tempat yang berlokasi di Desa Bungaiya, Kecamatan Bontomate'ne. Disisi baratnya adalah pantai berpasir putih sementara sisi timur berupa tebing karang yang ditumbuhi pepohonan berukuran sedang. Pantai Pa'badialng berjarak sekitar 35 km sebelah utara kota Benteng.

5. Gong Nekara



Gong
Nekara Adalah
benda
peninggalan
sejarah yang
menurut data
arkeologi berasal
dari pusat
kerajaan

perunggu pada abad ke 2 SM.. Pada masanya alat ini digunakan sebagai simbol pemerintahan dan alat komando. Gong Nekara ditemukan pada abad ke XVII (1868). Berlokasi sekitar 4 Km dari kota Benteng. Konon, Gong Nekara ini merupakan gong terbesar di Asia Tenggara. Gong Nekara ini mempunyai garis tengah 126 cm dengan luas lingkaran

permukaan 396 cm persegi. Lingkaran pinggang 340 cm persegi, tinggi badan 95 cm, bintang 16 jari, jari-jari permukaan 63 cm, adapun gambar atau lukisan motifnya adalah lukisan gajah 16 ekor, pohon sirih 11 batang, burung 54 ekor dan ikan 18 ekor. Pada permukaan gong nekara ini terdiri atas 4 buah arca katak, dan disamping gong ini ada 4 daun telinga. Gong Nekara Selayar terbuat dari logam perunggu yang saat ini tersimpan di daerah Bonto Bangun (Matalalang). Menurut informasi lisan dari tetua adat dan penduduk setempat, nekara tersebut ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang penduduk dari Kampung Rea-Rea yang bernama Sabuna pada tahun 1686. Pada saat itu Sabuna sedang mengerjakan sawah Raja Puta Bangung di Papaniohea.

6. Jangkar Raksasa



Jangkar ini diyakini terbesar dan terpanjang di masanya. Jangkar tersebut kini tersimpan di Desa Nelayan

Padang. Jangkar yang dilengkapi dengan meriam itu diperkirakan merupakan peninggalan pedagang Cina pada abad 17-18. Konon katanya, Jangkar Raksasa ini milik seorang saudagar China bernama Gowa Liong Hui yang mengadakan pelayaran menggunakan kapal besar dan singgah di Padang pada akhir abad XVII. Sampai suatu saat kapal dagang milik Cowa Liong Hui ini rusak hingga tidak dapat lagi digunakan untuk berlayar, kemudian jangkar kapal diamankan oleh penduduk setempat yang dikemudian hari menjadi bukti sejarah.

Ada dua jangkar ditempat ini. Jangkar pertama berukuran, panjang batang : 226 cm, panjang lengkungan : 167 cm, lingkar batang : 60 cm. Sementara jangkar kedua berukuran, panjang batang : 229 cm, panjang lengkungan 117 cm dan lingkar batang, 70 cm. Dari penuturan warga, ternyata bukan hanya wisatawan lokal yang sering datang di tempat ini. Wisatawan dan peneliti budaya dan sejarah dari luar negeri juga berdatangan di tempat ini.

Selain jangkar, di mesium ini juga terdapat meriam kuno. Meriam ini jumlahnya 3 buah. Konon, pemilik meriam ini seorang saudagar dari Gowa keturunan Cina yang bernama Baba Desan.

7. Kampung Tua Bitombang



Perkampungan Tua Bitombang adalah sebuah kampung yang terletak di Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Lokasi ini berjarak sekitar tujuh kilometer dari Benteng. Kampung tersebut bisa ditempuh dengan kendaraan roda empat dan roda dua dengan waktu kurang lebih 30 Menit.

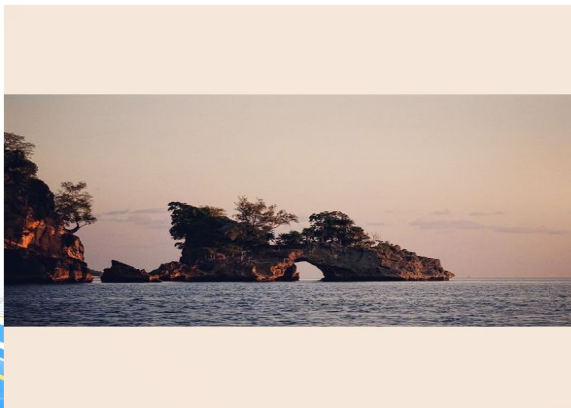
Asal-usul dari penamaan kampung ini adalah karena banyaknya rumah yang memiliki usia di atas 100 – 200 Tahun sehingga dinamakan Perkampungan Tua Bitombang. Adapun yang menarik adalah rumah tersebut terbuat dengan desain rumah panggung. Kampung ini terletak di lereng sampai ke puncak bukit. Rumah-rumah sebagian besar terletak di lereng bukit dengan tiang-tiang yang menjulang di bagian belakang berkisar 10 - 20 meter dan bagian depannya hanya berkisar 2-3 meter.

8. Kampung Penyu (turtle village)



Kampung Penyu, yang merupakan singkatan dari Perkumpulan Pemuda Pelindung Penyu. Kawasan konservasi penyu ini diinisiasi oleh Sileya Scuba Drivers (SSD), sebuah organisasi penyelam di Kepulauan Selayar. Inisiatif pembuatan kampung penyu ini didasari oleh keprihatinan maraknya aktivitas pengambilan telur di Desa Barugaia, salah satu kawasan pantai habitat penyu di Selayar. Kampung Penyu terletak di garis pantai Dusun Tulang, Desa Barugaia, Kec. Bontomanai. Upaya itu akhirnya membuahkan hasil akhirnya pada tanggal 13 April 2014, Kampung Penyu diresmikan oleh Wakapolda Sulsel Brigjen Pol Drs. Ike Edwin, SH, MH.

9. Batu Karapu/ Batu So'bolo



Pantai
meliuk,
berlekuk,
eksotik adalah
label untuk
Pantai Batu

Karapu, Selayar. Letaknya di Dusun Tongke Tongke, Desa Iowa, Kecamatan Bontoharu. Pantai ini berjarak 40 kilometer ke selatan Kota Benteng. Batu Karapu adalah objek wisata favorit domestik maupun internasional kala memandang ke Selayar. Oleh sebagian pihak Pantai Batu Karapu setanding Pantai Durdle Door di Inggris karena memiliki keunikan sendiri yaitu batu berlubang, condong ke laut dan unik.

10. Mangrove Gusung.



Jika ingin berenang dalam lekuk menghijau, disela batang-batang, dikecipak

air laut silakan menyeberang ke Pasi, ada hamparan mangrove Gusung menawan. Jika dilihat dari udara, kawasan ini serupa labirin yang dialiri air laut yang dimainkan pasang surut. Jejak-jejak pasang dan surut menjadi saksi keindahan kawasan yang bisa ditempuh selama 15 menit dari Kota Benteng dengan naik perahu bermesin ini.

11. Punagaan



Punagaang adalah objek wisata alam kepulauan selayar, terletak di Desa Laiyolo, Kecamatan Bontosikuyu. Lokasi wisata ini berjarak ± 40 km dari Benteng. Pantainya berpasir putih bercampur hitam namun eksotik dan mempesona. Letaknya di pantai timur Selayar. Di depan pantai terdapat spot diving dengan biota lobster, ikan kerapu, topografi *drop off*.

12. Air Terjun Patikore



Berekreasi ke Selayar tak lengkap tanpa menjajal Air Terjun Patikore. Letaknya di jarak sekitar 20 kilometer dari Benteng. Air terjun ini adalah unggulan Desa Laiyyolo, Kecamatan Bontosikuyu. Letaknya di atas bukit dan mengarah ke pantai membuat kita merasakan sensasi lengkap tentang pesona perbukitan dan garis cakrawala di laut biru.

13. Bahuluang



Julukan
Surga

Tersembunyi, sepertinya tak terlalu berlebihan disematkan ke Pantai Bahuluang. Pantai yang terletak Pulau Selayar, tepatnya di Pulau Bahuluang, pulau kecil yang bisa diakses dengan kapal laut dari Appatanah, Kepulauan Selayar. Adapun jarak Appatanah dari Benteng, ibukota Kepulauan Selayar adalah sekitar 55 km. Bisa ditempuh selama 1 jam menggunakan kendaraan roda empat atau roda dua. Pantai yang bersih dengan pasir putih bertekstur lembut, air laut yang jernih dengan gradasi biru dan dan hijau di Pantai Bahuluang, menjadi garansi keindahan bagi Anda penikmat wisata bahari.

Di Appatanah, terdapat beberapa perahu nelayan yang bisa anda sewa untuk sampai ke pulau nan eksotis ini. Pulau Bahuluang sendiri dihuni oleh warga yang kebanyakan mata pencahariannya adalah nelayan. Mengunjungi Bahuluang, Anda harus mempersiapkan perlengkapan, semisal alat snorkeling, jika berniat menikmati panorama alam bawah lautnya.

14. Air terjun suttia



Air terjun Suttia adalah salah satu obyek wisata alam yang terletak di Desa Bonea

Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar. Tempat ini berjarak sekitar 25 km dari Kota Benteng (Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar dan bisa ditempuh dengan menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi.

15.Pantai Batulohe

Pantai Batu Lohe adalah pantai yang memiliki relief-relief karang



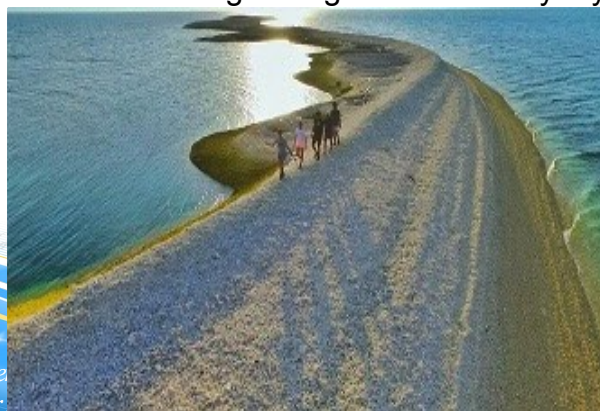
yang begitu indah disepanjang pantai.

Pantai ini berada di pantai timur Pulau Selayar

berpasir putih dan terletak di Dusun Balang Butung, Desa Balang Butung, Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan.

16.Gusung karang

Satu lagi surga tersembunyi yang terdapat di kabupaten



kepulauan selayar yaitu Gusung Karang.

Pulau karang

ini berbentuk sangat indah dan layak menjadi persinggahan. Bentuknya yang begitu unik dan indah, membuat pulau ini merupakan saah satu tempat wajib di kunjungi.

17.Mesjid Tua Gantarang Lalalang Bata



Mesjid tua ini terletak di Desa Gantarang Lalang Bata,

Bontomarannu Kec. Bontomanai. Masjid ini merupakan sebuah situs peninggalan monumental bersejarah yang tergolong sangat unik karena bangunan masjidnya didirikan di atas sebuah sumur di tengah-tengah areal perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang (baki) emas.

Selain itu, Masjid ini memiliki ciri khas tersendiri yang sangat jelas terlihat dari konstruksi atap tumpang dan mustika di bagian puncaknya. Meski posisinya terletak jauh dari pusat ibukota Kabupaten Kep. Selayar dan relatif terpencil di atas puncak bukit akan tetapi merupakan potensi obyek wisata sejarah dan budaya kebanggaan masyarakat Dusun Gantarang Lalang Bata karena usianya yang sudah ratusan tahun sehingga situs ini tak pernah lepas dari perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk terus dilestarikan.

Sasaran Strategis 18

Meningkatnya Kelancaran Arus Barang dan Jasa Antara Wilayah Daratan dengan Wilayah Kepulauan

Sasaran strategis 18 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah serta Dinas Perhubungan. Untuk mengukur sasaran kedelapan belas ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **53%** dengan kategori predikat **Rendah**. Hasil pengukuran peningkatan kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 18

No.	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	(35%) 89.000 ton	(31,25%) 80.000 ton	90%	(40 %) 103.000	(21,17%) 54.845	53%
Rata-rata Capaian Kinerja				90%	Rata-rata Capaian Kinerja		53%

Capaian kinerja kelancaran arus barang dan penumpang dari dan ke wilayah daratan dengan wilayah kepulauan pada Tahun 2019 sebesar 54.854 ton dari 103.000 ton yang ditargetkan dengan persentase capaian sebesar 53%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 yang mencapai 80.000 ton dari 89.000 ton yang ditargetkan dengan persentase capaian sekitar 90%, maka capaian pada Tahun 2019 ini mengalami penurunan sebesar 25.146 ton.

Tabel 3.21.1:
Data Kunjungan Kapal, Jumlah Barang dan Penumpang

No	Bulan	Kunjungan Kapal	Barang (ton)	Barang (ton)		Penumpang	
				Muat	Lanjutan	Turun	Naik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2017	1.369	269.948	39.900	8.758.021	1.564	1.500
2	2018	1.368	5.173.692	17.551	1.086.073	3.307	2.444
3	2019	1.316	40.757	11.616	3.964	5.150	1.803
Jumlah		4.053	5.484.397	69.067	9.848.058	10.021	5.747

Sumber:

Sumber: Dinas Perhubungan, 2019

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja pada Tahun 2019 ini yang antara lain disebabkan oleh:

1. Kabupaten Kepulauan Selayar hanya dilayani oleh 2 unit kapal Pelni yaitu Sabuk Nusantara 84 dan KM. Sabuk Nusantara 85 dengan jumlah kunjungan 4 (empat) kali dalam satu bulan. Selain itu untuk wilayah kepulauan hanya dilayani oleh kapal motor kayu yang tentunya dengan dan kapasitas yang jauh lebih kecil.
2. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki angin musim barat dengan intensitas tinggi yang mengakibatkan gelombang laut sangat tinggi pada bulan-bulan tertentu, sehingga banyak kapal laut yang tidak beroperasi pada saat itu disebabkan oleh adanya larangan operasi dari otoritas terkait.
3. Rute penyeberangan Pelabuhan Pamatata-Bira hanya dilayani oleh 1 (satu) unit kapal feri yaitu KMP. Kormomolin dan pada waktu-waktu tertentu tertentu dibantu oleh KMP. Balibo, KMP. Sangke Palangga dan KMP. Bontoharu jika diluar jadwal pada rute tetap ketiga kapal tersebut.
4. Rute penyeberangan Pelabuhan Pattumbukang ke wilayah kepulauan hanya dilayani oleh 1 (satu) unit kapal feri yaitu KMP. Balibo dan hanya melayani tiga kali penyeberangan dalam satu minggu.

Adapun rekomendasi perbaikan pada tahun yang akan datang antara lain sebagai berikut:

1. Mengupayakan adanya penambahan armada atau jadwal kunjungan kapal Pelni yang melayani rute pelayaran Selayar – Wilayah Kepulauan atau Selayar - NTT.
2. Mengupayakan adanya penambahan armada untuk rute penyeberangan Pamatata – Bira.
3. Mengupayakan adanya pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelabuhan penyeberangan Pattumbukang sehingga kapal feri bisa *Home Base* dan dapat melayani rute Patumbukkang – Wilayah Kepulauan setiap hari.

Sasaran Strategis 19

Meningkatnya Investasi

Sasaran strategis 19 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keempat sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan, dan Pariwisata**”. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas penanaman modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Untuk mengukur sasaran kesembilan belas ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **610,86%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan investasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.22
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 19

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai PMDN	46.781.05.000	78.332.850.485	167,44%	51.459.215.500	537.235.402.298,.	1.044%
2.	Nilai PMA (\$)	3.000.000	2.455.000	81,5%	5.250.000	9.330.000,-	177,71%
Rata-rata Capaian Kinerja				124,47%	Rata-rata Capaian Kinerja		610,86%

1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada Tahun 2019 meningkat pesat dari tahun sebelumnya yang hanya tercatat 78.332.850.485,- dari target yang ditetapkan sebesar 46.781.105.000,- menjadi 537.235.402.298,- dari 51.459.215.500,- yang ditargetkan seperti yang tercatat dalam aplikasi “PP OSS”. Aplikasi “PP OSS” ini mulai digunakan Tahun 2019 dimana rezim penanaman modal diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (“PP OSS”) yang mana pelayanan perizinan penanaman modal diselenggarakan berdasarkan sistem *Online Single Submission* (“OSS”).

Pada Tahun 2019, investor yang telah memiliki izin untuk menanamkan modal di Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai data aplikasi “PP OSS” adalah sebanyak 114 perusahaan dengan jumlah investasi sebesar Rp. 537.235.402.298,.-. Walau demikian dalam pelaksanaannya, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja masih menghadapi beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Belum tersebarnya investasi ke seluruh Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Sektor/lapangan usaha yang diminati investor untuk menanamkan usahanya berada pada sektor sekunder dan tersier, masih minim

- minat investor untuk menanamkan usahanya pada sektor primer misalnya di sektor pertanian dan perkebunan;
- c. Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), secara rutin;
 - d. Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan PMA/PMDN di Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum optimal disebabkan ada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan diantaranya disebabkan tidak adanya regulasi yang mewajibkan penyampaian (LKPM).

Adapun beberapa solusi yang telah ditempuh Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut antara lain:

- a. Penyusunan dokumen profil peluang investasi sampai dengan tahap Feasibility Study (FS) dan diusahakan memakai konsultan yang sudah kredibel di mata investor luar negeri, sehingga profil peluang investasi tersebut sudah layak untuk dijual kepada investor, terutama investor dari luar negeri
- b. Pembuatan profil peluang investasi lebih diutamakan pada sektor tersier, misalnya sektor pertanian dan perkebunan sehingga minat investor pada kedua sektor tersebut akan meningkat.
- c. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap perusahaan PMA/PMDN tentang pentingnya menyampaikan laporan LKPM. Juga perlu diwacanakan adanya reward bagi perusahaan yang rutin menyampaikan LKPM setiap triwulan
- d. Lebih meningkatkan koordinasi pihak yang terlibat dalam penyiapan investasi terutama dengan Instansi seperti Pajak, PLN, dan regulasi yang memaksa untuk menyampaikan (LKPM) karena permasalahan yang menyangkut hal itu susah untuk dicarikan solusinya.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Pada Tahun 2019 Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebesar \$9.330.000,- dari \$5.250.000 yang ditargetkan dengan persentase capaian sebesar 177,71%. Dalam aplikasi “PP OSS” tercatat ada sebanyak 15 perusahaan asing yang telah memiliki izin untuk menanamkan modalnya dengan jumlah investasi sebesar \$9.330.000,-. Capaian kinerja ini mengalami peningkatan pesat dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai \$2.455.000,- dari \$3.000.000,- yang ditargetkan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan atau peningkatan dan penurunan kinerja DPMPTSP tahun 2016 adalah:

- a. Adanya Komitmen pimpinan dan aparatur DPMPTSP dalam mencapai target kinerja peningkatan investasi;
- b. Kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Adanya jaminan kepastian hukum pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- d. Adanya kesadaran para pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM;
- e. Promosi potensi dan peluang investasi yang dilaksanakan secara intensif melalui berbagai media;
- f. Berjalannya pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan.



Gambar 1.22.
Bupati Kep. Selayar bersama salah seorang Investor dari Spanyol

Sasaran Strategis 20

Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata

Sasaran strategis 20 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah**”. Sasaran ini didukung oleh secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja serta Dinas Kepariwisata. Untuk mengukur sasaran kedua puluh ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **80%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran terbangun dan berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 3.23
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 20

No	Indikator	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Realisasi pembangunan KEK pariwisata	Ditetapkan	50%	50%	Ditetapkan	80%	80%
Rata-rata Capaian Kinerja				50%	Rata-rata Capaian Kinerja		80%

Untuk indikator realisasi pembangunan KEK pariwisata, Tahun 2019 ini belum bisa ditetapkan sesuai target karena masih terkendala izin lokasi KEK yang luasannya mencapai 500 Ha yang rencananya

berlokasi di Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontosikuyu, sampai ke Taka Bonerate. Pertimbangan lokasi pengembangan KEK Pariwisata di Kecamatan Bontoharu dan sekitarnya disebabkan karena pada wilayah ini terdapat destinasi wisata yang indah dan bervariasi, dekat dengan pusat ibukota kabupaten, aksesibilitas Pelabuhan Benteng dan Pelabuhan pattumbukang, serta Bandara Udara Selayar H. Aroepala. Khusus di kawasan Taka Bonerate, pulau tersebut memiliki *unique value proposition* sebagai atoll terbesar di Asia Tenggara. Bahkan KEK Kepulauan Selayar kedepannya akan di-branding sebagai **“The New Virgin Atoll in the heart of 17.000 Tropical Island in Indonesian Archipelago South East Asia”**.

Dari 17 dokumen yang dipersyaratkan dalam pembangunan KEK pariwisata, saat ini tinggal izin lokasi yang belum ada namun gubernur Sulawesi Selatan telah menerbitkan rekomendasi yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk menerbitkan izin usaha sebagai lokasi Kawasan Ekonomi Khusus. Setelah ke 17 dokumen tersebut lengkap maka akan segera diserahkan ke Dewan KEK Nasional sehingga Kabupaten Kepulauan Selayar dapat segera ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata.

Sasaran Strategis 21

Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan Pusat Budi Daya Ikan Karang

Sasaran strategis 21 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan,

penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga kerja. Untuk mengukur sasaran kedua puluh satu ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **87,27%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu dan Pusat Budi Daya Ikan Karang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.24
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 21

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	50	50	100%	55	48	87,27%
Rata-rata Capaian Kinerja				100%	Rata-rata Capaian Kinerja		87,27%

Terbangun dan berkembangnya Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu program prioritas Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode RPJMD Tahun 2016 – 2021. Ada 2 (dua) pendekatan yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, yaitu memaksimalkan pengelolaan kawasan perikanan yang sudah ada seperti PPI/TPI Bonehalang dan sentra-sentra pendaratan perikanan lainnya, serta membentuk Kawasan perikanan baru yang lebih dekat dengan area penangkapan dan dapat mengintegrasikan seluruh aspek industri perikanan mulai penangkapan hingga pengolahan dan distribusi produk yang diharapkan akan memicu efek pengganda ekonomi bagi pelaku usaha perikanan.

Pendekatan memaksimalkan pengelolaan PPI/TPI Bonehalang dan sentra nelayan dilakukan dengan kerjasama pengelolaan sarana yang sudah ada dan melengkapi berbagai kebutuhan pemanfaat terhadap fasilitas perikanan pada sentra nelayan dan PPI/TPI Bonehalang, misalnya pabrik es, cold storage, UPI, pasar ikan dan sebagainya.

Sedangkan pendekatan pembangunan kawasan perikanan yang baru, dilaksanakan dengan membagi pada 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a. Tahap Pertama (nilai 40 %), dengan mewujudkan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan KIPT, berupa :
 1. Studi kelayakan lokasi KIPT
 2. Penetapan lokasi KIPT
 3. Penyusunan Dokumen Masterplan KIPT.
 4. Penyusunan SK Tim Kerja KIPT
 5. Penyesuaian lokasi terhadap tata ruang wilayah (RZWP3K, RTRW Kabupaten, dan RTRW Propinsi)
 6. Kerjasama Investasi perikanan dalam Kawasan Perikanan KIPT.
 7. Penguatan kapasitas Aparatur dalam rangka pembangunan KIPT dan pengelolaan Kawasan perikanan.
 8. Penetapan Lokasi KIPT oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.
 9. Dokumen AMDAL KIPT
 10. Dokumen Bisnisplan KIPT
- b. Tahap Kedua (nilai 20 %), dengan mewujudkan pengadaan/pembebasan lahan KIPT
- c. Tahap Ketiga (nilai 40%), dengan mewujudkan pembangunan infrastruktur/fasilitas Pokok, Fungsional dan Penunjang KIPT.

Dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut maka Dinas Kelautan dan Perikanan hingga Tahun 2019 telah melaksanakan beberapa upaya, yaitu :

Tabel 3.24.1

Capaian Kinerja Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Tahun 2019

No	Uraian Tahapan	Keterangan	Nilai Kriteria
I.	Tahap penyediaan dokumen perencanaan pembangunan KIPT, dengan nilai 40 %		
1.	Dokumen Studi kelayakan lokasi KIPT	Tersedia	10
2.	Penetapan lokasi KIPT	SK Bupati, ada	10
3.	Penyusunan Dokumen Masterplan KIPT.	Tersedia	10
4.	Pembentukan Tim Kerja KIPT	SK Bupati	10
5.	Penyesuaian lokasi terhadap tata ruang wilayah (RZWP3K, RTRW Kabupaten, dan RTRW Propinsi)	Terakomodir dalam 3 regulasi tata ruang	10
6.	Kerjasama Investasi perikanan dalam Kawasan KIPT	- MoU KKP/Investor - Forum Bisnis	10
7.	Penguatan kapasitas Aparatur dalam rangka pembangunan KIPT dan pengelolaan Kawasan perikanan.	Studi Banding pengelolaan Kawasan perikanan	10
8.	Penetapan Lokasi KIPT oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.	Dalam Proses	0
9.	Dokumen AMDAL KIPT	Tahun 2020	0
10.	Dokumen Bisnisplan KIPT	Tahun 2020	0
Jumlah Nilai :			70
Pengukuran : $\{70/100\} \times 40 \%$			28 %
II.	Tahap II : Merealisasikan pembebasan lahan KIPT, dengan Nilai 20 %		
1.	Dokumen Pengadaan Tanah KIPT	Tersedia 1 dokumen	100
2.	Pembebasan Lokasi KIPT Hangkoang secara bertahap sebesar 32 Ha - Tersedia anggaran pembebasan pada APBD Perubahan TA. 2019 - Tersedia anggaran pembebasan pada APBD TA. 2020	Dalam Proses (Pembebasan Lahan Tupoksi Bagian Pertanahan SETDA)	50
Pengukuran			15
III.	Tahap III : Merealisasikan pembangunan infrastruktur, dengan Nilai 40 %		

No	Uraian Tahapan		Keterangan	Nilai Kriteria
1.	Melengkapi Fasilitas Kawasan Perikanan PPI/TPI Bonehalang dan sentra nelayan (pengadaan talang pabrik es, timbangan, keranjang, cold box)		- PPI/TPI Bonehalang	5
2.	Pembangunan Fasilitas Pokok, Fungsional, dan Penunjang di KIPT Hangkoang		0	0
Pengukuran				5

Sumber : Data Dinas Kelautan dan Perikanan Setelah Diolah, Tahun 2019.

Tabel 3.24.2
Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Realisasi Pembangunan KIPT	%	55	48	87,27	Tinggi

Sumber : Pengolahan Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2019

Keberhasilan capaian indikator ini didukung oleh program pembangunan kawasan insdustri terpadu dengan kegiatan penyediaan dokumen KIPT, forum investasi bisnis KIPT serta pengadaan sarana dan prasarana sentra nelayan. Turut mendukung pula program penyelenggaraan dan pengelolaan TPI dengan kegiatan pengelolaan TPI dan penerbitan SIUP budidaya.

Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Distribusi Logistik (Barang dan Jasa)

Sasaran strategis 22 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah**”. Sasaran ini didukung oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Untuk mengukur sasaran kedua puluh dua ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **86,67%** dengan kategori predikat **Tinggi**. Hasil pengukuran terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.25
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 22

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	10	9	90%	15	13	86,67%
Rata-rata Capaian Kinerja				90%	Rata-rata Capaian Kinerja		86,67%

Dinas Perindagkum Kabupaten Kepulauan Selayar adalah salah satu dinas yang diberikan tugas khusus untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pusat distribusi logistik Kawasan Timur Indonesia. Dalam perjalanan pelaksanaan program tersebut telah disusun road map sebagai dasar pelaksanaan kerja dengan meliputi 3 hal, yakni :

1. Pembuatan regulasi untuk kemudahan investasi. Dalam kurun waktu 2016 sampai 2019, Disperindagkum telah menyusun rencana pembangunan

industri Kabupaten yang saat ini telah dimasukkan dalam Ranperda dan menunggu pengesahan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

2. Studi kelayakan kawasan dan pembebasan lahan. Disperindagkum telah melakukan revisi dan sinkronisasi RT/RW kawasan pusat distribusi logistik berada di kawasan utara Kabupaten Kepulauan Selayar telah dilakukan survey awal pembangunan pelabuhan samudera oleh PT. Pelindo IV Makassar. Telah dilakukan sosialisasi awal dan terbatas. Dan mendorong pemerintah untuk melakukan pembebasan lahan dalam area kawasan dalam jumlah yang cukup dan konsisten.
3. Penyediaan modal transportasi dan konsolidasi potensi perdagangan. Disperindagkum telah melakukan 2 hal penting, yaitu menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai jalur tol laut alternatif dan hub tol laut nusantara. Dalam 2 tahun pengusulan program tol laut, pada bulan Desember 2018 kapal peti kemas telah masuk Pelabuhan Benteng dan Jampea dengan bobot kapal 100 kontainer dan masih rutin masuk sampai saat ini. PT. Pelindo IV Makassar sampai saat ini telah melakukan 8 kali kunjungan termasuk telah membuat studi kelayakan baik menyangkut teknis dan sosial kultural, melakukan survey ke dalam laut, survey ketahanan jembatan, pemetaan potensi agrobisnis dan perikanan, survey konsolidasi lahan penumpukan, foto udara dan rencana pembangunan jalan reklamasi pelabuhan ke lapangan TPI dalam rangka modernisasi Pelabuhan Benteng. Dalam perkembangannya saat ini sedang disusun KSO (Kerja Sama Operasional) Pelabuhan Benteng antara PT. Pelindo IV dengan syahbandar sebagai pengelola pelabuhan.

Pada sektor perindustrian, pertumbuhan industri Tahun 2019 adalah sebanyak 45 Industri Kecil Menengah atau 15% dari tahun sebelumnya pada Tahun 2018 pertumbuhan industri mencapai 40 pelaku usaha industri. Dan untuk Kawasan pusat distribusi logistik merupakan sebuah program strategis Bupati Kepulauan Selayar (RPJMD) dalam upaya mempercepat pembangunan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar. Kawasan Pusat distribusi logistik

di tempatkan sebelah utara pulau selayar dengan luas sekitar 5.000 HA. Yang terdiri atas kawasan pelabuhan, kawasan pergudangan dan kawasan penyangga meliputi, perumahan, pertanian, peternakan, pusat pusat grosir, penyediaan air bersih, power plant, telekomunikasi dan kegiatan penunjang lainnya.

Pengembangan kawasan ini dimulai dari penyediaan alat transportasi barang dalam jumlah besar seperti peti kemas yang saat ini telah tersedia di pelabuhan Benteng. Selanjutnya MOU Bupati dengan Dirut PT. Pelindo IV Makassar dan SK Kementerian Perhubungan tentang Penetapan Jalur pelayaran TOL Laut untuk pengembangan pelabuhan peti kemas. Dengan status kepemilikan kawasan :

- 1) Kawasan Pelabuhan Benteng oleh UPP Pelabuhan Benteng.
- 2) Kawasan konsolidasi peti kemas TPI (PEMDA)

Sasaran Strategis 23

Bertambahnya Produksi Beberapa Kali Lipat pada Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Kelautan

Sasaran strategis 23 ini juga merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah”**. Sasaran ini didukung secara terpadu oleh beberapa SKPD yaitu Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretariat Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk mengukur sasaran kedua puluh tiga ini terdapat 16 (enam belas) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **98,89%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran bertambahnya produksi pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan adalah sebagai berikut:

23. 1. Program Revolusi Tani

Tabel 3.26.1
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (ton)	Padi : (10%) 39.421	39.523	100,25%	Padi : (10%) 43.363	34.979 Ton	80,67%
		Jagung : (15%) 13.741	11.634	84,66%	Jagung : (15%) 15.802	7.127 Ton	54,89%
2	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman hortikultura (ton)	Jeruk keprok : (0,30%) 5.910.01	1.792,58	30,41%	Jeruk keprok : (0,30%) 5.929,88	3.219,8 Ton	54,33%
3	Persentase peningkatan produksi perkebunan (ton)	Kelapa : (1,5 %) 26.736.12	25.055.6 3	95,12%	Kelapa : 1,5 % 26.736,12	24.342,36 Ton	91,05%
		Pala : (0,08%) 375,38	285,78	83,65%	Pala : (0,08 %) 375,38	396,39 Ton	105,59%
		Cengkeh : (0,15%) 341,60	535,10	184,42%	Cengkeh : (0,15%) 341,60	488,72 Ton	143,07%
		Jambu mete : (0,09%) 1.938.20	2.090,17	118,96%	Jambu mete : 0,09 % 1.938.20	1.976,10 Ton	101,96%
4	Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan (kw/ha)	Padi : 67,64	67,25	99,42%	Padi : 70,55	79,79 Ku/ Ha	113,09%
		Jagung : 44,98	68,80	152,95%	Jagung : 51,61	68,80 Ku/ Ha	133,31%
5	Tingkat produktivitas pertanian tanaman hortikultura (kw/	Jeruk keprok : 103,90	68,40	65,83%	Jeruk Keprok : 104,50	67,71 Ku/ Ha	64,79%

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	ha)						
6	Tingkat produktivitas perkebunan (kg/ha)	Kelapa : 1.502	1.462	97,33%	Kelapa : 1,502	24.342,36 Kg/Ha	91,05%
		Pala : 350	283	80,85%	Pala : 375	396,39 Kg/Ha	105,59%
		Cengkeh : 350	568	162,28%	Cengkeh : 400	488,72 Kg/Ha	143,07%
		Jambu mete : 500	579	115,80%	Jambu Mete : 550	1.976,10 Kg/Ha	101,96%
Rata-rata Capaian Kinerja				105,14%	Rata-rata Capaian Kinerja		98,89%

Untuk mendukung terlaksananya program revolusi tani di Kabupaten Kepulauan Selayar, maka indikator yang diukur oleh Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.26.1.1
Pengukuran Capaian Nilai Tukar Petani (NTP) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Nilai Tukar Petani (NTP)		102	104,42)*	102,37
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi		84,5	78,9	93,37

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Keterangan :)* = NTP gabungan Provinsi Sulawesi Selatan

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani (it) terhadap indeks harga yang dibayar petani (ib), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan pada Bulan Desember 2019, NTP di Sulawesi Selatan secara umum mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen dibandingkan bulan sebelumnya. NTP Bulan November 2019 sebesar 103,84 naik menjadi 104,42 pada Bulan Desember 2019. Kenaikan NTP tersebut terjadi karena kenaikan indeks yang diterima petani (it) lebih besar bila dibandingkan dengan kenaikan indeks yang dibayar petani (ib). Indeks yang diterima petani (it) mengalami kenaikan sebesar 0,76 persen sedangkan indeks yang dibayar petani (ib) mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen. Indeks yang diterima petani (it) mengalami kenaikan pada semua subsektor dengan kenaikan it terbesar terjadi pada Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat yaitu naik 1,84 persen. Indeks yang dibayar petani (ib) juga mengalami kenaikan pada semua subsektor dengan kenaikan terbesar terjadi pada Subsektor Perikanan, yaitu naik sebesar 0,30 persen.

Sedangkan pada indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 93,37%. Pola Pangan Harapan dapat diimplementasikan dalam perencanaan konsumsi pangan dan penyediaan pangan untuk dikonsumsi, Berkaitan dengan kegunaan ini maka PPH merupakan instrument sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan pada tahun mendatang.

Tabel diatas menunjukkan target yang diharapkan sebesar 84,5 dan realisasi hanya 78,9. Hal ini menandakan bahwa pola konsumsi pangan

penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan hasil susenas Tahun 2018 skor PPH yang mencerminkan keragaman mutu belum memenuhi harapan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Demikian pula dari segi keragaman dan keseimbangannya yaitu konsumsi padi-padian masih berlebih sedangkan konsumsi sayuran dan buah, umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan masih kurang. Kondisi ini mencerminkan pola konsumsi pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat tergantung pada padi-padian.

Skor PPH yang mencerminkan keragaman dan mutu gizi masih kurang yaitu 78,9 (pada tingkat konsumsi) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26.1.2
Situasi Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Konsumsi Energi dan Protein serta Besarnya Skor PPH

No.	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal	%	%AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	348,2	1.460	65	67,9	0,5	32,5	33,9	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	24,8	30	1,4	1,5	0,5	0,7	0,7	2,5	0,7
No.	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/ Kapita/ Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
Kkal	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH			
3.	Pangan hewani	146,0	204	9,1	9,5	2,0	18,2	19,0	24,0	19,0
4.	Minyak dan Lemak	29,8	240	10,7	11,1	0,5	5,3	5,6	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	9,4	51	2,2	2,4	0,5	1,1	1,2	1,0	1,0
6.	Kacang-kacangan	9,5	25	1,1	1,2	2,0	2,2	2,3	10,0	2,3
7.	Gula	23,2	85	3,8	4,0	0,5	1,9	2,0	2,5	2,0
8.	Sayur dan Buah	202,9	102	4,6	4,8	5,0	22,8	23,8	30,0	23,8
9.	Lain-lain	119,2	49	2,2	2,3	-	-	-	-	-
	Total		2.247	100,0	104,5	-	84,7	88,5	100,0	78,9

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dalam pencapaian Nilai Tukar Petani (NTO) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, maka dilaksanakan pencapaian indikator sebagai berikut:

1. Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan tingkat produktifitas

a. Tanaman Padi

Indikator kinerja Jumlah Produksi Tanaman Padi, ditargetkan sebesar 43.363 ton pada Tahun 2019 dan hanya terealisasi sebesar 34.979 ton dengan persentase tingkat capaian sekitar 80,67%. Sedangkan indikator kinerja Produktivitas Tanaman Padi, ditargetkan sebesar 70,55 Ku/Ha, dapat terealisasi sebesar 79,79 Ku/Ha dengan persentase tingkat capaian sekitar 113,09%. Penurunan produksi padi pada Tahun 2019 ini disebabkan karena terjadinya penurunan Indeks Pertanaman (IP) dan luas panen yang disebabkan oleh kekurangan air akibat curah hujan yang sangat rendah dan debit air saluran irigasi yang tidak mencukupi kebutuhan air sawah. Usaha peningkatan produktivitas padi didukung melalui intensifikasi dengan penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, dan perlindungan tanaman. Selain itu, beberapa teknologi budidaya juga bisa diterapkan untuk memacu produktivitas padi di antaranya teknologi jajar legowo, optimalisasi brigade alat dan mesin pertanian.

Tabel 3.26.1.3.
Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas
Padi 2016 – 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan produksi pertanian tanaman Padi (ton)	36.865,26	37.715	39.523	34.979)*
2.	Tingkat produktivitas pertanian tanaman Padi (kw/ha)	121,08	75,43	67,25	79,79)*

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 2019

Catatan :)* = data sementara

Dari tabel tersebut diatas jumlah produksi padi Tahun 2019 mencapai 34.979 ton, menurun sebesar 11,49% dari produksi Tahun 2018. Sedangkan angka produktivitas padi Tahun 2019 sebesar 79,79 Ku/Ha, mengalami peningkatan sebesar 18,65 % dari Tahun 2018, yang produktivitasnya sebesar 67,25 Ku/Ha.

b. Tanaman Jagung

Indikator kinerja Jumlah Produksi Tanaman Jagung, pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 15.802 ton sedangkan yang terealisasi hanya sebesar 7.127 ton dengan persentase tingkat capaian sekitar 54,89%. Indikator Kinerja Produktivitas Tanaman Jagung, ditargetkan sebesar 51,61 Ku/Ha, dapat terealisasi sebesar 68,80 Ku/Ha dengan persentase tingkat capaian sekitar 133,31%. Penurunan produksi Tahun 2019 terjadi karena adanya penurunan Indeks Pertanaman (IP) dan luas panen yang disebabkan oleh kekurangan air akibat curah hujan yang sangat rendah. Angka produktivitas jagung Tahun 2019 sebesar 68,80 Ku/Ha, hal ini didukung melalui intensifikasi dengan penggunaan benih unggul, pupuk berimbang, perlindungan tanaman, meningkatkan optimalisasi brigade alat dan mesin pertanian yang dikembangkan dan meminta perhatian khusus dari segenap stake holder pertanian.



Gambar 1.23

Bupati Kab. Kep.
Selayar Panen
perdana padi di
Kecamatan
Bontosikuyu

Tabel 3.26.1.4
Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas
Jagung 2016 – 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan produksi pertanian tanaman Jagung (ton)	13.411,89	18.914	11.634	7.127)*
2.	Tingkat produktivitas pertanian tanaman Jagung (kw/ha)	45,50	80,59	68,80	68,80)*

Sumber: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 2019

Catatan :)* = data sementara

Jumlah produksi jagung Tahun 2019 sebesar 7.127 ton, mengalami penurunan 38,74% dari produksi Tahun 2018. Sedangkan angka produktivitas jagung pada Tahun 2019 masih sama dengan Tahun 2018 yaitu sebesar 68,80 Ku/Ha.

2. Persentase peningkatan produksi tanaman hortikultura dan tingkat produktifitas

a. Jeruk Keprok

Indikator Kinerja Jumlah Produksi Jeruk Keprok, ditargetkan sebesar 5.929,88 Ton, dapat terealisasi sebesar 3.219,8 Ton dengan persentase tingkat capaian 54,33%. Indikator Kinerja Produktivitas Jeruk Keprok, ditargetkan sebesar 104,5 Ku/Ha, dapat terealisasi sebesar 67,71 Ku/Ha dengan persentase tingkat capaian 64,79%. Produksi dan produktivitas jeruk keprok tahun 2019 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan :

- Belum adanya penanganan secara serius oleh petani
- Belum ada pengembangan khusus Jeruk Keprok

- Belum adanya kegiatan peremajaan untuk menggantikan tanaman yang sudah tua dan mati
- Belum adanya pengembangan secara kawasan
- Cuaca/iklim yang sangat kering sehingga banyak bunga dan putik yang gugur yang menyebabkan tidak terbentuknya buah.

Tabel 3.26.1.5
Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas
Jeruk Keprok 2016 – 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan produksi pertanian tanaman Jeruk Keprok (ton)	4.599,89	1.937,49	1.792,58	3.219,8
2.	Tingkat produktivitas pertanian tanaman Jagung (kw/ha)	83,92	50,51	68,4	67,71

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2019

Capaian Kinerja untuk tanaman jeruk keprok berkriteria kurang dengan persentase capaian kinerja sebesar 30,41 %. Ini tidak tercapai karena pada Tahun 2018, luas tanam 1.930,93 ha dan luas panen 262,80 ha yang hanya mampu menghasilkan produksi sebanyak 1.797,58 ton, sehingga produktivitas jeruk keprok hanya 68,40 kw/ha. Sedangkan pada tahun 2016 produksi yang dicapai sebanyak 4.599,64 ton dengan luas tanam 1.944,42 ha dan luas panen 548,11 ha sehingga produktivitasnya 83,92 kw/ha. Dan pada Tahun 2017 produksinya turun menjadi 1.937,49

ton dari luas tanam 1.933 ha dan luas panen 383,58 ha, sehingga produktivitasnya hanya 50,51 kw/ha. Adanya penurunan produksi tersebut disebabkan karena jeruk keprok merupakan tanaman tahunan yang sangat dipengaruhi iklim. Semakin tinggi curah hujan akan mengakibatkan jeruk keprok tidak mengalami sters, sehingga produksinya juga semakin menurun.

3. Persentase peningkatan produksi perkebunan dan tingkat produktifitas

Peningkatan produksi perkebunan Tahun 2017 tertuju pada 4 (empat) komoditas tanaman tahunan yaitu kelapa, pala, cengkeh dan jambu mete.

a. Kelapa Dalam

Capaian Kinerja untuk tanaman Kelapa Dalam berkriteria baik dengan persentase capaian kinerja sebesar 95,12%. Ini tidak dapat mencapai target karena pada Tahun 2018, luas area 19.547 ha dengan luas lahan panen hanya 17.138 ha dengan produksi sebanyak 25.055,63 ton, sehingga produktivitas kelapa dalam hanya 1,462 kg/ha. Sedangkan untuk Tahun 2016, luas areal 19.416 ha dengan luas lahan panen 16.805 ha dengan produksi 24,937,21 ton, sehingga produktivitas 1.484 kg/ha. Dan pada Tahun 2017, luas areal 19.405,50 ha dengan luas lahan panen 16.943 ha dengan produksi 24.979,20 ton, sehingga produktivitasnya sebesar 1.474 kg/ha. Produksi kelapa dalam dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dan juga peningkatan produksi ini, tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas. Hal ini disebabkan karena tanaman kelapa dalam pada umumnya sudah berumur tua dan tidak diimbangi dengan peremajaan, harga kelapa dan kopra sangat rendah sehingga masyarakat kurang semangat melakukan pemeliharaan/perawatan, serta tingginya konversi lahan kelapa menjadi lahan pemukiman atau sawah dan lain-lain.

e. Pala

Untuk komoditas pala, capaian kinerjanya sebesar 83,65% dengan kriteria baik. Ini tidak dapat mencapai target karena Tahun 2018, luas area 2.033 ha dengan luas lahan panen hanya 1.010 ha yang menghasilkan produksi sebanyak 285,78 ton, sehingga produktivitas pala hanya 283 kg/ha. Sedangkan untuk Tahun 2016, luas areal 1.738 ha dengan luas lahan panen 959 ha dengan produksi 279,31 ton, sehingga produktivitas 291 kg/ha. Dan pada Tahun 2017, luas areal 1.880 ha dengan luas lahan panen 967 ha dan produksi 282,01 ton, sehingga produktivitasnya sebesar 283 kg/ha. Produksi pala dalam dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dan juga peningkatan produksi ini, tidak diiring dengan peningkatan produktivitas. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan tanaman pala yang baru, sehingga secara otomatis sangat mempengaruhi tingkat produktivitas. Dimana tanaman baru dan belum menghasilkan mempunyai tingkat produktivitas yang sangat rendah dibandingkan tanaman yang sudah berumur optimal.

f. Jambu Mete

Capaian kinerja untuk komoditas jambu mete juga berkriteria sangat baik dengan capaian kinerja sebesar 118,96 %. Ini dapat melampaui target karena Tahun 2018, luas area 3.708 ha memiliki luas lahan panen 3.612,50 ha dengan produksi sebanyak 2.090,17 ton, sehingga produktivitas jambu mete mencapai 579 kg/ha. Sedangkan untuk Tahun 2016, luas areal 3.714,50 ha dengan luas lahan panen 3.576 ha dengan produksi 1.919,40 ton, sehingga produktivitas 537 kg/ha. Dan pada Tahun 2017, luas areal 3.708 ha dengan luas lahan panen 3.612,50 ha dan produksi 2.011,29 ton, sehingga produktivitasnya sebesar 557 kg/ha. Produksi jambu mete dalam dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Dan juga

peningkatan produksi ini, seiring dengan peningkatan produktivitas. Hal ini disebabkan makin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemupukan yang didukung dengan tersedianya penyalur pupuk resmi yang mudah dijangkau, serta tingginya semangat pemeliharaan melalui pemangkasan dan penambahan luas tanaman yang sudah berproduksi.

g. Cengkeh

Capaian kinerja tanaman cengkeh 184,42 % dengan kriteria sangat baik. Ini dapat tercapai karena Tahun 2018, luas area 1.316 ha memiliki luas lahan panen 942 ha yang menghasilkan produksi sebanyak 535,10 ton, sehingga produktivitas mencapai 568 kg/ha. Sedangkan untuk tahun 2016, luas areal 1.213 ha dengan luas lahan panen 817 ha dengan produksi 178,35 ton, sehingga produktivitas 218 kg/ha. Dan pada Tahun 2017, luas areal 1.273 ha dengan luas lahan panen 817 ha dengan produksi 102,49 ton, sehingga produktivitasnya sebesar 125 kg/ha. Produksi cengkeh dalam tahun ini mengalami peningkatan, bahkan dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Dan juga peningkatan produksi ini, seiring dengan peningkatan produktivitas. Hal ini disebabkan makin tingginya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeliharaan dan pemupukan serta didukung dengan iklim yang kondusif.

Tabel 3.26.1.6
 Capaian Produksi dan Produktivitas perkebunan
 (Kelapa, Pala, Cengkeh, Jambu Mete) 2016 – 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan produksi Perkebunan (Kelapa)	24.937,21	24.979,2	25.055,63	24.342,36)*
2.	Peningkatan produksi Perkebunan (Pala)	291,5	282,01	285,78	396,39)*
3.	Peningkatan produksi	178,35	102,49	535,1	488,72)*

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
	Perkebunan (Cengkeh)				
4.	Peningkatan produksi Perkebunan (Jambu Mete)	1.919,4	2.011,29	2.090,17	1.976,1)*
5.	Tingkat produktivitas Perkebunan (Kelapa)	1.484	1.474	1.462	2.006)*
6.	Tingkat produktivitas Perkebunan (Pala)	304	292	283	235)*
7.	Tingkat produktivitas Perkebunan (Cengkeh)	218	125	568	524)*
8.	Tingkat produktivitas Perkebunan (Jambu Mete)	537	557	579	547)*

Sumber Data: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan 2019

Catatan :)* = data sementara

23.2. Program Pembangunan dan Pengembangan Sentra Usaha Peternakan

Tabel 3.26.2
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali (%)	60%	55%	91,66%	70 %	70%	100%
2	Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi unggul (%)	50%	0	0	70 %	0	0%
3	Persentase peningkatan produksi ternak	Sapi potong : (19,04%) 19,946	19.996	100,25%	Sapi potong: (29,46%) 21.693	21.823	100,60%

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Sapi perah : 0%	0	0	0	0	0%	
	Kerbau : (1,65%) 4,818	4.727	98,11%	Kerbau : (1,66%) 4.898	4.847	98,96%	
	Kuda : (2,39%) 4,043	3.975	98,32%	Kuda : (2,39%) 4.140	4.108	99,23%	
	Kambing: (7,71%) 86.628	86.730	100,12%	Kambing : (11,93%) 90.476	90.582	100,12%	
	Domba : (26,97%) 71	41	57,75%	Domba : (25,35%) 89	35	39,32%	
	Ayam buras : (0,42%) 275,833	315.621	114,42%	Ayam Buras: (0,42%) 276,997	285.766	103,17%	
	Ayam ras pedaging: (5,75%) 10,328	9.019	87,33%	Ayam Pedaging : (5,75%) 10,992	11.030	100,35%	
	Ayam ras petelur : (5,65%) 13,435	17.226	128,22%	Ayam ras petelur : (5,65%) 13,791	15.897	115,27%	
	Itik : (7,16%) 7,004	8.240	117,65%	Itik : (7,16%) 7,506	7.643	101,83%	
Rata-rata capaian kinerja				99,38%	Rata-rata Capaian Kinerja		95,88%

1. Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali

Tujuan dari indikator tersebut diatas adalah untuk mempertahankan dan mengembangbiakkan mutu genetic dari ternak sapi Bali (pemurnian sapi Bali) di Tanamalal. Pada Tahun 2019 telah dilakukan Pembangunan dan pembenahan sarana dan prasarana pendukung yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan pusat pemurnian sapi bali di Pulau Tanamalala sebagai lanjutan dari pembangunan dari tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2019 ini telah dilakukan pemagaran areal lokasi instalasi pembibitan ternak, paddock 6 unit (kandang penanganan ternak) dan JIAT dangkal 1 unit sebagai sumber air untuk penanganan ternak dan pengadaan joloro 1 unit untuk transport alat dan bahan untuk pengembangan ternak. Adapun capaian kinerja untuk Tahun 2019 mencapai 70% sesuai dengan yang ditargetkan sehingga persentase capaian sebesar 100%.

2. Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi unggul

Pembangunan dan pembenahan sarana dan prasarana untuk menjadikan pulau kalao menjadi pusat pembiakan ternak unggul belum dapat direalisasikan karena pertimbangan dana yang belum memungkinkan sehingga capaian kinerja untuk indikator ini sampai Tahun 2019 masih belum ada.

3. Persentase peningkatan produksi ternak

Proses peningkatan populasi ternak mencakup 9 (unggas), yaitu sapi potong, kerbau, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam ras pedaging, ayam ras petelur dan itik.

a. Sapi Potong

Untuk capaian kinerja populasi ternak sapi potong sebesar 100,60% dengan kriteria sangat baik, bahkan dapat melewati target yang telah ditetapkan. Populasi ternak sapi potong mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Mulai Tahun 2015 yaitu 16.756 ekor menjadi 18.070

ekor di Tahun 2016, kemudian pada Tahun 2017 mencapai 18.894 ekor, Tahun 2018 dapat mencapai 19.996 ekor dan Tahun 2019 menjadi 21.823 ekor yang tersebar di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan penambahan populasi terbanyak berada di Kecamatan Pasimasunggu. Peningkatan populasi ini juga didukung dengan sistem kawin suntik (inseminasi buatan), pengadaan bibit sapi dan adanya usaha pencegahan penyakit ternak serta pengembangan hijauan pakan ternak.



Gambar 1.24
Inseminasi buatan
bagi kelompok tani

b. Kerbau

Untuk populasi ternak kerbau, capaian kinerjanya 98,96% berkriteria baik walaupun kurang dari target yang ditetapkan. Populasi ternak kerbau pada Tahun 2019 adalah sebanyak 4.847 ekor yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 4.727 ekor, Tahun 2017 sebanyak 4.648 ekor dan 4.674 ekor pada Tahun 2016 dan tahun 2015 sekitar 4.588 ekor. Peningkatan populasi ini sangat lamban dibandingkan dengan ternak lainnya, karena kurangnya minat masyarakat dalam memelihara kerbau yang masa perkembangbiakannya lama. Populasi ternak kerbau terbanyak di Kecamatan Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur.

c. Kuda

Pencapaian kinerja untuk populasi kuda sebesar 99,23% berkriteria sangat baik. Dimana jumlah populasi kuda pada Tahun 2019 adalah sebanyak 4.108 ekor dari 4.140 ekor yang ditargetkan. Jumlah ini mengalami peningkatan dari Tahun 2018 yang hanya sebanyak 3.975 ekor dan Tahun 2017 sebanyak 3.869 ekor. Sedangkan pada Tahun 2015 sekitar 3.766 ekor meningkat menjadi 3.884 ekor di Tahun 2016. Sebaran populasi kuda terbanyak di Kecamatan Bontosikuyu.

d. Kambing

Untuk ternak kambing, capaian kinerjanya sebesar 100,12% dengan kategori sangat baik. Populasi kambing pada Tahun 2019 adalah sebanyak 90.582 ekor dari 90.476 ekor yang ditargetkan. Jumlah ini mengalami peningkatan dari Tahun 2018 yang hanya sebanyak 86.730 ekor dan Tahun 2017 sebanyak 80.089 ekor. Sedangkan pada Tahun 2015 yaitu dari 80.831 ekor menjadi 81.465 pada Tahun 2016. Ternak kambing tersebar di seluruh kecamatan dengan populasi terbanyak di Kecamatan Bontomate'ne.

e. Domba

Untuk ternak domba, capaian kinerjanya sebesar 39,32% berkriteria kurang karena realisasi Tahun 2019 hanya 35 ekor dari 89 ekor yang ditargetkan. Jumlah ini mengalami penurunan dari Tahun 2018 yang sudah mencapai 41 ekor domba dari target 56 ekor dan pada Tahun 2017 yaitu sebanyak 59 ekor. Sedangkan populasi ternak domba pada Tahun 2015 yaitu sebanyak 36 ekor dan menjadi 46 ekor di Tahun 2016. Ternak domba ini hanya terdapat di Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai.

f. Ayam Kampung (Buras)

Capaian kinerja untuk populasi ayam kampung (buras) sebesar 103,17% yang menandakan bahwa persentase capaian kinerjanya

sangat baik karena populasi ayam kampung (buras) Tahun 2019 adalah sebanyak 285.766 dari 276.997 ekor yang dtargetkan. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding Tahun 2018 yang mencapai 315.621 ekor dan Tahun 2017 sebanyak 270.111 ekor. Sedangkan pada Tahun 2015 jumlah ternak ayam kampung sebanyak 272.372 ekor dan pada Tahun 2016 sebanyak 271.856 ekor. Ternak ayam kampung (buras) hampir tersebar luas di seluruh kecamatan dengan sebaran terbanyak di Kecamatan Bontomanai.

g. Ayam Ras Pedaging

Untuk ternak ayam ras pedaging, persentase capaian kinerjanya sebesar 100,35% berkriteria sangat baik. Dimana populasi ayam ras pedaging ditargetkan 13.791 ekor dan terealisasi sebanyak 11.030 ekor. Jumlah ini mengalami peningkatan dari Tahun 2018 yang hanya terealisasi sebanyak 9.019 ekor. Sedangkan pada Tahun 2017 sebanyak 7.669 ekor, 8.968 ekor pada Tahun 2016 dan 12,027 ekor pada Tahun 2015.

h. Ayam Ras Petelur

Untuk ternak ayam ras petelur, persentase kinerja yang dicapai yaitu 115,27%. Hal ini menunjukkan kriteria sangat baik bahkan melewati target dari 13.791 ekor dan terealisasi sebanyak 15.897 ekor. Jumlah populasi ayam ras petelur mengalami penurunan dibanding Tahun 2019 yaitu sebanyak 17.226 ekor. Pada Tahun 2015 populasi ayam ras petelur sebesar 11.413 ekor menjadi 13.371 ekor pada Tahun 2016 dan pada Tahun 2017 menjadi 17.371 ekor. Ayam ras petelur banyak terdapat di Kecamatan Benteng dan Kecamatan Bontomanai.

i. Itik

Untuk ternak itik berkategori sangat baik dengan persentase capaian kinerjanya sebesar 101,83% dari target 7.506 ekor dan terealisasi sebanyak 7.643 ekor. Jumlah ini mengalami penurunan dibanding

Tahun 2018 yang mencapai 8.240 ekor. Sedangkan populasi itik Tahun 2015 sebanyak 5.691 ekor meningkat menjadi 6.836 ekor pada Tahun 2016 dan 9.525 ekor pada Tahun 2017.

Tabel 3.26.2.1
Perbandingan Capaian Populasi Ternak (ekor) 2016 – 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		2016	2017	2018	2019
1.	Peningkatan populasi sapi potong	18.060	18.894	19.996	21.823
2.	Peningkatan populasi Kerbau	4.674	4.648	4.727	4.847
3.	Peningkatan populasi Kuda	3.856	3.869	3.975	4.108
4.	Peningkatan populasi Kambing	81.465	80.089	86.730	90.582
5.	Peningkatan populasi Domba	46	56	41	35
6.	Peningkatan populasi Ayam Buras	271.014	270.111	315.621	285.766
7.	Peningkatan populasi Ayam Ras Pedaging	8.968	12.027	9.019	11.030
8.	Peningkatan populasi Ayam Ras Petelur	13.371	16.770	17.226	15.897
9.	Peningkatan populasi Itik	6.886	9.525	8.240	7.643

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2019

23.3. Program Pengembangan Hutan Rakyat

Tabel 3.26.3
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	434,62 Ha (15,76%)	-	-	456,35 Ha (21,55%)	-	-
3	Produksi hasil hutan (m ³)	756,12 M3	-	-	907,34 M3	-	-

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		(72,80%)			(107,35%)		
2	Kerusakan hutan dan lahan (ha)	41.532,99 Ha (-2,91%)	-	-	42.076,64 Ha (-3,97%)	-	-
Rata-rata Capaian Kinerja				-	Rata-rata Capaian Kinerja		-

Untuk ke 3 (tiga) indikator ini sejak Tahun 2017 pengelolaannya telah dialihkan ke provinsi sehingga pihak pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah tidak mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan tersebut.

23.4. Program Peningkatan Produksi Perikanan dan Kelautan

Tabel 3.26.4
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 23

No.	Indikator	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (ton dan %)	(29,63%) 31.312,07 ton	21.592,5 ton	68,96%	(36,69 %) 33.503,92 ton	28.268,30	84,37%
2	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (ton dan %)	(9%) 879,57	493,02	56,05%	(13 %) 905,96	573,12	63,26%
3	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	(7,69%) 126	132 ton	104,76%	(11,11 %) 130	165,75	127,50%
4	Persentase peningkatan konsumsi ikan (kg/orang/tahun)	(4,15%) 51,5	53,45	103,79%	(5,16%) 52	57,4	110,39%
Rata-rata Capaian Kinerja				83,39%	Rata-rata Capaian Kinerja		96,38%

Program peningkatan produksi perikanan dan kelautan didukung oleh 4 (empat) indikator utama yang dilaksanakan untuk meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi). Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTP) adalah perbandingan pendapatan nelayan dan pembudidaya terhadap pengeluaran nelayan dan pembudidaya selama satu tahun. Apabila NTP dan NTPi mencapai di atas 100 berarti nelayan dan pembudidaya ikan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya. Semakin tinggi Nilai Tukar, secara relatif semakin kuat kemampuan daya beli nelayan/pembudidaya tersebut. Oleh sebab itu Nilai Tukar dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator dini tingkat kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.

Pengukuran NTN dan NTPi selama ini belum dapat dilakukan secara internal karena memerlukan biaya yang cukup besar. Pengukuran terhadap NTN dan NTPi masih mengacu kepada data yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 3.26.4.1
Pengukuran Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan
Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	100	107,62	107,62	Sangat Tinggi
	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	Nilai	100	104,13	104,13	Sangat Tinggi

Sumber : Rilis Laporan NTN dan NTPi Sulawesi Selatan Tahun 2019, DKP Propinsi Sulawesi Selatan

Berikut ini dijelaskan lebih rinci capaian 4 (empat) indikator dalam pencapaian program peningkatan produksi perikanan dan kelautan.

1. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

Produksi perikanan tangkap adalah jumlah volume produksi perikanan hasil tangkapan yang didaratkan di tempat-tempat pendaratan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga estimasi produksi perikanan hanya ditujukan pada produksi perikanan yang didaratkan di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 3.26.4.2
Data Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019

No	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	4.293.7	10.214,0	7.569.8	6.190.8	28.268,3
Sumber : Data Statistik Perikanan Tahun 2019						

Tabel 3.26.4.3
Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	33.503,92	28.268,3	84.37	Tinggi

Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 mencapai 28.268,3 ton atau hanya sebesar 84.37 % dari jumlah yang ditargetkan. Meskipun belum mencapai target kinerja, namun jumlah produksi ini meningkat sebesar 6,675.8 ton atau sebesar 30.92 % dari tahun sebelumnya. Meningkatnya jumlah produksi perikanan tangkap akan berkontribusi secara nyata terhadap meningkatnya pendapatan nelayan (NTN) dan nilai PDRB subsektor perikanan. Perbandingan antara target kinerja dan capaian indikator peningkatan produksi perikanan tangkap selama periode Renstra 2016 – 2019, disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.26.4.4
Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Produksi Perikanan Tangkap

Uraian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap	Periode RENSTRA				
	Awal 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Target (Ton)	24,155.8 0	26,598.7 7	28,992.6 6	31,312.07	33,503.92
Realisasi (Ton)	24,155.8 0	24,092.6 0	20,152.2 0	21,592.5 0	28,268.30
Capaian (%)	100.00	90.58	69.51	68.96	84.37

Sumber : Statistik Perikanan Tahun 2016 - 2019

Permasalahan utama yang mempengaruhi masih kurangnya jumlah produksi perikanan tangkap adalah tingginya intensitas penjualan ikan di atas kapal (transshipment) dan banyaknya nelayan luar dengan armada dan alat tangkap yang lebih maju. Kedua permasalahan utama yang

menjadi alasan tidak terdaratkannya produksi tangkapan di Selayar, disebabkan oleh :

1. Belum adanya kawasan pendaratan ikan yang mengintegrasikan seluruh bisnis perikanan, sehingga tidak memberikan kepastian harga dan pasar bagi nelayan.
2. Selain kurangnya sarana dan prasarana, beberapa infrastruktur perikanan belum dimanfaatkan dengan baik pada PPI Bonehalang dan sentra-sentra pendaratan ikan lainnya.
3. Belum optimalnya pengembangan kerjasama kelembagaan antara nelayan tangkap dengan pengusaha perikanan di daerah.

4. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya adalah jumlah volume produksi perikanan budidaya yang dihasilkan oleh pelaku usaha pembudidaya di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, baik produksi budidaya laut (rumput laut dan ikan hidup), budidaya air tawar (lele), dan budidaya air payau (udang dan bandeng). Jumlah produksi budidaya berdasarkan data triwulan tahun 2019, dan pengukuran capaian indikator kinerja disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.26.4.5
Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2019

No	Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Jumlah
1.	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	249	166	67,26	91,15	573,11
Sumber : Statistik Perikanan Tahun 2019						

Tabel 3.26.4.6
Pengukuran Capaian pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	905,96	573,11	63,26	Rendah
Sumber : Statistik Perikanan, Tahun 2019						

Tabel 3.26.4.7
Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Produksi Perikanan Budidaya

Uraian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya	Periode RENSTRA				
	Awal 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Target (Ton)	804.93	829.08	853.95	879,57	905,96
Realisasi (Ton)	804.93	465,30	456,20	493,02	573,11
Capaian (%)	100,00	56,12	53,42	56,05	63,26
Sumber : Statistik Perikanan, Tahun 2016 – 2019					

Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 mencapai 573,11 ton atau hanya sebesar 63.26 % dari nilai yang ditargetkan dengan predikat rendah. Beberapa kondisi yang menyebabkan rendahnya pencapaian target indikator pada produksi perikanan budidaya antara lain:

1. Usaha budidaya tambak masih didominasi skala kecil, tradisional, dan subsistem.
2. Tingginya biaya investasi dan operasional pada usaha perikanan budidaya menyebabkan jumlah pelaku usaha budidaya menurun.

3. Beberapa pembudidaya tambak gagal panen akibat penyakit dan pengelolaan yang kurang baik.
4. Usaha budidaya rumput laut di beberapa lokasi tidak berhasil akibat tercemarnya perairan.

5. Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan

Jumlah produksi olahan hasil perikanan tahun 2019 mencapai 165,75 ton dan melampaui target sebesar 127.50 %. Jumlah produksi olahan tersebut juga naik sebesar 35,75 ton atau sebesar 25.56 % dari pada periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini terjadi disebabkan naiknya produksi perikanan tangkap dan kelompok pelaku usaha pengolah dan pemasar hasil perikanan (POKLAHSAR) pada tahun ini. Adapun capaian kinerja pada indikator produksi olahan hasil perikanan diuraikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.26.4.8
Target dan Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Produksi Olahan Hasil Perikanan (Ton)	Jumlah	130	165,75	127.50	Sangat Tinggi

Sumber : Statistik Perikanan Tahun 2019

Untuk membandingkan capaian target dan indikator capaian pada Produksi Olahan Hasil Perikanan selama periode Renstra 2016 -2019 diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.26.4.9
Perbandingan Capaian Indikator Produksi Olahan Hasil Perikanan

Uraian Indikator Kinerja Produksi Olahan Hasil	Periode RENSTRA				
	Tahun Awal	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun

	2015	2016	2017	2018	2019
Target (Ton)	117	120	123	126	130
Realisasi (Ton)	117	121,3	123	132	165,75
Capaian (%)	100,00	101,08	100,00	104,80	127,50
Sumber : Statistik Perikanan, Tahun 2016 - 2019					



Gambar 1.25:
Pengolahan ikan secara tradisional

6. Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan

Pengumpulan dan pengolahan data untuk nilai konsumsi ikan tidak dilakukan secara internal, karena selain biaya dan instrumen, metode pengukuran membutuhkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan khusus pendataan. Sehingga data konsumsi ikan merupakan data sekunder dari Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan. Konsumsi ikan merupakan salah satu cara untuk mengetahui tingginya kebutuhan ikan oleh sebuah daerah atau wilayah. Pada tahun 2019, konsumsi ikan di kabupaten Kepulauan Selayar ditargetkan sebesar 52 kg/orang/tahun dan terealisasi sebesar 57,4 kg/orang/tahun atau 110,3 %.

Ketersediaan produk perikanan tangkap yang tinggi dan budaya konsumsi masyarakat terhadap produk ikan, merupakan pendorong tingginya angka konsumsi ikan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun nilai konsumsi ikan tahun 2019 diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.26.4.10
Perbandingan antara target dan realisasi Indikator Kinerja Konsumsi Ikan

Uraian Indikator Kinerja Produksi Perikanan Budidaya	Periode RENSTRA				
	Awal 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Target (Perkapita)	49,45	50,5	51,0	51,5	52,0
Realisasi (Perkapita)	49,45	53,45	53,45	53,45	57,4
Capaian (%)	100,00	105.84	104.80	103,79	110.39
Diolah dari berbagai sumber data					

Tabel 3.26.4.11
Capaian Indikator Kinerja pada Konsumsi Ikan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pengukuran
1.	Konsumsi Ikan	Kg/Orang/Tahun	52	57,4	110.39	Sangat Tinggi
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2019						



Gambar 1.26:

Mancing Mania bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan

Dalam upaya meningkatkan capaian kinerja di tahun yang akan datang, maka langkah yang akan ditempuh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Membangun komitmen pejabat dan para pengambil keputusan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja.
2. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan serta program dan kegiatan dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, instansi pemerintah propinsi maupun pusat atau pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan.
3. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Sasaran Strategis 24

Terpeliharanya Kelestarian Sumberdaya Alam

Sasaran strategis 24 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi kelima sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Alam Sesuai Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Daerah”**. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk mengukur sasaran kedua puluh empat ini terdapat 1

243

(satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **99,60%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 24

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Lingkungan Hidup	78,7	66,235	84,16%	78,9	78,74	99,60%
Rata-rata Capaian Kinerja				84,16%	Rata-rata Capaian Kinerja		99,60%

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019, maka dapat diketahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (\text{IKA} \times 30\%) + (\text{IKU} \times 30\%) + (\text{ITL} \times 40\%) \\
 &= (61,04 \times 30\%) + (82,62 \times 30\%) + (89,12 \times 40\%) \\
 &= \mathbf{78,74}
 \end{aligned}$$

Peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kepulauan Selayar diukur berdasarkan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dimana nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada Tahun 2019 adalah sebesar 78,74. Nilai IKLH ini mengalami peningkatan dari Tahun 2018 yang lalu yang hanya sebesar 66,23. IKLH pada Tahun 2019 didukung oleh Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 61,04, Indeks Kualitas Udara (IKU) 82,62 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 89,12.

Tabel 3.27.1 :
Data perbandingan IKLH

Tahun	IKLH Kabupaten Kepulauan Selayar	IKLH Tingkat Nasional	Keterangan
2015	78,08	64,84	Lebih baik
2016	74,83	65,73	Lebih baik
2017	70,86	66,46	Lebih baik
2018	66,23	71,67	Lebih rendah
2019	78,74	66,56	Lebih baik

Sumber : P3E Suma

1. Indeks Kualitas Air

Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahun 2019 adalah sebesar 61,04. Bila dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan sebesar 55, maka persentase capaian kerjanya adalah 110,98 %. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2016 s/d Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.27.2
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air

No	Tahun Renstra	IKA		%
		Target	Realisasi	
1	2016	52,9	42,01	79,41
2	2017	53	41,50	78,30
3	2018	54	30,71	56,87
4	2019	55	61,04	110,98

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019

Untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk

menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Khusus untuk Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Standar Baku Mutu dan Kriteria Kerusakan Lingkungan Hidup disimpulkan bahwa sungai yang dipantau (berdasarkan 7 sampel yang telah dianalisis) dalam kondisi cemar sedang. Selain pemantauan kualitas sungai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah melakukan pemantauan kualitas air laut, kualitas air sumur, kualitas limbah padat dan limbah cair.

2. Indeks Kualitas Udara

Tabel 3.27.3
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara

No	Tahun Renstra	IKU		Persentase
		Target	Realisasi	%
1	2016	99,98	99,97	99,99
2	2017	99,98	87,55	87,57
3	2018	99,98	82,62	82,64
4	2019	99,98	82,62	82,64

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2019 adalah sebesar 82,62 dari 99,98 yang ditargetkan dengan persentase capaian 82,64%. Kualitas udara sangat dipengaruhi uji emisi kendaraan yang menggunakan bahan bakar bensin (NO_2) 0,18 sedangkan untuk uji emisi industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya (SO_2) 0,64.

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2019 adalah sebesar 89,12. Bila dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan sebesar 70,74, maka persentase capaian kerjanya adalah 125,98 %. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Realisasi kinerja tahun ini sebesar 89,12 meningkat 9 Point, bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 80,59. Adapun capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan tahun ini sebesar 125,98 % meningkat, bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 114,04 % yang juga telah melewati target.

Untuk lebih rinci, perbandingan capaian kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2016 s/d Tahun 2019, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.27.4 :
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan

No	Tahun Renstra	IKTL		%
		Target	Realisasi	
1	2016	70,54	80,59	114,25
2	2017	70,60	80,59	114,15
3	2018	70,67	80,59	114,04
4	2019	70,74	89,12	125,98

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Penghitungan IKTH dilakukan dengan membandingkan antara luas hutan dengan luas wilayah administrasinya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTH, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTH tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas

wilayah administrasinya. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 adalah 89,12.

Keberadaan hutan di Kepulauan Selayar yang meliputi Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas pengelolaannya telah menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 dan selebihnya adalah hutan hak. Hutan lindung (*protection forest*) maupun hutan produksi terbatas, pengelolaannya telah dilimpahkan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, namun operasionalisasinya berada dalam koordinasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Selayar. Dalam hal penanganan kawasan hutan, Tahun 2019 oleh KPH Selayar telah melakukan beberapa upaya diantaranya adalah reboisasi dalam kawasan hutan Jampea seluas 150 hektar sementara diluar kawasan hutan seluas 30 dalam bentuk perhutanan rakyat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel: 3.27.5
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kepulauan Selayar

Kecamatan	Hutan Mangrove Sekunder (Ha)	Hutan Primer (Ha)	Hutan Sekunder (Ha)
Benteng	0	0	190,31
Bontoharu	95,84	0	8.107,83
Bontomanai	0	0	10.986,01
Bontomatene	0	0	11.166,37
Bontosikuyu	0,88	38,03	16.141,74
Buki	0	0	3.695,48
Pasilambena	33,26	140,14	5.610,20
Pasimarannu	0	10.392,45	2.005,90
Pasimasunggu	57,54	0	8.783,68
Pasimasunggu Timur	125,27	0	3.107,41
Takabonerate	0	5,30	528,86
Total	312,79	10.575,92	70.323,79

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Selain kawasan hutan, keberadaan lahan kritis merupakan salah satu kawasan yang luasannya cukup luas dan produktivitas lahan masih kurang dalam hal pengelolaannya. Sehingga perlu ada kegiatan rehabilitasi lahan pada lahan kritis, sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya alam

yang ada untuk dapat dikembangkan dan dilestarikan. Kegiatan merehabilitasi lahan kritis memerlukan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan mutu sumber daya manusia yang menangani lahan kritis merupakan salah satu kunci penentu keberhasilan pencapaian sasaran rehabilitasi lahan kritis. Untuk lebih jelasnya, luas kawasan penggunaan lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 3.27.6
Luas Kawasan Penggunaan Lainnya

Kecamatan	Lahan Terbuka	Pemukiman	Perkebunan	Rawa	Savana	Sawah	Semak Belukar	Tambak
Benteng	11,64	289,65	0	0	0	4,09	0	0
Bontoharu	14,69	191,05	1.438,83	0	0	2.593,75	47,51	267,36
Bontomanai	0	254,23	438,39	0	0	1.061,49	0	0
Bontomatene	10,78	327,86	0	0	0	3.960,56	262,78	0
Bontosikuyu	975,99	220,28	1.815,99	7,94	0	862,18	851,44	133,85
Buki		149,55	0	0	0	2.991,42	0	0
Pasilambena	254,05	62,18	2.944,85	0	0	1.205,61	13,61	0
Pasimarannu	120,07	61,21	4.195,27	1,01	121,16	488,06	0	0
Pasimasunggu	740,63	114,26	481,32	78,89	0	1.407,63	443,39	65,36
Pasimasunggu Timur	13,51	90,32	23,14	0	0	1.738,33	0	316,75
Takabonerate	420,87	97,20	1.285,70	0	0	0	231,06	1,34
Total	2.562,23	1.857,79	12.623,49	87,84	121,16	16.313,12	1.849,79	784,66

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya meningkatkan tutupan vegetasi dan perlindungan dan konservasi sumber daya alam telah melakukan berbagai upaya antara lain:

1. Dengan melakukan penghijauan dan reboisasi serta pelatihan terhadap masyarakat sebagai perubahan pola pikir. Kegiatan penghijauan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 tersebar di enam kecamatan yaitu kecamatan Buki, Bontomanai, Benteng, Bontoharu, Bontosikuyu, dan Kecamatan Pasimasunggu. Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk penyediaan bibit tanaman, baik tanaman kayu-kayuan maupun tanaman yang sifatnya multi purpose tree species (MPTS). Jenis bibit yang diadakan untuk kegiatan penghijauan

sebanyak 5 jenis yaitu bibit Pucuk Merah, Glodogan Tiang, Jati Super, Pala, dan Bibit Cengkeh.

2. Pembuatan transplantasi karang di Desa Pamatata Kec. Bontomatene.
3. Melakukan kegiatan penanggulangan kerusakan lingkungan sebanyak 12 lokasi dengan penanaman bibit bambu di sempadan sungai, penanaman bibit kenari di sempadan sungai/sumber mata air, penanaman Ketapang Kencana pada jalur jalan kota dan penanaman glodogan tiang serta Gerakan Bersih Pantai.
4. Kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air juga dilaksanakan dengan 2 lokasi pelaksanaan yaitu yaitu sumber air topa dan sungai giring-giring.

Pada tahun 2019, luas RTH Publik sebesar 1.858,51 Ha dari luas wilayah Kepulauan Selayar 135.663 Ha atau sebanyak 1,37%. Dan secara khusus Kecamatan Benteng mempunyai luas RTH Publik sebesar 50,20 Ha dari luas wilayah 2.463 Ha atau sebanyak 2,04%. Secara keseluruhan, luas ruang terbuka hijau Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 3.27.7
Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2019

Kecamatan	Luas Wilayah		Luas RTH Publik (Ha)	% RTH Publik	Ket.
	Km2	Ha			
Benteng	24,63	2.463	50,20	2,038	
Bontoharu	128,21	12.812	40,04	0,313	
Bontomanai	136,42	13.642	430,51	3,156	
Bontomatene	193,05	19.305	24,39	0,126	
Buki	67,74	6.774	1.115,77	16,471	
Bontosikuyu	248,22	24.822	60,00	0,242	
Pasimasunggu Timur	67,14	6.714	30,00	0,447	
Pasimasunggu	131,8	13.180	35,00	0,266	
Pasimarannu	195,33	19.533	40,00	0,205	
Pasilambena	114,88	11.488	30,00	0,261	
Taka Bonerate	49,3	4.930	2,60	0,053	
Total RTH Publik		135.663	1.858,51	1,37	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019

Terhadap pencapaian indikator tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menemukan hambatan antara lain:

1. Kurangnya pemahaman pihak pemerintah dan masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Kurangnya kesadaran pihak pemilik usaha/kegiatan terhadap kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Adanya pemahaman yang salah terhadap dokumen lingkungan yang dianggap hanya sebagai bahan pelengkap administrasi dalam pengajuan permohonan kredit.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan lingkungan hidup;
2. Menyusun peraturan terkait pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Menyusun peta indikatif daya dukung dan daya tampung Kabupaten;
4. Melakukan bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha;
5. Melakukan pengangkatan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup.

Sasaran Strategis 25

Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran strategis 25 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan”**. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja serta Dinas sosial. Untuk mengukur sasaran kedua puluh lima ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian

kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **35,78%** dengan kategori predikat sasaran **Sangat rendah**. Hasil pengukuran peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 25

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	16,30 (56.992)	55.866	98,02%	27,95 %	12,64%	45,22%
2.	Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	700	281	40,14%	1.200	316	26,33%
Rata-rata Capaian Kinerja				69,08%	Rata-rata Capaian Kinerja		35,78%

1. Rasio daya serap tenaga kerja (%)

Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja adalah sebesar 63.749 orang dengan rincian jumlah yang bekerja sebanyak 62,548 orang dan yang masih mencari pekerjaan sebanyak 1.201 orang atau sekitar 1,88% orang (merupakan pengangguran terbuka). Sedangkan jumlah yang bukan angkatan kerja adalah sebanyak 32.607 orang dengan rincian 6.951 orang masih bersekolah, 20.570 orang mengurus rumah tangga dan lainnya sebanyak 5.086 orang.

Tabel 3.28.1
Distribusi Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kegiatan

No.	Kegiatan Utama (Main Activity)	Jenis Kelamin (Sex)		
		Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah (Total)
1.	Angkatan Kerja / <i>Economically Active</i> :	38.659	25.090	63.749
	- Bekerja	37.751	24.797	62.548
	- Mencari Pekerjaan	908	293	1.201

2.	Bukan Angkatan Kerja/ <i>Economically Inactive</i>	6.587	26.020	37.815
	- Sekolah	3.109	3.842	7.780
	- Mengurus Rumah Tangga	407	20.163	24.553
	- Lainnya	3.071	2.015	5.482
Jumlah Jiwa		45.246	51.110	96.356

Sumber: Kepulauan Selayar Dalam Angka (BPS 2019)

2. Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)

Untuk mengetahui persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan, diukur dari jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi dengan jumlah pencari kerja yang mendaftar pada Tahun 2019. Dari 1.200 orang yang ditargetkan dalam RPJMD pada Tahun 2019 yang terealisasi hanya 316 orang dengan persentase capaian sekitar 26,33%. Walaupun tidak mencapai target yang telah ditetapkan namun jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada Tahun 2019 mengalami peningkatan dari Tahun 2018 yang hanya sebanyak 281 orang dari 700 orang yang ditargetkan. Beberapa kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dalam pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Masih kurangnya lowongan pekerjaan di kabupaten Kepulauan Selayar baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta
- b. Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat pencari kerja itu sendiri untuk didata sehingga pihak Dinas PMPTSPK bisa memberikan feedback manakala ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
- c. Tidak adanya laporan dari pencari kerja ketika mendapatkan pekerjaan
- d. Sejumlah perusahaan menerima/membuka lowongan tidak mempersyaratkan AK1/Kartu Pencari Kerja sehingga pekerja yang ditempatkan tidak terdata.

Berdasarkan hal tersebut diatas , maka langkah strategis yang perlu diambil oleh pemerintah daerah adalah:

- Meningkatkan kesempatan kerja baik dengan perluasan maupun pengembangan kesempatan kerja;
- Menciptakan lapangan kerja melalui tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja khusus (disabilitas);
- Peningkatan informasi pasar kerja dan bursa kerja online;
- Pemberdayaan dan perluasan kerja bagi petani dan nelayan;

Sasaran Strategis 26

Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan

Sasaran strategis 26 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi keenam sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu “**Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan**”. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk mengukur sasaran kedua puluh enam ini terdapat 1 (satu) indikator sasaran dengan capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 adalah sebesar **101,24%** dengan kategori predikat **Sangat tinggi**. Hasil pengukuran peningkatan daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.29
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 26

No	Indikator	Tahun 2018			Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam	18.242	18.639	102,2%	19.270	19.347 (UMKM)	101,24%

	memperkuat ekonomi kerakyatan					162 (Koperasi)	
Rata-rata Capaian Kinerja			102,2%	Rata-rata Capaian Kinerja		101,24%	

1. Koperasi

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam tatanan perekonomian, koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang tumbuh dikalangan masyarakat luas sebagai pendorong tumbuhnya ekonomi dengan berasaskan kekeluargaan. Berikut data capaian kinerja koperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 3.29.1
Persentase Koperasi Tahun 2019

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Tahun 2019		CAPAIAN (%)
		TARGET	REALISASI	
1.	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan, Daya Saing dan Kemandirian Koperasi :			
	a. Persentasi Koperasi Aktif	123	132	107,3
	b. Persentasi Koperasi Sehat	140	162	115,7
	c. Persentase Koperasi yang Berprestasi	4	3	75

Sumber data: Dinas perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM 2019

- ✓ Jumlah koperasi aktif sampai dengan per 31 Desember 2019 adalah sebanyak 133 koperasi dari 162 koperasi yang ada.
- ✓ Menerima penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia sejak tahun 2016-2019 sebagai Koperasi Berprestasi yaitu koperasi Kontue Toje', Koperasi Sadar dan Koperasi Primer Kepolisian.
- ✓ Hasil Pemutakhiran data koperasi se Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.29.2
 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 - 2019
 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah koperasi aktif	129	135	130	136	145	131	132
2	Jumlah koperasi	178	184	186	189	189	161	162
3	Persentase koperasi aktif	72,47	73,37	69,89	71,96	76,72	81,37	81,48

Sumber data: Dinas perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM 2019

Tabel 3.29.3
 Persentase Koperasi Aktif Menurut Kecamatan Tahun 2013 - 2019
 Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kecamatan Benteng							
	Jumlah koperasi aktif	45	48	43	48	57	44	44
	Jumlah koperasi	79	82	84	86	86	63	63
	Persentase koperasi aktif	56,96	58,54	57,14	55,81	66,28	69,84	69,84
2	Kecamatan Bontoharu							
	Jumlah koperasi aktif	8	9	9	10	10	9	9
	Jumlah koperasi	10	11	11	12	12	10	10
	Persentase koperasi aktif	80	81,82	81,82	83,33	83,33	90	90
3	Kecamatan Bontomanai							
	Jumlah koperasi aktif	10	11	11	11	11	10	10
	Jumlah koperasi	13	14	14	14	14	12	12
	Persentase koperasi aktif	76,92	78,57	78,57	78,57	78,57	83,33	83,33
4	Kecamatan Bontomatene							
	Jumlah koperasi aktif	15	15	15	15	15	16	16
	Jumlah koperasi	18	18	18	18	18	18	18

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Persentase koperasi aktif	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	88,89	88,89
5	Kecamatan Buki							
	Jumlah koperasi aktif	12	12	12	12	12	5	5
	Jumlah koperasi	15	15	15	15	15	6	6
	Persentase koperasi aktif	80	80	80	80	80	80	80
6	Kecamatan Bontosikuyu							
	Jumlah koperasi aktif	6	6	6	6	6	12	13
	Jumlah koperasi	7	7	7	7	7	15	16
	Persentase koperasi aktif	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	80	81
7	Kecamatan Pasimasunggu							
	Jumlah koperasi aktif	7	7	7	7	7	7	7
	Jumlah koperasi	8	8	8	8	8	8	8
	Persentase koperasi aktif	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5	87,5
8	Kecamatan Pastim							
	Jumlah koperasi aktif	4	4	4	4	4	4	4
	Jumlah koperasi	6	6	6	6	6	4	4
	Persentase koperasi aktif	66,67	66,67	66,67	66,67	66,67	100	100
9	Kecamatan Pasimarannu							
	Jumlah koperasi aktif	8	8	8	8	8	9	9
	Jumlah koperasi	8	8	8	8	8	9	9
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100	100	100
10	Kecamatan Takabonerate							
	Jumlah koperasi aktif	9	9	9	9	9	9	9
	Jumlah koperasi	9	9	9	9	9	9	9
	Persentase koperasi aktif	100	100	100	100	100	100	100
11	Kecamatan Pasilambena							
	Jumlah koperasi aktif	5	5	5	5	5	5	5
	Jumlah koperasi	6	6	6	6	6	6	6
	Persentase koperasi aktif	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3
	Total Jumlah koperasi aktif	129	135	130	136	145	131	132
	Total Jumlah koperasi	178	184	186	189	189	161	162

NO	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Total Persentase koperasi aktif	72,47	73,37	69,89	71,96	76,72	81,37	81,48

Sumber data: Dinas perindustrian, Perdagangan , Koperasi dan UKM 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah koperasi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana pada Tahun 2017 terdapat 189 koperasi di Kabupaten Kepulauan Selayar sedangakn pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 161. Pada Tahun 2019, terbentuk satu koperasi yaitu Koperasi Nelayan Dopa Bersatu sehingga jumlah koperasi menjadi 163.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator diatas oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kepulauan Selayar adalah:

1. Masih rendahnya pelaksanaan ART
2. Adanya tunggakan penerima bantuan
3. Kegiatan usaha tidak berjalan
4. Belum optimalnya pengelolaan sentra produksi
5. Terbatasnya tenaga terampil

Adapun langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM terhadap permasalahan yang dihadapi adalah dengan :

1. Merestrukturisasi Kelembagaan/Penataan system dan prosedur kinerja organisasi yang professional
2. Mengoptimalkan penagihan terhadap penerima bantuan yang menunggak
3. Melakukan pendampingan untuk berjalannya kegiatan usaha koperasi
4. Meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengelola UKM secara swadaya
5. Program penciptaan, penguatan dan fasilitasi UMKM yang produktif

2. Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pada Tahun 2019 jumlah Usaha Kecil Menengah adalah sebanyak 19.347 UKM dari target 19.270 dengan persentase capaian sekitar 101,24%. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan dari 18.639 pada Tahun 2018 dari 18.242 yang ditargetkan. Sejalan dengan itu berbagai bantuan peralatan bagi pelaku usaha yang merupakan Program Prioritas/Gratis Bupati Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2019 (sebanyak 901 Unit/Set Peralatan atau peningkatannya sekitar 41,07% dari tahun sebelumnya sebanyak 217 Unit/Set peralatan, tahun 2018 sebanyak 370 Unit/Paket peralatan atau sekitar 58,65%) dapat meningkatkan pendapatan IKM secara keseluruhan, dan pendapatan rata-rata di range Rp. 1.000.000 s/d 5.000.000,- sehingga masih mampu bersaing dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi global saat ini. Adapun program yang mendukung antara lain pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya capaian target pertambahan industri
2. Masalah permodalan menjadi permasalahan tersendiri dalam penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah
3. Tingginya ketergantungan wirausaha baru terhadap bantuan permodalan dan mesin produksi dari Pemerintah dan Pemangku kepentingan lainnya menyebabkan belum maksimalnya peningkatan produksi yang mempengaruhi peningkatan kapasitas IKM secara keseluruhan.
4. Masih belum maksimalnya pendataan perkembangan IKM sehingga masih belum maksimal disajikan secara real dan akurat.
5. Belum tersedianya sistem dan instrumen pengumpulan data yang dapat menyajikan data secara real time dan valid sehingga pengumpulan data masih bersifat manual dan membutuhkan proses lebih lama.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

1. Memfasilitasi percepatan penumbuhan kawasan industri
2. Memfasilitasi akses permodalan bagi wira usaha baru dan IKM unggulan dengan melakukan kerjasama dengan perbankan daerah/nasional, BUMN, BUMD dan instansi terkait permodalan usaha.
3. Melakukan pendampingan manajemen kewirausahaan bagi calon wirausaha baru agar dapat memiliki mental yang tanggung dalam memulai usaha.
4. Melakukan pemutakhiran data perkembangan sektor industri melalui pendekatan penggunaan teknologi informasi sehingga dapat menyajikan data secara real time dan valid sesuai dengan kebutuhan informasi data.
5. Melatih petugas pendataan industri yang disiapkan untuk kabupaten/kota serta memaksimalkan fungsi penyuluh industri dalam melakukan pendampingan kepada sentra-sentra yang vacum atau berhenti untuk difasilitasi jalan keluar dari kelangsungan produksi dan usaha IKM baik dalam bentuk modal maupun peralatan.

Sedangkan hal-hal penting lainnya yang dianggap perlu untuk dilaksanakan oleh Pemerintah daerah dimasa yang akan datang adalah:

1. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan peraturan perundang undangan dan kebijakan : pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan usaha dan perlindungan'
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat terutama dalam bidang ; produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia dan tehnologi.
3. Menyediakan pembiayaan bagi pemberdayaan usaha kecil bersama-sama dunia usaha dan masyarakat, berupa : kredit perbankan, pinjaaman lembaga keuangan bukan bank, modal, pinjaman dari penyisihan sebagian laba BUMN, hibah dan jenis pembiayaan lainnya.

4. Memfasilitasi kemitraan usaha kecil dengan usaha menengah dan besar melalui pola; inti plasma, subkontrak, dagang umum waralaba, keaagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lainnya.

Sasaran Strategis 27

Meningkatnya Kecintaan dan Kebanggaan Sebagai Orang Selayar

Sasaran strategis 27 ini merupakan salah satu upaya mencapai misi ketujuh sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021 yaitu **“Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan”**. Sasaran ini didukung oleh Sekretariat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Kepariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kecamatan. Untuk mengukur sasaran kedua puluh tujuh ini terdapat 2 (dua) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Tahun 2019 sebesar **214%** dengan kategori predikat **Sangat Tinggi**. Hasil pengukuran meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 27

No.	Indikator	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	1.500	2.269	151,27%	1.600	5.460	341%
2.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	60	60	100%	70	61	87%
Rata-rata Capaian Kinerja				125,63%	Rata-rata Capaian		214%

No.	Indikator	Tahun 2017			Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
					Kinerja		

1. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan

Pelestarian budaya sebagai rangkaian kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan dan warisan budaya ditandai dengan meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya dalam usaha mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan Tahun 2019 adalah 5.460 buah yang terdiri dari keramik 450 buah, gerabah 1 buah, fagmen kayu 4 buah, fosil kayu 2 buah, koin (kepingan) 5.001 buah, bongkahan 4,114 kg dan bongkahan besar 50 kg. Indikator kinerja ini terealisasi dengan baik karena tepat sasaran sesuai rencana, baik secara mutu, waktu, biaya dan pemanfaatannya. Dengan demikian tafsiran pencapaian Kinerja dikatakan melebihi target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1.600 buah dengan persentase capaian kinerja sekitar 341%. Capaian sangat meningkat tajam jika dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2018 lalu yaitu hanya sebanyak 2.269 buah. Adapun program yang mendukung adalah Salah satu program yang mendukung indikator kinerja adalah yaitu program pengelolaan Kekayaan Budaya.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh:

1. Pelaksanakan program dengan berbagai macam kegiatan yang mendukung pelestarian cagar budaya;
2. Dilaksanakannya pemetaan kembali tentang benda budaya, cagar budaya,

situs budaya yang perlu dilestarikan secara berkala sehingga kegiatan
pelindungan,



pengembangan, dan pemanfaatan serta pengelolaan kekayaan dan warisan budaya yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Selayar dapat lebih terfokus.

2. Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan

Warisan budaya tak benda merupakan warisan budaya yang tak bisa diindera dengan mata dan tangan, namun jelas-jelas ada di sekitar kita. Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) meliputi tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa, seni pertunjukan, adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan. Untuk indikator jumlah WBTB yang dilestarikan, realisasi capaian kinerja pada Tahun 2019 ini adalah sebanyak 61 dari 70 yang menjadi target dalam RPJMD dengan persentase capaian sekitar 87%. Walaupun belum mencapai target yang diinginkan, namun capaian kinerja ini tetap mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2018 lalu yang hanya melestarikan 60 WBTB.

Gambar 1.27:

Lomba seni antar sekolah yang dilaksanakan setiap tahun

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator tersebut adalah pengembangan nilai budaya, pengembangan keragaman budaya dan peningkatan kompetensi SDM tenaga budaya dengan kegiatan yang dilaksanakan seperti Festival keraton nusantara, Pagelaran seni budaya, Lomba seni antar sekolah serta Event pemilihan dara dan daeng.

Adapun kendala yang dihadapi sehingga pencapaian indikator ini belum maksimal adalah:

- a. Pengalokasian anggaran pendataan warisan budaya tak benda tidak dianggarkan pada Tahun 2019 sehingga belum ada pembaharuan data WBTB yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. Masih terdapatnya tradisi, ekspresi lisan dan lain-lain di masyarakat yang belum terdata sehingga menyulitkan dalam pelestarian dan pengembangan tradisi tersebut.
- c. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari pulau-pulau baik pulau besar maupun pulau kecil sehingga menyulitkan dalam pendataan WBTB.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mencapai target kinerja sebanyak 27 sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2019 maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat pada rincian realisasi anggaran berikut ini:

Tabel 3.31

Realisasi Anggaran Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama	Pelaksanaan ibadah	2.140.884.000,-	2.055.244.200,-	96%
		Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	1.104.358.826,-	1.084.346.883,-	98,19%
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan	8.651.611.000	7.673.820.838,-	88,70%
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	593.939.400,-	586.644.000,-	97,87%
		Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	6.119,935.436,-	5.968.914.209-	97,53%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	144.965.597,-	141.935.561,-	97,90%
5	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kabupaten	2.621.966.517,-	2.575.854.774,-	98,24%
6	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah	Transmigran lokal (KK)	47.000.000,-	46.649.600,-	99,25%
7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa mandiri	6.690.177.311,-	6.214.889,033,-	98,40%
		Persentase desa berkembang			
		Persentase desa tertinggal			
8	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase angka kemiskinan	9.992.015.078,-	5.200.009.166,-	51,98%
		Jumlah penduduk miskin (KK)			
9	Meningkatnya daya beli masyarakat	Income per kapita penduduk (Juta)	APBD		
10	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka melek huruf	4.468.886.123,-	4.329.160.785,-	97,25%
		Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	32.015.431.248,-	30.278.094.761,-	94,57%
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	119.006.535.916,-	90.727.418.668,-	76,24%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
12	Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	5.737.626.870,-	5.511.743.551,-	95,93%
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	335.050.000,-	329.699.230,-	98,35%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)			
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)			
13	Meningkatnya kemandirian pemuda	Persentase pemuda mandiri	2.580.000.000,-	2.446.402.769,-	94,82%
14	Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	31.275.315.000,-	31.020.409.769,-	99,18%
15	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat	1.282.630.000,-	1.184.052.001,-	92,31%
		Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut			
		Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara			
16	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar	Jalan lingkaran timur utara terbangun (%)	69.912.340.579,-	55.247.211.772,-	79,02%
		Jalan lingkaran timur tengah terbangun (%)			
		Jalan lingkaran timur selatan terbangun (%)			
		Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)			
		Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	2.755.776.789	2.189.375.130	78,87%
		Berfungsinya Bandara Kayuadi			
		Jumlah Pelabuhan Laut (%)			
		Perluasan terminal angkutan darat (%)			
		Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)			

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
		Rasio jaringan irigasi	2.890.305.100	2.265.186.307	91,90%
		Rasio ketersediaan air baku	914.520.000	772.381.000	84,46
		Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	8.613.305.165,-	7.292.754.440,-	84,67%
		Rasio ketersediaan air bersih industri (%)			
		Rumah layak huni (%)	12.992.543.600,-	12.956.584.589,-	99,72%
		Cakupan sanitasi layak (%)	17.627.482.950,-	11.750.578.912,-	66,66%
		Kawasan pemukiman kumuh tertangani (%)	10.701.846.500,-	9.415.464.410,-	87,98%
		Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	-	-	-
		Rasio elektrifikasi industri (%)			
		PLTMG terbangun dan beroperasi	-	-	-
		Terminal gas terbangun dan beroperasi	-	-	-
17	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	5.195.601.986,-	5.195.601.986,-	100%
		Jumlah kunjungan wisatawan asing			
18	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	35.731.999.700,-	596.819.465	1,67%
19	Meningkatnya investasi	Nilai PMDN	15.358.433.000,-	11.333.280.611,-	73,79%
		Nilai PMA (\$)			
20	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Realisasi pembangunan KEK pariwisata	147.400.000,-	147.400.000,-	100%
21	Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang	Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	875.925.000,-	676.434.000,-	76,37%
22	Terbangun dan berkembangnya kawasan	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik	290.100.000,-	290.099.915,-	99,99%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran			
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi	
	distribusi logistik (barang dan jasa)	(%)				
23	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (ton)	11.784.520.538,-	11.595.897.984,-	98,40%	
		Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman hortikultura (ton)				
		Persentase peningkatan produksi perkebunan (ton)				
		Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan (kw/ha)	Anggaran sama dengan anggaran persentase peningkatan produksi			
		Tingkat produktivitas pertanian tanaman hortikultura (kw/ha)				
		Tingkat produktivitas perkebunan (kg/ha)				
		Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali (%)				
	Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi unggul (%)	0	0	0%		
	Persentase peningkatan produksi ternak	3.278.307.650,-	1.866.377.920,-	57 %		
	Rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	-	-	-		
	Produksi hasil hutan (m ³)	-	-	-		
	Kerusakan hutan dan lahan (ha)	-	-	-		
	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (ton dan %)	5.336.872.350	4.825.578.163	90,42%		
	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (ton dan %)	1.971.684.000	1.869.466.980	94,82%		
	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	372.309.379,-	370.639.328,-	99,55%		
	Persentase peningkatan konsumsi ikan	Anggaran sama dengan anggaran peningkatan produksi perikanan budidaya				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Pagu/Target	Realisasi	% Realisasi
		(kg/orang/tahun)			
24	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam	Indeks Lingkungan Hidup	3.531.651.573,-	2.946.511.282,-	86,27 %
25	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	3.479.920.220,-	2.908.629.783,-,-	85,20%
		Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)			
26	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	9.778.119.250,-	7.355.971.711,-	75,22%
27	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	460.061.000,-	453.485.600,-	98,57%
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	1.210.000.000,-	1.181.997.715,-	97,69%

3.4. Analisis Efektifitas dan Efisiensi Sumber daya

Tingkat efektifitas merupakan pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan, sedangkan efisiensi merupakan penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang maksimum. Berikut ini perbandingan antara tingkat efektifitas dan efisiensi sumber daya terhadap perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) sasaran.

Tabel 3.32
Tingkat Efektivitas sumber daya Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama	Pelaksanaan ibadah	96%	100%	4%
		Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	98,19%	100%	1,81%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan	88,70%	proses	proses
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	97,87%	84,07%	-13,8%
		Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	97,53%	100,31%	2,78%
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	97,90%	99,17%	1,27%
5	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten	98,24%	105,26%	7,02%
6	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah	Transmigran lokal (KK)	99,25%	0%	-99,25%
7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa mandiri	98,40%	100%	1,6%
		Persentase desa berkembang		100%	
		Persentase desa tertinggal		100%	
8	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase angka kemiskinan	51,98%	46,12%	-7,55%
		Jumlah penduduk miskin (KK)		42,74%	
9	Meningkatnya daya beli masyarakat	Income per kapita penduduk (Juta)	APBD		
10	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka melek huruf	97,25%	100,15%	2,9%
		Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	94,57%	99,43%	4,86%
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	76,24%	101,14	24,9%
12	Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	95,93%	(KB) 71,18% (KS) 80,21%	-20,24
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	98,35%	249,74%	48,06%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		78,56%	
		Indeks Pemberdayaan		110,93%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Gender (IDG)			
13	Meningkatnya kemandirian pemuda	Persentase pemuda mandiri	94,82%	92,25%	-2,57%
14	Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	99,18%	100%	0,82%
15	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat	92,31%	60,71%	-9,92%
		Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut		90%	
		Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara		96,45%	
16	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar	Jalan lingkaran timur utara terbangun (%)	79,02%	0%	25,61%
		Jalan lingkaran timur tengah terbangun (%)		0%	
		Jalan lingkaran timur selatan terbangun (%)		0%	
		Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)		104,63	
		Kapasitas Bandara Aroepala (%)	78,87%	100 %	-13,12%
		Berfungsinya Bandara Kayuadi		0%	
		Jumlah Pelabuhan Laut (%)		47%	
		Perluasan terminal angkutan darat (%)		56%	
		Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)		60%	
		Rasio jaringan irigasi	91,90%	122,50	30,6%
		Rasio ketersediaan air baku	84,46	90,04	5,58
		Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	84,67%	77,14	-7,53%
Rasio ketersediaan air	0				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
		bersih industri (%)			
		Rumah layak huni (%)	99,72%	48,72%	-51%
		Cakupan sanitasi layak (%)	66,66%	72,77%	6,11%
		Kawasan pemukiman kumuh tertangani (%)	87,98%	4,40%	-83,58%
		Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	0	-	-
		Rasio elektrifikasi industri (%)		-	
		PLTMG terbangun dan beroperasi	0	-	-
		Terminal gas terbangun dan beroperasi	0	-	-
17	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	100%	79,49%	-26,84%
		Jumlah kunjungan wisatawan asing		66,83%	
18	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	1,67%	53%	51,33%
19	Meningkatnya investasi	Nilai PMDN	73,79%	1.044%	537%
		Nilai PMA (\$)		177,71%	
20	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Realisasi pembangunan KEK pariwisata	100%	80%	20%
21	Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang	Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	76,37%	87,27%	10,9%
22	Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa)	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	99,99%	86,67%	-13,32%
23	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (ton)	98,40%	Padi : 80,67%	-8,18%
		Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman hortikultura (ton)		Jagung : 54,89%	
		Persentase peningkatan produksi perkebunan (ton)		Jeruk Keprok : 54,33%	
				Kelapa : 91,05%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
				Pala : 105,59%	
				Cengkeh : 143,07%	
				Jambu Mete : 101,96%	
		Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan (kw/ha)		Padi : 113,09%	
				Jagung : 133,31%	
		Tingkat produktivitas pertanian tanaman hortikultura (kw/ha)		Jeruk Keprok : 64,79%	
		Tingkat produktivitas perkebunan (kg/ha)		Kelapa : 91,05%	
			98,40%	Pala : 105,59%	23,43%
				Cengkeh : 143,07%	
				Jambu Mete : 101,96%	
		Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali (%)		100%	
		Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi unggul (%)	0	0%	0%
		Persentase peningkatan produksi ternak	57%	Sapi Potong : 100,60%	
				Sapi Perah : 0%	
				Kerbau : 98,96%	
				Kuda : 99,23%	
				Kambing : 100,12%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
				Domba : 39,32%	50,36%
				Ayam Buras : 103,17%	
				Ayam Pedaging : 100,35%	
				Ayam Ras Petelur : 115,27%	
				Itik : 101,83%	
		Rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	0	-	-
		Produksi hasil hutan (m ³)	0	-	-
		Kerusakan hutan dan lahan (ha)	0	-	-
		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (ton dan %)	90,42%	84,37%	-6,05%
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (ton dan %)	94,82%	63,26%	-31,56%
		Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	99,55%	127,50%	27,95%
		Persentase peningkatan konsumsi ikan (kg/orang/tahun)	94,82%	110,39%	15,57%
24	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam	Indeks Lingkungan Hidup	86,27 %	99,80%	13,53%
25	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	85,20%	45,22%	-49,43%
		Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)		26,33%	
26	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	75,22%	101,24%	26,02%
27	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	98,57%	341%	247,43%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	97,69%	87%	-10,69%

Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) sasaran dan yang diperjanjikan dalam RPJMD, terdapat 18 (delapan belas) sasaran dengan tingkat efisiensi cukup baik dengan rata-rata capaian tingkat efisiensi penggunaan sumber daya adalah sebesar 44,50%. Selain itu terdapat 8 sasaran dengan tingkat efisiensi kurang baik dan 1 sasaran masih sementara dalam proses. Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap pencapaian kinerja misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini digambarkan hubungan antara sasaran, indikator kinerja dengan program yang mendukung pencapaian indikator tersebut serta SKPD penanggung jawab.

Tabel 3.33
Keterkaitan Sasaran Strategis, IKU dan Program

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama	Pelaksanaan ibadah Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama. 2. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama. 3. Peningkatan kualitas hidup beragama. 4. Pemberdayaan organisasi masyarakat/keagamaan. 5. Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kab. Kep. Selayar 6. Internalisasi nilai-nilai keagamaan 7. Pembinaan keagamaan 8. Peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara. 9. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 10. Pengembangan wawasan kebangsaan. 11. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan. 	Sekretariat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa. 4. Peningkatan aktifitas pengawasan. 5. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pengawasan. 6. Penanganan Pengaduan masyarakat. 7. Pencegahan Korupsi. 8. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut. 9. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 10. Pendampingan Reviu dan Konsultasi Penyusunan LK SKPD. 11. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 12. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 	Seluruh SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> 13. Perbaikan Praktik Profesional. 14. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 15. Peningkatan kualitas manajemen dan asset daerah. 16. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 17. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa 	
3	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	<p>Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah</p> <p>Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Indikator dan Capaian Kinerja Individu, Kegiatan dan Program SKPD. 2. Penyusunan LAKIP Kabupaten. 3. Penyusunan LAKIP SKPD 4. Asistensi LAKIP SKPD <ul style="list-style-type: none"> 1. Ketatalaksanaan daerah. 2. Pelaksanaan birokrasi Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Pengkoordinasian kebijakan dan pengendalian administrasi bidang pembangunan. 4. Peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah 5. Peningkatan pelaksanaan kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala daerah. 6. Penataan daerah otonomi. 7. Kerjasama pembangunan. 8. Penelitian dan pengembangan. 9. Perencanaan pembangunan daerah. 10. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah. 11. Perencanaan pembangunan ekonomi. 12. Perencanaan pembangunan sosial budaya. 13. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. 14. Penguatan kapasitas pranata Litbang. 15. Informasi Ristek Daerah. 	Seluruh SKPD
4	Meningkatnya kualitas	Indeks	1. Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sekretariat Daerah,

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
	pelayanan publik	Kepuasan Masyarakat (IKM)	2. Survei kepuasan masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu dan Tenaga Kerja, Bappelitbangda
5	Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kabupaten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 2. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. 3. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. 4. Pemberantasan peredaran cukai rokok illegal. 5. Pendidikan politik masyarakat. 6. Peningkatan koordinasi fasilitasi dan penyelenggaraan layanan bidang ketenteraman dan ketertiban umum. 7. Peningkatan Koordinasi, dan Penyelenggaraan Layanan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum 	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah
6	Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah	Transmigran lokal (KK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan. 2. Pengembangan ekonomi pedesaan. 3. Peningkatan peran perempuan di pedesaan. 4. Pembangunan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. 5. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa. 6. Peningkatan kinerja pemerintahan desa. 7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa mandiri Persentase desa berkembang Persentase desa tertinggal	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan dan pemanfaatan teknologi tepat guna. 5. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa. 6. Peningkatan kinerja pemerintahan desa. 7. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 8. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase angka kemiskinan Jumlah penduduk miskin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. 2. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, 3. Pembinaan anak terlantar. 	Dinas Sosial, Dinas Kelautan dan Perikanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
		(KK)	4. Pembinaan para penyandang cacat dan trauma. 5. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).	
9	Meningkatnya daya beli masyarakat	Income per kapita penduduk (Juta)		Seluruh SKPD
10	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka melek huruf	1. Peingkatan mutu pendidikan non formal.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan
		Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	1. Pendidikan anak usia dini (PAUD). 2. Pendidikan wajib belajar 9 tahun. 3. Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. 4. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. 5. Manajemen pelayanan pendidikan 6. Peningkatan mutu pendidikan. 7. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan 8. Peningkatan kualitas pelayanan informasi	
11	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan. 2. Pengembangan lingkungan sehat 3. Perbaikan Gizi Masyarakat 4. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 5. Upaya Kesehatan Masyarakat 6. Pengawasan Obat dan BHP 7. Promkes & Pemberdayaan Masyarakat 8. Pengembangan Lingkungan Sehat 9. Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Menular	Dinas kesehatan,

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
			10. Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana Puskesmas / Pustu dan Jaringannya 11. Pelayanan Kesehatan Ibu 12. Penanggulangan Penyakit Tidak Menular 13. Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana RS 14. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 15. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit 16. Upaya Kesehatan Masyarakat (BLUD) 17. Pelayanan Kesehatan Gratis	Rumah Sakit Umum Daerah
12	Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Pembangunan Keluarga Berencana/Keluarga Sejahtera 2. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga 3. Pelayanan kontrasepsi. 4. Peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga 5. Pemenuhan hak anak (PHA) 6. Keluarga berencana/sejahtera 7. Pengendalian penduduk 8. Penataan administrasi kependudukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	1. Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan 2. Peningkatan kualitas hidup perempuan. 3. Usaha ekonomi perempuan menuju kemandirian dan kesejahteraan. 4. Peningkatan perlindungan hak perempuan.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
13	Meningkatnya kemandirian pemuda	Persentase pemuda mandiri	1. Peningkatan koordinasi peran serta kepemudaan. 2. Pembinaan pemuda dan olah raga 3. Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan seni. 4. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga 5. Peningkatan pembinaan prestasi olahraga pelajar.	Dinas Pemuda dan Olahraga
14	Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)		
15	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat	1. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 2. Pengembangan dan Keselamatan Transportasi	Dinas Perhubungan
		Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut		
		Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara		
16	Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar	Jalan lingkaran timur utara terbangun (%)	1. Pembangunan jalan dan jembatan 2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 3. Pembangunan infrastruktur perdesaan 4. Program pengendalian banjir	
		Jalan lingkaran		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab	
		timur tengah terbangun (%)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Jalan lingkaran timur selatan terbangun (%)			
		Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)			
		Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	1. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
		Berfungsinya Bandara Kayuadi			
		Jumlah Pelabuhan Laut (%)			
		Perluasan terminal angkutan darat (%)			
		Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)			
		Rasio jaringan irigasi			1.pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
		Rasio ketersediaan air		1.penyediaan dan pengelolaan air baku	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
		baku		
		Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	1. pengembangan kinerja pengelolaan air minum 2. pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	
		Rasio ketersediaan air bersih industri (%)		
		Rumah layak huni (%)	1. Pemberdayaan Komunitas Perumahan 2. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 3. Program strategis APBN 4. Program legislasi	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Cakupan sanitasi layak (%)	1. Pembangunan turap/talud/bronjong 2. Pembangunan/rehabilitasi saluran drainase dan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Kawasan pemukiman kumuh tertangani (%)	1. Pemberdayaan Komunitas Kawasan Permukiman 2. Penataan bangunan dan lingkungan 3. Penataan ruang terbuka hijau 4. Pengelolaan areal pemakaman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	Dialihkan ke provinsi	-
		Rasio elektrifikasi industri (%)		
		PLTMG terbangun dan beroperasi	Dialihkan ke provinsi	-

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
		Terminal gas terbangun dan beroperasi		
17	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	1. Pengembangan destinasi pariwisata 2. Pengembangan pemasaran dan pariwisata. 3. Pengembangan kemitraan pariwisata 4. Pengembangan ekonomi kreatif	Dinas Pariwisata
		Jumlah kunjungan wisatawan asing		
18	Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	1. Peningkatan Pelayanan Angkutan	Dinas Perhubungan
19	Meningkatnya investasi	Nilai PMDN	1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 2. Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi. 3. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah. 4. Peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan terpadu satu pintu. 5. Menginsentififikasi penanganan pengaduan masyarakat. 6. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kerjasama investasi. 7. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penanaman modal. 8. Pengembangan hubungan industrial. 9. Penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana promosi penanaman modal. 10. Pengembangan komunikasi informasi dan media massa.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
		Nilai PMA (\$)		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
			11. Kerjasama informasi dan mass media. 12. Peningkatan kerjasama pihak ketiga. 13. Kajian pengembangan potensi daerah. 14. Peningkatan kualitas layanan informasi berbasis IT 15. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 16. Pengembangan perdagangan dan kerjasama	
20	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Realisasi pembangunan KEK pariwisata	1. Koordinasi KEK Pariwisata	Dinas Pariwisata
21	Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang	Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	1. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu 2. Penyelenggaraan dan Pengelolaan TPI	Dinas Kelautan dan Perikanan
22	Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa)	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	1. Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM
23	Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan (ton)	1. Peningkatan kesejahteraan petani 2. Peningkatan ketahanan pangan 3. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 4. Peningkatan produksi pertanian/perkebunan 5. Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 6. Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman hortikultura (ton)		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
		Persentase peningkatan produksi perkebunan (ton)		
		Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat pemurnian sapi Bali (%)	1. Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2. Peningkatan produksi hasil peternakan 3. Peningkatan penerapan teknologi peternakan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi unggul (%)		
		Persentase peningkatan produksi ternak		
		Rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	Dialihkan ke provinsi	-
		Produksi hasil hutan (m ³)		
		Kerusakan hutan dan lahan (ha)		
		Persentase peningkatan		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
		produksi perikanan tangkap (ton dan %)		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (ton dan %)	1. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	
		Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	1. Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan 2. Penguatan Kelembagaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	
		Persentase peningkatan konsumsi ikan (kg/orang/tahun)	3. Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan	
24	Terpeliharanya kelestarian sumberdaya alam	Indeks Lingkungan Hidup	1. Pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan kebakaran. 2. Penanggulangan kebakaran. 3. Program kinerja pengelolaan sampah 4. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 6. Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 7. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 8. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 9. Penaatan Hukum Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
			10. Kemitraan Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat	
25	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja (%) Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. 2. Peningkatan kesempatan kerja. 3. Perlindungan tenaga kerja. 4. Pelayanan administrasi BLK. 5. Peningkatan jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
26	Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM 2. Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro 3. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 4. Penataan sistem kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan koperasi. 2. Peningkatan apresiasi hasil kinerja koperasi atas prestasi nilai 3. Pengembangan perdagangan. Koordinasi dan kerjasama 4. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan ekonomi kerakyatan 5. Pengendalian kemetrolagian 6. Perlindungan konsumen 7. Pengembangan industri kecil dan menengah 8. Peningkatan kemampuan teknologi	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
27	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)	1. Pengelolaan kekayaan budaya. 2. Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 3. Pengembangan nilai budaya Sejarah. 4. Pengembangan budaya dan cinta tanah air. 5. Pengembangan nilai budaya. 6. Pengelolaan keragaman budaya 7. Peningkatan kompetensi SDM tenaga budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nama Program	Penanggung Jawab
		yang dilestarikan		

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama Tahun 2019. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan, dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dalam pelaksanaan maupun strategi agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selama Tahun 2019 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan dalam RPJMD 2016-2021. Hasil analisis pencapaian kinerja sasaran terhadap 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis, diketahui bahwa 16 sasaran dengan kategori Sangat Tinggi atau sekitar 59,26%, 5 sasaran dengan kategori Tinggi atau sekitar 18,51%, 1 sasaran dengan kategori Sedang atau sekitar 3,70%, 1 sasaran dengan kategori Rendah atau sekitar 3,70%, 3 sasaran dengan kategori Sangat Rendah atau sekitar 11,11%, dan 1 sasaran kinerja belum dirilis. Rata-rata realisasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar mencapai **109,71%** dengan kategori **Sangat Tinggi**. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang telah diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dinyatakan berhasil.

Terhadap berbagai target capaian maupun yang tidak tercapai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar akan melakukan langkah konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat

dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2019 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang, sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi, sehingga seluruh sasaran program tahun mendatang nantinya dapat dicapai lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Lampiran 1



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020
NOMOR : / /III/2020/BAPPELITBANGDA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUH. BASLI ALI
Jabatan : BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

Pada Tahun 2019 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Benteng, Maret 2020
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

H. MUH. BASLI ALI

Penetapan Kinerja
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2020

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
I	Mewujudkan Nilai Keagamaan Sebagai Sumber Inspirasi dan Basis Nilai Utama dalam Pembangunan secara Terencana, Menyeluruh, dan Berkelanjutan	Meningkatnya aktivitas keagamaan dan kesalehan sosial serta toleransi antar umat beragama	Pelaksanaan ibadah	Sangat Baik
			Jumlah insiden dalam hubungan antar umat beragama	0
II	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Baik Melalui Pendekatan Aspiratif, Partisipatif, dan Transparan	Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel	Opini atas laporan keuangan	WTP
		Meningkatnya kualitas pemerintahan daerah yang efektif dan efisien	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	BB
			Skor Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah (EKPD)	Sangat Tinggi
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IPM)	95%
		Terpeliharanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keamanan) di kabupaten	96,00%
		Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan transmigrasi lokal berdasarkan kebutuhan daerah	Transmigran lokal (KK)	20

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase desa mandiri	3 Desa (16,05)
			Persentase desa berkembang	10 desa (58,01)
			Persentase desa tertinggal	0
III	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat	Berkurangnya penduduk miskin	Persentase angka kemiskinan	4,79
			Jumlah penduduk miskin (KK)	6.165
		Meningkatnya daya beli masyarakat	Income per kapita penduduk (Juta)	28,5
			Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka melek huruf
		Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)		12,54
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka usia harapan hidup	67,58
		Meningkatnya kualitas keluarga, keberdayaan, dan peran perempuan dalam pembangunan	Rasio Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	(KB) 99,98 (KS) 96,59
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	27,5
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,75
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,75
Meningkatnya kemandirian	Persentase pemuda mandiri	100		

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		pemuda		
		Meningkatnya prestasi olahraga bagi pemuda dan masyarakat	Prestasi olahraga tingkat Provinsi dan Nasional (cabang olahraga)	15
IV	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Investasi Swasta di Sektor Perikanan, Kelautan dan Pariwisata	Meningkatnya aksesibilitas dari dan ke Kepulauan Selayar	Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi darat	(46%) 320 buah
			Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi laut	(15%) 80 Buah
			Persentase tingkat kelancaran aksesibilitas melalui moda transportasi udara	(65%) 816 Bh
		Meningkatnya kapasitas infrastruktur dasar	Jalan lingkaran timur utara terbangun (%)	100,00
			Jalan lingkaran timur tengah terbangun (%)	92,30
			Jalan lingkaran timur selatan terbangun (%)	91,55
			Tingkat pemenuhan jaringan jalan (%)	80,00
			Kapasitas Bandara Aroeppala (%)	(100 %) 3 Buah
			Berfungsinya Bandara Kayuadi	(9) Fungsional
				Jumlah Pelabuhan Laut

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
				17 Buah
			Perluasan terminal angkutan darat (%)	(81%) 100
			Jumlah pelabuhan penyeberangan (%)	(100%) 6
			Rasio jaringan irigasi	80,00
			Rasio ketersediaan air baku	95,00
			Rasio ketersediaan air bersih rumah tangga (%)	98,80
			Rasio ketersediaan air bersih industri (%)	100,00
			Rumah layak huni (%)	(93,57) 1250 unit
			Cakupan sanitasi layak (%)	100,00
			Kawasan pemukiman kumuh tertangani (%)	(80%) 220 Ha
			Rasio elektrifikasi rumah tangga (%)	59,15
			Rasio elektrifikasi industri (%)	43,65
			PLTMG terbangun dan beroperasi	Beroperasi
			Terminal gas terbangun dan beroperasi	Beroperasi
		Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan domestik	(50%)

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
				21,427
			Jumlah kunjungan wisatawan asing	(80%) 2.877
		Meningkatnya kelancaran arus barang dan jasa antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan	Tingkat kelancaran barang dan penumpang dari dan ke wilayah kepulauan (%)	(45%) 115.000
		Meningkatnya investasi	Nilai PMDN	56.605.136.000
			Nilai PMA (\$)	10.500.000
V	Mewujudkan pengelolaan potensi sumber daya alam sesuai keunggulan komparatif dan kompetitif daerah	Terbangun dan Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Realisasi pembangunan KEK pariwisata	Ditetapkan
		Terbangun dan berkembangnya Kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budi daya ikan karang	Realisasi pembangunan kawasan industri perikanan terpadu (%)	60
		Terbangun dan berkembangnya kawasan distribusi logistik (barang dan jasa)	Realisasi pembangunan kawasan distribusi logistik (%)	20
		Bertambahnya produksi beberapa kali lipat pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan kelautan	Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman pangan	Padi : (10%) 47.699
				Jagung : (15%) 18.172
			Persentase peningkatan produksi pertanian tanaman hortikultura	Jeruk keprok: (0,30%) 5.949,75

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
			Persentase peningkatan produksi perkebunan	Kelapa : (61,5%) 27.137,12
				Pala : (0,08%) 410,40
				Cengkeh:0,14 % 395,55
				Jambu mete: (0,09%) 2.120,40
			Tingkat produktivitas pertanian tanaman pangan (kw/ha)	Padi : 73,88
				Jagung : 59,21
			Tingkat produktivitas pertanian tanaman hortikultura (kw/ha)	Jeruk keprok : 105,50
			Tingkat produktivitas perkebunan (kg/ha)	Kelapa : 1.502
				Pala : 400
				Cengkeh : 450
				Jambu mete : 600
			Realisasi pengembangan Pulau Tanamalala menjadi pusat	80%

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
			pemurnian sapi Bali (%)	
			Realisasi pengembangan Pulau Kalao menjadi pusat pembiakan sapi unggul (%)	80%
				Sapi potong : (41,53%) 23.715
				Sapi perah : 0%
				Kerbau : (1,66%) 4,980
				Kuda : 2,39% 4,239
				Kambing : (18,024%) 95,400
				Domba : (25,84%) 112
				Ayam buras : (0,42%) 278,166
				Ayam ras pedaging :

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
				(5,75%) 11,550
				Ayam ras petelur : 5,65% 14,295
				Itik : 7,16% 8,044
			Rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	479,16 Ha (27,62%)
			Produksi hasil hutan (m ³)	1.088,80 M3 (148,82%)
			Kerusakan hutan dan lahan (ha)	40.597,48 (-5,09%)
			Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (ton dan %)	(45,63%) 35.179,1
			Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (ton dan %)	(16%) 933,14
			Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	(12,82%) 132
			Persentase peningkatan konsumsi ikan (kg/orang/tahun)	(6,17%) 52,5
		Terpeliharanya kelestarian	Indeks Lingkungan Hidup	79

No.	Misi	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		sumberdaya alam		
VI	Mewujudkan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Daerah serta Sentra Pertumbuhan di Sektor Agrobisnis dan Agromaritim yang Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	40,76
			Tenaga kerja yang ditempatkan (orang)	1.750
		Meningkatnya daya saing dan produktivitas pelaku usaha ekonomi kerakyatan	Meningkatnya jumlah dan peran koperasi dan UMKM dalam memperkuat ekonomi kerakyatan	20.304
VII	Mewujudkan Pelestarian Tradisi dan Kearifan Lokal Melalui Strategi Kebudayaan	Meningkatnya kecintaan dan kebanggaan sebagai orang Selayar	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	1.700
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan	80



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto No. 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan

Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2019

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Tahun Anggaran 2019 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, pengecualian pada masalah yang kami jelaskan dalam laporan, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Benteng, 28 April 2020

INSPEKTUR DAERAH,

H. A.R. KRG. MAGASSING, S.H.,M.H.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19630727 199303 1 014

PENGHARGAAN YANG PERNAH DITERIMA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2019

NO	TANGGAL	PENYELENGGA RA	JENIS PENGHARGAA N	KETERANGAN
1.	Selasa, 19 Nopembe r2019	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan, Jakarta	Swasti Saba Wistara	<p>Penghargaan Swasti Saba Wistara ini merupakan kali ke 3 diperoleh Kabupaten Kepulauan Selayar secara beruntun. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jln. Merdeka Utara Jakarta Pusat.</p> <p>Bupati Kepulauan Selayar, H.Muh. Basli Ali menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas raihan Wistara yang ke 3 kali berturut-turut atau hattrick. Ini menunjukkan sektor kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar sudah maju. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar atas komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Sehat.</p>
2.	Senin, 25 Juli 2019	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI	Nominasi TPID Kabupaten/Kota berprestasi wilayah Sulawesi (HLM TPID)	<p>Penghargaan tersebut diserahkan melalui Kepala Perwakilan (Direktur Eksekutif) Bank Indonesia Prov. Sul-Sel Bambang Kusmiarso kepada Bupati Selayar H.Muh. Basli Ali di ruang rapat pimpinan kantor Bupati pada High</p>

					Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Terkait HLM TPID, memiliki peran strategis dalam tataran kebijakan pengendalian inflasi. Oleh karenanya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.
3.	Jumat, 27 September 2019	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Jakarta	Hilir Expo 2019	Migas (HME)	Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Kepulauan Selayar, H.Muh. Basli Ali yang diserahkan oleh wakil Menteri ESDM Alchandra Tahar. Penghargaan ini diterima sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka suksesnya pembangunan sub penyalur BBM guna menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di masyarakat.
4.	Selasa, 29 Nopember 2019	Menteri Keuangan RI, Makassar	Penghargaan atas LKPD		Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar kembali menerima piagam penghargaan dari Menteri Keuangan RI atas nama Pemerintah Republik Indonesia, pada acara seminar Hari Oeang RI (HORI) ke-73 Tahun 2019 di Gedung Balai Diklat Keuangan Makassar, Sul-Sel. Penghargaan tersebut diberikan karena Pemda Kepulauan Selayar yang telah berhasil menyusun dan Menyajikan laporan

				keuangan Tahun Anggaran 2018 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan ini sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah dan kepausahaan terhadap regulasi yang ada.
5.	Jumat, 4 Nopember 2019	Menteri Kesehatan RI, NTT	Penghargaan Selayar bebas malaria	Untuk pertama kalinya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar menerima sertifikat eliminasi malaria dari Pemerintah Republik Indonesia yang diserahkan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr.dr.Nila Farid Moeloek, Sp. M(K), pada acara Penganjangan Bulan Eliminasi Kaki Gajah di Kabupaten Malaka Provinsi NTT.
6.	Kamis, 29 Agustus 2019	PT. Kabar Grup Indonesia	Tokoh Penggerak Pariwisata	Bupati Kepulauan Selayar, H.Muh. Basli Ali ditetapkan sebagai Tokoh Penggerak Pariwisata. Beliau adalah penggagas KEK Pariwisata Selayar dan merupakan pihak yang paling dominan disukai dan akhirnya ditetapkan sebagai pemenang. Atas perolehan Penghargaan Penggerak Pariwisata diharapkan menjadi penyemangat bagi pelaku usaha pariwisata di Kepulauan selayar.
7.	Senin, 25 September 2019	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Penghargaan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Penghargaan ini diberikan kepada Bupati Kepulauan Selayar, H.Muh. Basli Ali pada acara Porseni Guru Sulses yang di pusatkan di Kabupaten Barru. Penghargaan ini diberikan

				atas jasa kepeduliannya dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di Kabupaten kepulauan Selayar.
8.	Sabtu, 26 November 2019	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua		Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dinilai sukses mendorong Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai TPKAD penggerak percepatan Akses Keuangan Daerah.
9.		BPSDM Sulawesi Selatan, acara Expo Literasi dan Inklusi Keuangan Sulawesi Sulawesi Selatan, di anjungan Pantai Losari Makassar	Training Award	Training award merupakan penghargaan atau apresiasi dari BPSDM Sulawesi selatan dalam hal kediklatan baik manajerial maupun teknis. Penghargaan ini diterima oleh Kepala BKPPD Kepulauan Selayar yang diserahkan langsung kepala BPSDM Sulawesi Selatan, Ir. H. Imran Jausi, M.Pd di Aula Kantor BPSDM Sulawesi Selatan. Training Award diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/ kota se Sulawesi Selatan atas komitmen dan kerjasamanya dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Salah satu Indikator penghargaan tersebut adalah pengelolaan diklat dengan baik.
10.	16 Oktober 2019		Juara Kategori peserta Terrapi pada kegiatan Pekan	

			Perpustakaan Tingkat Prov. Sul-Sel	
11.	26 November 2019	Otoritas Jasa keuangan, Gubernur Sulawesi Selatan	Percepatan Akses Pembiayaan KUR melalui data SIKP	